

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kepada Allah SWT selalu kami panjatkan, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya Laporan Hasil Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 telah dapat diselesaikan. Dalam laporan ini dimunculkan gambaran fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pelaksanaan pengumpulan data Rifaskes 2011 dilakukan pada bulan Mei-Desember 2011, di 33 Provinsi. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) mengerahkan sekitar 4000 enumerator yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, seluruh peneliti Balitbangkes, dosen Poltekkes, Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perguruan Tinggi.

Proses manajemen data mulai dari data dikumpulkan, kemudian dientri ke komputer, selanjutnya data *cleaning* dilakukan di Badan Litbangkes. Proses pengumpulan data dan manajemen data ini sungguh memakan waktu, stamina dan pikiran, sehingga tidaklah mengherankan bila diwarnai dengan dinamika kehidupan yang indah dalam dunia ilmiah.

Perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan yang tinggi serta terima kasih yang tulus atas semua kerja cerdas dan penuh dedikasi dari seluruh peneliti, litkayasa dan staf Balitbangkes, rekan sekerja dari BPS, para pakar dari Perguruan Tinggi, Penanggung Jawab Operasional dari jajaran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh enumerator serta semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan Rifaskes. Simpati mendalam disertai doa kami haturkan kepada mereka yang mengalami kecelakaan sewaktu melaksanakan Rifaskes.

Secara khusus, perkenankan ucapan terima kasih kami dan para peneliti kepada Ibu Menteri Kesehatan yang telah memberi kepercayaan kepada kita semua, anak bangsa, dalam menunjukkan karya baktinya.

Kami telah berupaya maksimal, namun pasti masih banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan. Untuk itu kami mohon kritik, masukan dan saran, demi penyempurnaan Rifaskes dimasa yang akan datang.

Billahit taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Desember 2012
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

DR. dr. Trihono, MSc.



RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL RISET FASILITAS KESEHATAN (RIFASKES) PUSKESMAS 2011 BADAN LITBANGKES, KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 merupakan salah satu riset kesehatan nasional yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kemkes RI, disamping Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Riset Khusus Kesehatan (Rikus). Rifaskes 2011 dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda), Puskesmas dan Laboratorium Klinik Mandiri (LKM). *Supply* tersebut termasuk gedung, persediaan air bersih, listrik, kendaraan, peralatan, obat, Sumber Daya Manusia (SDM), pedoman, pelatihan, anggaran dan sebagainya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan di RSU Pemerintah/Pemda, Puskesmas dan LKM. Rifaskes 2011 melakukan pengukuran dan pengamatan data primer serta penelusuran data sekunder untuk mengetahui situasi terkini kecukupan dan ketepatan *supply* pada institusi-institusi pelaksana upaya kesehatan tersebut diatas.

Kerangka pikir riset ini dikembangkan atas dasar konsep *Blum* (1974), *Donabedian* (2002), *Jacob* dan *WHO* 2000. Pada prinsipnya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan ini dilakukan didalam dan diluar gedung institusi pelayanan kesehatan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Semua kegiatan tersebut mempunyai komponen asupan (*input*), proses, luaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Komponen asupan inilah yang menjadi fokus utama Rifaskes 2011. Disamping itu, dalam Rifaskes 2011 ini dikumpulkan pula data esensial yang berhubungan dengan komponen proses dan luaran dari berbagai jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan baik oleh Puskesmas, RSU Pemerintah/Pemda maupun LKM.

Dengan demikian, Rifaskes 2011 memberikan gambaran/potret dan pemetaan ketersediaan *supply* di Puskesmas, RSU Pemerintah/Pemda dan LKM, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Gambaran/potret dan pemetaan ketersediaan *supply* tersebut tentunya disesuaikan dengan fungsi yang diemban oleh ke tiga institusi pelaksana upaya kesehatan tersebut. Diharapkan riset ini juga akan menghasilkan Indeks Fasilitas dan Indeks Kinerja RSU Pemerintah/Pemda, Puskesmas dan LKM. Rifaskes 2011 mulai dilaksanakan sejak 2010. Tahap persiapan dilakukan pada tahun 2010, sedangkan pelaksanaan dilakukan pada tahun 2011 dan dilanjutkan dengan sosialisasi hasil dan analisis lanjut pada tahun 2012. Rifaskes 2011 dilaksanakan dengan menggunakan dana yang berasal dari DIPA Badan Litbangkes Kementerian kesehatan RI.

Laporan ini merupakan laporan hasil dari data fasilitas Puskesmas yang telah dikumpulkan melalui Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Puskesmas 2011. Sedangkan hasil Rifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah/Pemda dan LKM dilaporkan secara tersendiri.

Rancangan Rifaskes Puskesmas 2011 adalah studi potong lintang (*cross sectional*). Dilakukan secara sensus terhadap 9005 Puskesmas (berdasarkan data Ditjen BUK dan Pusdatin tahun 2010). Rancangan ini merupakan salah satu bagian dari rancangan Rifaskes 2011 secara keseluruhan.

Data yang dikumpulkan meliputi data input, proses, dan output upaya kesehatan di Puskesmas yang antara lain terdiri dari data fasilitas, Sumber Daya Manusia (SDM), alat kesehatan, organisasi dan manajemen, pelayanan kesehatan yang berjalan, output esensial dan pelayanan kesehatan, fungsi serta Indikator Mutu Esensial Puskesmas tahun 2010. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner Rifaskes Puskesmas 2011 yang terdiri dari 16 Blok. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan penilaian terhadap data sekunder.

Pengumpul data adalah peneliti Badan Litbangkes, politeknik kesehatan (Poltekkes), universitas (perguruan tinggi), organisasi profesi, ataupun institusi penelitian kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, baik di tingkat Nasional maupun Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilakukan : 1. Telaah dokumen (*document review*), 2. Pertemuan konsinyasi lintas program dan organisasi profesi, 3. Pertemuan pakar, 4. Penyusunan draft instrumen Rifaskes 2011, 5. Uji coba Instrumen, 6. Perbaikan dan finalisasi instrumen Rifaskes Puskesmas 2011, 7. Penyusunan *Plan of Action* (POA) pelaksanaan Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 8. Penyusunan pedoman instrumen Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 9. Pertemuan Tim Manajemen Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 10. Rapat Koordinasi tingkat Provinsi, 11. Workshop/Pelatihan Fasilitator (*Master of Trainers/MOT*) Rifaskes 2011 tingkat Pusat (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 12. Workshop/Pelatihan Penanggung Jawab Teknis/PJT (*Training of Trainers/ TOT*) Kabupaten/Kota Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 13. Workshop/Pelatihan Rifaskes Puskesmas 2011 untuk enumerator, 14. Pengumpulan data Rifaskes Puskesmas 2011, 15. Validasi studi, 16. Data RB/Editing/Cleaning, 17. Analisa data, 18. Penulisan laporan akhir, 19. Diseminasi hasil Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), dan 20. Analisis lanjut

Pengorganisasian Rifaskes 2011 meliputi tingkat Pusat, tingkat Koordinator Wilayah I – IV (1 Korwil bertanggung jawab atas 8-9 Provinsi), tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Susunan organisasi Rifaskes2011 tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana Harian, Tim Manajemen, Tim Teknis RS Pemerintah, Puskesmas, LKM, Manajemen Data (Mandat) dan Analisis Data (Andat).

Validasi studi ini dilaksanakan oleh tiga Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) terkemuka di Indonesia yaitu FKM UI, FKM Unair dan FKM Unhas. Proses validasi dilaksanakan 1-2 minggu setelah enumerator mengumpulkan data. Hasilnya baik proses pengumpulan data dan data yang dikumpulkan mempunyai validitas rata 80% lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pengumpulan data dan data yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 adalah valid.

Dari kuesioner Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang telah terkumpul sebanyak 337, sebanyak 336 merupakan kuesioner Puskesmas yang memenuhi kriteria Rifaskes 2011 dan dipergunakan untuk analisis data dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Dari 336 puskesmas yang dianalisis, 44 Puskesmas (13%) adalah Puskesmas Kecamatan, dan 292 puskesmas (87%) adalah Puskesmas Kelurahan. Ada 46 sebanyak 52,3 persen untuk program promkes, 84,1 persen untuk program kesling, 95,5 persen untuk program KIA/KB, 86,4 persen untuk Program perbaikan gizi masyarakat, 88,6 persen untuk Program pencegahan dan pemberantasan penyakit dan 95,5 persen untuk program Pengobatan. Puskesmas (14%) yang mempunyai fasilitas rawat inap (Puskesmas Perawatan). Hanya 10,8 persen Puskesmas yang merupakan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar).
- Analisis deskriptif menunjukkan bahwa hampir seluruh Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta memiliki sumber daya tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, perawat dan bidan. Sementara untuk tenaga promkes hanya 49,1 persen. Untuk tenaga sanitarian dan gizi masing-masing hanya ada sebesar 19,6 persen dan 25 persen. Semua Puskesmas Kecamatan mempunyai dokter dengan rata-rata 10 orang per puskesmas, sedangkan di Puskesmas Kelurahan hanya 98,8 persen dengan rata-rata 1,1 orang per puskesmas. Sedangkan Puskesmas Kecamatan yang mempunyai tenaga Promkes adalah 70,5% dengan rata-rata 1,4 orang per puskesmas, sedangkan di Puskesmas Kelurahan hanya 5,8% dengan rata-rata 0,1 orang per puskesmas.
- Analisis diskriptif juga menunjukkan bahwa 94,9 persen bangunan Puskesmas merupakan bangunan permanen dan kondisi semua bangunan baik atau rusak ringan 83,0 persen. Sebanyak 95,2 persen Puskesmas memiliki listrik 24 jam dan 85,7 persen Puskesmas memiliki air bersih. Untuk ketersediaan alat transportasi sebanyak 9,5 persen Puskesmas memiliki kendaraan roda 2, 11,3 persen Puskesmas memiliki pusling/ambulans dan 11,6 persen Puskesmas memiliki pusling/ambulans/perahu bermotor. Sementara hanya 4,2 persen Puskesmas memiliki pusling, 0,9 persen Puskesmas memiliki perahu bermotor dan 2,7 persen Puskesmas memiliki 3 roda 2 dan pusling/perahu bermotor. Semua fasilitas transportasi berada di Puskesmas Kecamatan, kecuali sebagian kecil kendaraan roda dua ada yang di Puskesmas kelurahan..
- Sebesar 86,9 persen Puskesmas melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan. Sementara yang memiliki dokumen RUK (Rencana Usulan Kegiatan) sebanyak 87,7 persen dan 94,9 persen Puskesmas memiliki dokumen RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan). Sedangkan yang melaksanakan Penilaian Kinerja sejumlah 95,2 persen. Tidak banyak beda antara Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
- Kegiatan Lokakarya Mini bulanan yang dilakukan Puskesmas dan ada dokumennya adalah sebesar 88,4 persen, dan Puskesmas yang melakukan Lokakarya Mini Triwulan. sebanyak 19,3 persen. Tidak banyak beda antara Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
- Untuk sistem informasi Puskesmas, hanya 10,7 persen Puskesmas yang memiliki jaringan antar ruang dimana sebagian besar ada di Puskesmas kecamatan, dan 45,8 persen Puskesmas memiliki komputer tetapi tidak ada jaringan antar ruang, dan 65,8 persen Puskesmas menggunakan ICD X.

- Di dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Kepmenkes No. 128/2004 Puskesmas diwajibkan melaksanakan Upaya Kesehatan Wajib yang terdiri dari Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA/KB, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Pengobatan. Untuk kesesuaian penanggungjawab program dengan latar belakang pendidikannya adalah sebagai berikut: di Puskesmas Kecamatan persentase penanggung jawab program yang sesuai adalah sebanyak 52,3 persen untuk program promkes, 84,1 persen untuk program kesling, 95,5 persen untuk program KIA/KB, 86,4 persen untuk Program perbaikan gizi masyarakat, 88,6 persen untuk Program pencegahan dan pemberantasan penyakit dan 95,5 persen untuk program Pengobatan. Sedangkan di Puskesmas Kelurahan adalah sebanyak 3,1 persen untuk program promkes, 7,5 persen untuk program kesling, 97,9 persen untuk program KIA/KB, 11,6 persen untuk Program perbaikan gizi masyarakat, 84,2 persen untuk Program pencegahan dan pemberantasan penyakit dan 85,3 persen untuk program Pengobatan.
- Pada kegiatan Program Promosi Kesehatan, kegiatan Penyuluhan PHBS merupakan presentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (94,9%) dan disusul oleh kegiatan Pembinaan UKBM (78,3%), Pembinaan Forum Desa Siaga (77,4%), dan Pembinaan di Poskesdes (33,0%).
- Pada kegiatan Program Kesehatan Lingkungan, kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jentik Nyamuk (87,5%) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh puskesmas, diikuti oleh Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah (74,7%) dan disusul oleh kegiatan TTU (72,6%), Pemeriksaan Sanitasi TPM (65,2%), Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga (60,7%), dan Kunjungan/Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah (27,4%), Pelayanan Klinik Sanitasi (20,2%),.
- Pada kegiatan Program kesehatan ibu, , kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (81,0%), dan diikuti oleh Pelayanan Antenatal Terintegrasi (74,3%), dan Kelas Ibu Hamil dan Nifas (38.1%), Kemitraan Bidan dan Dukun (28,3%).
- Pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, kegiatan MTBS merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (69,3%) dan disusul oleh Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat (62,2%), SDIDTK (51,2%), MTBM (37,5%), PKPR (34,2%), Kelas Ibu Balita (21,1%) dan KTA (17,9%) Manajemen Asfiksia (17,6%).
- Pada kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana, Konsultasi KB 98,2 persen ,Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap 89,3 persen, dan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi 47,0 persen.
- Pada kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, persentase tertinggi adalah kegiatan pemberian kapsul vitamin A pada Balita (98,2%), kemudian penimbangan balita (97,9%) dan pemberian tablet besi pada ibu hamil (94,6%), Pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan (93,8%), peningkatan pemberian ASI eksklusif (89,6%), dan pemberian PMT pemulihan balita Gakin (89,3%).

- Pada kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular, persentase tertinggi adalah TB Paru (98,2%) dan Diare (97,0%), DBD (95,5%), ISPA/Pneumonia (92,6%) dan Surveilans terpadu (70,5%), Kusta (53,6%), HIV/AIDS (38,7%), Filariasis (26,5%), Malaria (17,9%), diikuti Rabies (11,9%), Schistosomiasis (10,4%).
- Pada kegiatan Program Imunisasi, kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas tertinggi adalah dengan frekuensi seminggu sekali (39,9%), diikuti frekuensi setiap hari (31,8%), dua hari dalam seminggu (19,6%), dan tiga hari dalam seminggu (7,1%).
- Pada Puskesmas Perawatan PONEB, lebih dari 80 persen melakukan pelayanan PONEB 24 jam .
- Persentase keberadaan UKBM yang terbanyak berturut turut adalah Posyandu (92,6), kemudian Posyandu Lansia (67,9%), Dana Sehat (27,7%), Peduli Lansia (38,7%), Peduli TB Paru (30,78%), Poskestren (3,31%), POD/WOD (2,1%), Peduli HIV-AIDS (17,6%) dan SBH (8,6%).
- Sekitar 55,1% Puskesmas memiliki kelengkapan Jenis alat kesehatan poliklinik umum kurang dari 60% jumlah standard jenis alat poliklinik umum (56 alat). Untuk poliklinik KIA sebanyak 56,0% Puskesmas memiliki jenis alat kesehatan kurang dari 60%. Pada Puskesmas Perawatan PONEB sebanyak 42,8% Puskesmas PONEB memiliki jenis alat kesehatan kurang dari 60%.
- Untuk ketersediaan jenis obat umum, sebanyak 84,9% Puskesmas memiliki ketersediaan jenis obat umum kurang dari 80%. Sementara untuk jenis obat PONEB, 85,7% Puskesmas PONEB memiliki ketersediaan pelayanan obat PONEB kurang dari 80%. Sementara untuk jenis Obat KB, sebanyak 82,1% Puskesmas memiliki ketersediaan pelayanan obat KB kurang dari 80%.

Dari hasil-hasil diatas dapat disimpulkan bahwa: 1. Rifaskes Puskesmas 2011 khususnya di Provinsi DKI Jakarta telah menghasilkan gambaran input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang sangat kaya, rinci dan cukup valid untuk membuat potret fasilitas kesehatan di Puskesmas mulai dari tingkat nasional, Provinsi, kabupaten/kota maupun individual Puskesmas; 2. Baik input, dan proses upaya kesehatan di Puskesmas antara lain fasilitas, SDM, alat kesehatan, organisasi dan manajemen, pelayanan kesehatan yang berjalan, fungsi serta Indikator Mutu Esensial Puskesmas tahun 2010 diketemukan masih banyak berada dibawah standar yang telah ditentukan dalam buku Pedoman Puskesmas dan kebijakan Kementerian Kesehatan lainnya; 3. Dilihat dari input dan proses yang menunjang tiga fungsi Puskesmas, maka input dan proses yang mendukung keberhasilan fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan fungsi Puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan masih jauh dari harapan; 4. Dari sudut program wajib upaya kesehatan Puskesmas, maka input dan proses program wajib kesehatan ibu dan anak, terutama program PONEB, masih jauh dibandingkan standar minimal yang harus dipenuhi; dan 5. Terdapat disparitas input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang cukup tajam berdasarkan kabupaten/Kota dan Puskesmas .

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah: 1. Perlu dilakukan analisis lanjut terhadap data yang dihasilkan oleh Rifaskes Puskesmas 2011 khususnya di Provinsi DKI Jakarta; 2. Perlu pemenuhan dan pengembangan segera dan secara prioritas terhadap input dan proses upaya kesehatan Puskesmas; 3. Pemenuhan dan pengembangan input dan proses upaya Puskesmas yang menunjang fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan perlu mendapatkan prioritas tinggi; 4. Pemenuhan dan penyempurnaan input dan proses pada program PONEC pada seluruh Puskesmas perawatan harus segera dilaksanakan guna pencapaian RPJMN dan MDG; dan 5. Kesenjangan kabupaten/Kota dan antar Puskesmas dari input dan proses upaya kesehatan Puskesmas harus segera dipikirkan pemecahannya dengan meningkatkan integritas dan kejelasan peran Kementerian Kesehatan, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----------|--|
| AC | : Air Conditioner |
| AFP | : Acute Flaccid Paralysis |
| AIDS | : Acquired Immunodeficiency Syndrome |
| Akbid | : Akademi Kebidanan |
| AKL | : Akademi Kesehatan Lingkungan |
| Akper | : Akademi Keperawatan |
| Akzi | : Akademi Gizi |
| Alkes | : Alat Kesehatan |
| AMP | : Audit Maternal Perinatal |
| ANC | : Antenatal Care |
| APN | : Asuhan Persalinan Normal |
| Askes | : Asuransi Kesehatan |
| Astek | : Asuransi Tenaga Kerja |
| | |
| Balita | : Bawah Lima Tahun |
| Balkesmas | : Balai Kesehatan Masyarakat |
| BBLR | : Berat Badan Lahir Rendah |
| BCG | : Bacille Calmete Guerin |
| Bimtek | : Bimbingan Teknis |
| Binfar | : Bina Farmasi |
| BLU | : Badan Layanan Umum |
| BOK | : Bantuan Operasional Kesehatan |
| BOR | : Bed Occupancy Rate |
| BP | : Balai Pengobatan |
| BPP | : Badan Penyantun Puskesmas |
| BSL | : Bio Safety Level |
| BTA | : Basil Tahan Asam |
| | |
| CMHN | : Community Mental Health Nursing |
| | |
| D1 Keb | : Diploma-1 Kebidanan |
| DIII | : Diploma-3 |
| D-IV | : Diploma-4 |
| DBD | : Demam Berdarah Dengue |
| DHF | : Dengue Hemorrhagic Fever |
| Ditjen | : Direktorat Jenderal |
| DP3 | : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan |
| DPT | : Difteri Pertusis Tetanus |
| DTP | : Dengan Tempat Perawatan |

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| EKG | : Elektro Kardiogram |
| Email | : Electronic Mail |
| FIFO | : First In First Out |
| FEFO | : First Expired First Out |
| FK | : Fakultas Kedokteran |
| FKG | : Fakultas Kedokteran Gigi |
| FKM | : Fakultas Kesehatan Masyarakat |
| Gakin | : Keluarga Miskin |
| GKM | : Gugus Kendali Mutu |
| HB | : Hepatitis B |
| HIV | : Human Immunodeficiency Virus |
| HP | : Handphone |
| ID | : Identitas |
| IMD | : Insiasi Menyusu Dini |
| ISO | : International Standard Organization |
| ISPA | : Infeksi Saluran Pernafasan Akut |
| IUD | : Intrauterine Device |
| Jamkesda | : Jaminan Kesehatan Daerah |
| Jamkesmas | : Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| Jampersal | : Jaminan Persalinan |
| Jamsostek | : Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
| Juklak | : Petunjuk Pelaksanaan |
| Juknis | : Petunjuk Teknis |
| KB | : Keluarga Berencana |
| Kemenkes | : Kementerian Kesehatan |
| Kepmenkes | : Keputusan Menteri Kesehatan |
| Kesling | : Kesehatan Lingkungan |
| Kesmas | : Kesehatan Masyarakat |
| KN | : Kunjungan Neonatus |
| Keswa | : Kesehatan Jiwa |
| KIA | : Kesehatan Ibu dan Anak |
| KIPI | : Kejadian Ikutan Paska Imunisasi |
| KLB | : Kejadian Luar Biasa |
| KMS | : Kartu Menuju Sehat |
| Korwil | : Koordinator Wilayah |
| KTA | : Kekerasan Terhadap Anak |

| | |
|------------|--|
| Lansia | : Lanjut Usia |
| LB | : Laporan Bulanan |
| Lokmin | : Lokakarya Mini |
| LOS | : Length of Stay |
| LP LPO | : Laporan Penerimaan dan Lembar Permintaan Obat |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| MDGs | : Millennium Development Goals |
| MMD | : Musyawarah Masyarakat Desa |
| Monev | : Monitoring dan Evaluasi |
| MP ASI | : Makanan Pendamping Air Susu Ibu |
| MTBM | : Manajemen Terpadu Bayi Muda |
| MTBS | : Manajemen Terpadu Balita Sakit |
| Musrenbang | : Musyawarah Perencanaan Pembangunan |
| Ormas | : Organisasi Massa |
| P2M | : Pengendalian Penyakit Menular |
| P4K | : Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi |
| PA | : Pembantu Administrasi |
| PAH | : Penampungan Air Hujan |
| PAM | : Perusahaan Air Minum |
| PE | : Penyelidikan Epidemiologis |
| Perkesmas | : Perawatan Kesehatan Masyarakat |
| Permenkes | : Peraturan Menteri Kesehatan |
| PGPS | : Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| PHBS | : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |
| PHN | : Public Health Nursing |
| PINERE | : Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging |
| PJO | : Penanggungjawab Operasional |
| PJT | : Penanggungjawab Teknis |
| PKPR | : Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja |
| PLN | : Perusahaan Listrik Negara |
| PMT | : Pemberian Makanan Tambahan |
| PMK | : Pengembangan Manajemen Kinerja |
| PMTCT | : Prevention of Mother to Child Transmission |
| PNS | : Pegawai Negeri Sipil |
| POA | : Plan of Action |
| POD | : Pos Obat Desa |
| Podes | : Potensi Desa |
| Polindes | : Pondok Bersalin Desa |
| PONED | : Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar |
| PONEK | : Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif |
| Posbindu | : Pos Pembinaan Terpadu |

| | |
|------------|---|
| Poskesdes | : Pos Kesehatan Desa |
| Poskestren | : Pos Kesehatan Pesantren |
| Posyandu | : Pos Pelayanan Terpadu |
| Promkes | : Promosi Kesehatan |
| Protap | : Prosedur Tetap |
| PTT | : Pegawai Tidak Tetap |
| PUS | : Pasangan Usia Subur |
| Pusdatin | : Pusat Data dan Informasi |
| Puskesmas | : Pusat Kesehatan Masyarakat |
| Pusling | : Puskesmas Keliling |
| Pustu | : Puskesmas Pembantu |
| PWS | : Pemantauan Wilayah Setempat |
| QA | : Quality Assurance |
| | |
| Rekmed | : Rekam Medik |
| Renstra | : Rencana Strategis |
| RI | : Rawat Inap |
| Rifas | : Riset Fasilitas |
| Rifaskes | : Riset Fasilitas Kesehatan |
| Rikhus | : Riset Khusus |
| Riskesdas | : Riset Kesehatan Dasar |
| RJ | : Rawat Jalan |
| RPJMN | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| RPK | : Rencana Pelaksanaan Kegiatan |
| RS | : Rumah Sakit |
| RUK | : Rencana Usulan Kegiatan |
| RW | : Rukun Warga |
| | |
| S1 Kes | : Sarjana Strata-1 Kesehatan |
| S2 Kes | : Sarjana Strata-2 Kesehatan |
| SAA | : Sekolah Asisten Apoteker |
| SBH | : Saka Bhakti Husada |
| SD | : Sekolah Dasar |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SDIDTK | : Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang |
| SJSN | : Sistem Jaminan Sosial Nasional |
| SIMPUS | : Sistem Manajemen Puskesmas |
| SK | : Surat Keputusan |
| SKp | : Sarjana Keperawatan |
| SLTP | : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama |
| SMD | : Survei Mawas Diri |
| SMU | : Sekolah Menengah Umum |
| SOP | : Standard Operational Procedures |

| | |
|---------|---|
| SP2TP | : Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas |
| SPAG | : Sekolah Pembantu Ahli Gizi |
| SPAL | : Sistem Pembuangan Air Limbah |
| SPK | : Sekolah Perawat Kesehatan |
| SPM | : Standar Pelayanan Minimal |
| SPM-BK | : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan |
| SPPH | : Sekolah Pembantu Penilik Hygiene |
| SPR | : Sekolah Pengatur Rawat |
| SPRG | : Sekolah Pengatur Rawat Gigi |
| Susenas | : Survei Sosial Ekonomi Nasional |

| | |
|------|--------------------------------------|
| Tb | : Tuberkulosis |
| THT | : Telinga, Hidung, Tenggorokan |
| TOGA | : Tanaman Obat Keluarga |
| TPA | : Tempat Pemrosesan Akhir |
| TPM | : Tempat Pengelolaan Makanan/Minuman |
| TT | : Tetanus Toksoid |
| TTU | : Tempat-tempat Umum |

| | |
|-------|--|
| UCI | : Universal Child Immunization |
| UKBM | : Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat |
| UKGS | : Usaha Kesehatan Gigi Sekolah |
| UKGMD | : Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa |
| UKK | : Usaha Kesehatan Kerja |
| UKS | : Usaha Kesehatan Sekolah |
| UKP | : Upaya Kesehatan Pengembangan |
| UKW | : Upaya Kesehatan Wajib |
| USG | : Ultrasonografi |
| Usila | : Usia Lanjut |

| | |
|-------|------------------------------------|
| VCCM | : Vaccine Cold Chain Monitor |
| VCT | : Voluntary Counseling and Testing |
| Vit-A | : Vitamin A |
| VVM | : Vaccine Vial Monitor |

WOD : Warung Obat Desa

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Yankes | : Pelayanan Kesehatan |
| Yankespro | : Pelayanan Kesehatan Reproduksi |



DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR SINGKATAN | ix |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xxv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|---|
| 1.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2. PERTANYAAN KEBIJAKAN | 2 |
| 1.3. PERTANYAAN PENELITIAN | 3 |
| 1.4. TUJUAN PENELITIAN | 3 |
| 1.5. MANFAAT PENELITIAN | 3 |
| 1.6. RUANG LINGKUP | 3 |

BAB II KERANGKA KONSEP DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| 2.1. BATASAN | 5 |
| 2.2. KERANGKA KONSEP | 5 |
| 2.3. PENGEMBANGAN INDIKATOR PUSKESMAS | |
| 2.3.1. Indikator Input | 7 |
| 2.3.2. Indikator Proses | 8 |
| 2.3.3. Indikator Output | 9 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1. RANCANGAN PENELITIAN | 11 |
| 3.2. POPULASI dan SAMPEL | |
| 3.2.1. Populasi Penelitian | 11 |
| 3.2.2. Sampel Penelitian | 11 |
| 3.3. RESPONDEN | 11 |
| 3.4. PENGUMPULAN DATA | |
| 3.4.1. Jenis Data yang Dikumpulkan | 12 |
| 3.4.2. Pengumpul Data | 12 |
| 3.4.3. Cara Pengumpulan Data | 13 |
| 3.5. PENGOLAHAN DATA | 14 |
| 3.6. RINCIAN KEGIATAN | |
| 3.6.1. Tahap Persiapan | 14 |
| 3.6.1.1. Telaah Dokumen (document review) | 14 |
| 3.6.1.2. Pertemuan Konsinyasi Lintas Program dan Organisasi Profesi | 14 |
| 3.6.1.3. Pertemuan Pakar | 14 |
| 3.6.1.4. Penyusunan Instrumen | 14 |
| 3.6.1.5. Uji coba instrumen | 15 |
| 3.6.1.6. Penyusunan Plan of Action (POA) Pelaksanaan..... | 15 |

| | |
|---|----|
| 3.6.2. Tahap Pelaksanaan | 15 |
| 3.6.2.1. Pengorganisasian Lapangan | 15 |
| 3.6.2.2. Penyusunan Pedoman Instrumen | 16 |
| 3.6.2.3. Pertemuan Tim Manajemen | 16 |
| 3.6.2.4. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi | 16 |
| 3.6.2.5. Workshop Fasilitator Tingkat Pusat | 17 |
| 3.6.2.6. Workshop Penanggungjawab Teknis Kabupaten/Kota | 17 |
| 3.6.2.7. Workshop Enumerator | 18 |
| 3.6.2.8. Pengumpulan Data | 18 |
| 3.6.2.9. Validasi Studi | 19 |
| 3.6.2.10. Pengolahan Data | 19 |
| 3.6.2.11. Analisa Data | 19 |

BAB IV HASIL

| | |
|--|----|
| 4.1. JUMLAH PUSKESMAS | 21 |
| 4.2. FASILITAS PELAYANAN LAIN DI PUSKESMAS | 23 |
| 4.3. SUMBER DAYA MANUSIA | 24 |
| 4.4. SARANA DAN PRASARANA | 26 |
| 4.5. ALAT TRANSPORTASI | 28 |
| 4.6. MANAJEMEN PUSKESMAS | 29 |
| 4.6.1. Perencanaan Tahunan dan Lokakarya Mini dan Penilaian Kinerja..... | 29 |
| 4.6.2. Sistem Informasi Puskesmas | 32 |
| 4.7. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM | 33 |
| 4.8. PELAYANAN KESEHATAN | 36 |
| 4.8.1. Program Promosi Kesehatan..... | 36 |
| 4.8.1.1. Kegiatan Program Promosi Kesehatan..... | 36 |
| 4.8.1.2. Pelatihan Program Promosi Kesehatan..... | 38 |
| 4.8.1.3. Pedoman Program Promosi Kesehatan | 39 |
| 4.8.1.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan..... | 41 |
| 4.8.2. Program Kesehatan Lingkungan..... | 42 |
| 4.8.2.1. Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan..... | 42 |
| 4.8.2.2. Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan..... | 45 |
| 4.8.2.3. Pedoman Program Kesehatan Lingkungan..... | 47 |
| 4.8.2.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan..... | 48 |
| 4.8.3. Program Kesehatan Ibu..... | 49 |
| 4.8.3.1. Kegiatan Program Kesehatan Ibu..... | 49 |
| 4.8.3.2. Pelatihan Program Kesehatan Ibu..... | 51 |
| 4.8.3.3. Pedoman Program Kesehatan Ibu | 52 |
| 4.8.3.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu..... | 55 |
| 4.8.4. Program Kesehatan Bayi dan Anak | 57 |
| 4.7.4.1. Kegiatan Program Kesehatan Bayi dan Anak..... | 57 |
| 4.7.4.2. Pelatihan Program Kesehatan Bayi dan Anak..... | 59 |
| 4.7.4.3. Pedoman ProgramKesehatan Bayi dan Anak..... | 61 |
| 4.7.4.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Bayi dan Anak..... | 64 |

| | |
|---|------------|
| 4.8.5. Program Keluarga Berencana..... | 65 |
| 4.8.5.1. Kegiatan Program Keluarga Berencana..... | 65 |
| 4.8.5.2. Pelatihan Program Keluarga Berencana..... | 67 |
| 4.8.5.3. Pedoman Program Keluarga Berencana..... | 68 |
| 4.8.5.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Keluarga Berencana..... | 70 |
| 4.8.6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 72 |
| 4.8.6.1. Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat..... | 72 |
| 4.8.6.2. Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat..... | 74 |
| 4.8.6.3. Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 76 |
| 4.8.6.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat..... | 79 |
| 4.8.7. Program Pengendalian Penyakit Menular..... | 81 |
| 4.8.7.1. Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular..... | 81 |
| 4.8.7.2. Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular..... | 84 |
| 4.8.7.3. Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular..... | 88 |
| 4.8.7.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Pengendalian Penyakit Menular.... | 91 |
| 4.8.8. Program Imunisasi..... | 93 |
| 4.7.8.1. Program Imunisasi di Puskesmas..... | 93 |
| 4.7.8.2. Pelatihan Program Imunisasi..... | 94 |
| 4.7.8.3. Pedoman Program Imunisasi..... | 95 |
| 4.7.8.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi..... | 97 |
| 4.9. PELAYANAN PONED PUSKESMAS PERAWATAN..... | 99 |
| 4.10. PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 100 |
| 4.11. ALAT KESEHATAN DAN OBAT | 109 |
| 4.11.1. Poliklinik Umum | 109 |
| 4.11.2. Poliklinik KIA..... | 110 |
| 4.11.3. Alat-alat PONED | 111 |
| 4.11.4. Alat-alat Imunisasi | 113 |
| 4.11.5. Obat Umum..... | 113 |
| 4.11.6. Obat PONED..... | 115 |
| 4.11.7. Obat/Alat KB..... | 116 |
| BAB V. KESIMPULAN..... | 119 |
| BAB VI. SARAN-SARAN..... | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA | 123 |
| LAMPIRAN 1, SK TIM RIFASKES 2011 PROVINSI DKI JAKARTA | |
| LAMPIRAN 2, KUESIONER PUSKESMAS RIFASKES 2011 | |



DAFTAR TABEL

| Nomor Tabel | Judul Tabel | Hal. |
|---|--|-------------|
| Tabel 3.1. | Jumlah Puskesmas per Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta | 11 |
| Tabel 4.1.1. | Jumlah Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011 | 21 |
| Tabel 4.1.2. | Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Tingkat Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 22 |
| Tabel 4.1.3. | Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Jenis Puskesmas, di Provinsi DKI Jakarta ,Rifaskes 2011 | 22 |
| <u>FASILITAS PELAYANAN LAIN DI PUSKESMAS</u> | | |
| Tabel 4.2.1. | Persentase Puskesmas dengan Fasilitas PONEB Menurut Jenis Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 23 |
| <u>SUMBER DAYA MANUSIA</u> | | |
| Tabel 4.3.1.a. | Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 24 |
| Tabel 4.3.1.b. | Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 25 |
| <u>SARANA DAN PRASARANA</u> | | |
| Tabel 4.4.1. | Persentase Puskesmas dengan menurut Jenis dan Kondisi Seluruh Bangunan Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 27 |
| Tabel 4.4.2. | Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Listrik 24 Jam dan Air Bersih Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 27 |
| <u>ALAT TRANSPORTASI</u> | | |
| Tabel 4.5.1 | Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Alat Transportasi Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 29 |
| <u>MANAJEMEN PUSKESMAS</u> | | |
| Tabel 4.6.1.1. | Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Perencanaan dan Penilaian kinerja Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 30 |
| Tabel 4.6.1.2. | Persentase Puskesmas menurut Penggerakan pelaksanaan di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 31 |
| Tabel 4.6.1.3. | Persentase Puskesmas dengan RKT menurut Ketersediaan Dokumen dan Keterlibatan PJ Program dalam menyusun RKT di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011 | 32 |

| Nomor Tabel | Judul Tabel | Hal. |
|--------------------|---|-------------|
| Tabel 4.6.2.1. | Persentase Puskesmas menurut Sistem Informasi Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 33 |

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

| | | |
|----------------|--|----|
| Tabel 4.7.1.a. | Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 34 |
| Tabel 4.7.1.b. | Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 35 |

PELAYANAN KESEHATAN

| | | |
|--------------------|---|----|
| Tabel 4.8.1.1.1. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kegiatan Program Promosi Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 37 |
| Tabel 4.8.1.2.1. | Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Program Promosi Kesehatan pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 39 |
| Tabel 4.8.1.3.1. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman Program Promosi Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 40 |
| Tabel 4.8.1.4.1. | Persentase Puskesmas menurut Penerimaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 41 |
| Tabel 4.8.2.1.1.a. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 43 |
| Tabel 4.8.2.1.1.b. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 44 |
| Tabel 4.8.2.2.1. | Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan, pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 46 |
| Tabel 4.8.2.3.1. | Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Pedoman dalam Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 47 |
| Tabel 4.8.2.4.1. | Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 49 |
| Tabel 4.8.3.1.1. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Ibu di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 50 |
| Tabel 4.8.3.2.1. | Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan pada Pelatihan Program Kesehatan Ibu pada Tahun 2009-2010, Rifaskes 2011 | 52 |

| Nomor Tabel | Judul Tabel | Hal. |
|--------------------|---|-------------|
| Tabel 4.8.3.4.1.a. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman Program Kesehatan Ibu di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 53 |
| Tabel 4.8.3.4.1.b. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman Program Kesehatan Ibu di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 55 |
| Tabel 4.8.3.5.1. | Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 56 |
| Tabel 4.8.4.1.1.a. | Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 58 |
| Tabel 4.8.4.1.1.b. | Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 59 |
| Tabel 4.8.4.2.1. | Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 60 |
| Tabel 4.8.4.3.1.a. | Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 62 |
| Tabel 4.8.4.3.1.b. | Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 63 |
| Tabel 4.8.4.4.1. | Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 64 |
| Tabel 4.8.5.1.1. | Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 66 |
| Tabel 4.8.5.2.1. | Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Pelayanan KB Tahun 2009-2010 di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 67 |
| Tabel 4.8.5.3.1.a. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 69 |
| Tabel 4.8.5.3.1.b. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 70 |
| Tabel 4.8.5.4.1. | Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan KB dari Dinas Kesehatan Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 71 |
| Tabel 4.8.6.1.1.a. | Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 73 |
| Tabel 4.8.6.1.1.b. | Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 74 |

| Nomor Tabel | Judul Tabel | Hal. |
|--------------------|--|-------------|
| Tabel 4.8.6.2.1. | Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2009-2010 di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 75 |
| Tabel 4.8.6.3.1.a. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 77 |
| Tabel 4.8.6.3.1.b. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 78 |
| Tabel 4.8.6.3.1.c. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 79 |
| Tabel 4.8.6.4.1. | Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 80 |
| Tabel 4.8.7.1.1.a. | Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 81 |
| Tabel 4.8.7.1.1.b. | Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 83 |
| Tabel 4.8.7.1.1.c. | Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 84 |
| Tabel 4.8.7.2.1.a. | Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 85 |
| Tabel 4.8.7.2.1.b. | Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 86 |
| Tabel 4.8.7.2.1.c. | Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 87 |
| Tabel 4.8.7.3.1.a. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 88 |
| Tabel 4.8.7.3.1.b. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 90 |

| Nomor Tabel | Judul Tabel | Hal. |
|---|---|-------------|
| Tabel 4.8.7.3.1.c. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 91 |
| Tabel 4.8.7.4.1. | Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 92 |
| Tabel 4.8.8.1.1. | Persentase Puskesmas menurut Frekuensi Pelayanan Imunisasi di Dalam dan Luar Gedung di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 94 |
| Tabel 4.8.8.2.1. | Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Imunisasi Tahun 2009-2010 di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 95 |
| Tabel 4.8.8.3.1. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Imunisasi di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 96 |
| Tabel 4.8.8.4.1. | Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Imunisasi di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 98 |
| <u>PELAYANAN PONED</u> | | |
| Tabel 4.9.1. | Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan PONED, Rifaskes 2011 | 99 |
| <u>PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | | |
| Tabel 4.10.1. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Petugas Khusus dan Petugas yang dilatih Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 100 |
| Tabel 4.10.2. | Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Pedoman, SOP dan Peraturan tentang pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 101 |
| Tabel 4.10.3. | Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Alokasi Dana Khusu Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 102 |
| Tabel 4.10.4.a. | Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 103 |
| Tabel 4.10.4.b. | Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 104 |
| Tabel 4.10.5. | Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan pembinaan dan Pemantauan Kegiatan UKBM di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 105 |

| Nomor Tabel | Judul Tabel | Hal. |
|--------------------|--|-------------|
| Tabel 4.10.6. | Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Input dan Proses Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 106 |
| Tabel 4.10.7.a. | Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 107 |
| Tabel 4.10.7.b. | Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 108 |

ALAT KESEHATAN DAN OBAT DALAM GEDUNG

| | | |
|-----------------|--|-----|
| Tabel 4.11.1.1. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Alat Kesehatan Poliklinik Umum di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 109 |
| Tabel 4.11.2.1. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Alat Kesehatan Poliklinik KIA di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 111 |
| Tabel 4.11.3.1. | Persentase Puskesmas Perawatan Poned menurut Ketersediaan Jenis Alat Kesehatan PONED di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 112 |
| Tabel 4.11.4.1. | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan jenis Alkes Imunisasi di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 113 |
| Tabel 4.11.5.1 | Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Obat Umum di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 114 |
| Tabel 4.11.6.1. | Persentase Puskesmas Perawatan Poned menurut Ketersediaan Jenis Obat PONED di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 115 |
| Tabel 4.11.7.1. | Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan jenis Obat KB Di Provinsi DKI Jakarta , Rifaskes 2011 | 116 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor Gambar | Judul Gambar | Hal. |
|---------------------|--|-------------|
| Gambar 2.1. | Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011 | 6 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hak atas kesehatan setiap warga negara dijamin oleh konstitusi. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28A menyatakan bahwa, *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*. Selanjutnya, dalam pasal 28 H ayat 1, *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*, pasal 34 ayat 1, *"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara"*, dan pasal 34 ayat 3, *"Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak"*.

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 (pasal 10) dan PP Nomor 38 tahun 2007, penyelenggaraan urusan kesehatan di Indonesia merupakan sinergi antara peran pemerintah daerah dan pusat. Sistem Kesehatan Nasional menetapkan Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan (Kepmenkes 274 tahun 2009). Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan bagian dari pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keberadaan Rumah Sakit dan Puskesmas juga menjadi bagian dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, setidaknya terkait dengan Bab V (Bagian Kedua) mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Bab VI mengenai Upaya Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas mengatur hal yang esensial tentang Puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu Kecamatan, tapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah desa/kelurahan/RW. Masing masing Puskesmas tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling. Untuk daerah yang jauh dari sarana pelayanan rujukan puskesmas dilengkapi dengan fasilitas rawat inap

Fungsi puskesmas :

1. Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap pembangunan di wilayah kerjanya.
2. Pusat pemberdayaan Masyarakat
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat , keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif

dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan berdayaan masyarakat diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.

3. Pusat Pelayanan kesehatan Strata pertama, yang meliputi:
 - Pelayanan kesehatan perorangan
 - Pelayanan kesehatan masyarakat

Dalam upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra – Kemenkes) 2010 -2014, maka dukungan kebijakan yang tepat dalam hal Upaya Kesehatan menjadi suatu hal yang penting. Kebijakan yang tepat hanya akan diperoleh bila didasarkan pada bukti yang kuat dan sah (*evidence based policy*). Melalui kebijakan yang tepat maka perencanaan program secara konkuren di setiap tingkat administrasi Pemerintahan dan intervensi yang dilakukan akan lebih efektif.

Informasi yang dibutuhkan agar penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dapat dilakukan secara tepat, belum tersedia secara akurat, *up to date* dan memadai. Selain itu, saat ini belum tersedia peta status terkini tentang fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas dan Laboratorium) dan kinerjanya pada pada tingkat wilayah dan nasional. Penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan di masa datang yang kompleks (Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Jamkesmas) memerlukan informasi tentang *supply* pelayanan kesehatan agar tujuan tercapai optimal.

Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 merupakan salah satu riset kesehatan nasional yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan RI, disamping Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Riset Khusus Kesehatan (Rikus). Rifaskes 2011 dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu pada fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Klinik Mandiri (LKM). Buku ini membahas secara khusus mengenai pelaksanaan dan hasil Riset Fasilitas Kesehatan pada fasilitas kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan tahun 2011.

1.2. PERTANYAAN KEBIJAKAN

Supply apa yang dibutuhkan (fasilitas, SDM, peralatan kesehatan dan pelayanan kesehatan) agar institusi pelayanan kesehatan baik pusat maupun daerah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara optimal untuk mencapai tujuan RPJMN Bidang Kesehatan 2010-2014, MDGs 2015, Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK), *Universal Coverage*, dan akselerasi pencapaian pembangunan kesehatan.

1.3. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu Puskesmas, termasuk SDM, alat kesehatan (alkes) penting dan canggih dan penyediaan pelayanannya pada tingkat wilayah dan nasional
2. Bagaimana distribusi *supply* pelayanan kesehatan di berbagai wilayah

1.4. TUJUAN PENELITIAN

1. Diperolehnya informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas (puskesmas), termasuk Sumber Daya Manusia, peralatan kesehatan penting dan penyediaan pelayanannya pada tingkat wilayah dan nasional (*stock opname*).
2. Diperolehnya peta ketersediaan *supply* fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) di berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi)
3. Diperolehnya Indeks Kinerja Puskesmas

1.5. MANFAAT PENELITIAN

1. Mendukung pencapaian Universal Coverage Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan menyediakan data fasilitas (puskesmas) terkait dengan paket pelayanan kesehatan yang dapat diberikan (*benefit package*).
2. Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan revitalisasi Puskesmas.
3. Memungkinkan Pemerintah Pusat/provinsi mengalokasi bantuan/peran kepada daerah berdasar evidens secara optimal.
4. Memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan *supply* pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
5. Dapat digunakan dasar bagi perencanaan fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai tingkat administrasi pemerintahan.
6. Menghasilkan peta yang terintegrasi antara masalah kesehatan dan penyediaan pelayanan kesehatan berdasarkan berbagai riset/informasi yang relevan (riskesdas, Rifaskes, Podes, Susenas dll)
7. Mendorong kegiatan riset *follow up* yang lebih tajam dan terarah

1.6. RUANG LINGKUP

Secara keseluruhan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) ini dilakukan di seluruh Rumah Sakit Umum Pemerintah, di seluruh Puskesmas, dan di seluruh Laboratorium Klinik Mandiri di Indonesia. Tahap persiapan dilakukan pada tahun 2010, sedangkan pelaksanaan dilakukan pada tahun 2011.

BAB II

KERANGKA KONSEP DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR

2.1. BATASAN

Riset Fasilitas Kesehatan merupakan pengukuran dan pengamatan data primer serta penelusuran data sekunder tentang kecukupan (adekuasi) dan ketepatan (*appropriateness*) penyediaan fasilitas kesehatan dan kinerjanya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang disediakan oleh swasta yang dilakukan secara berkala.

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan, baik yang ditujukan untuk memberikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), rawat jalan, rawat inap, serta melingkupi strata I, II, dan III. Fasilitas kesehatan strata pertama meliputi antara lain puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan serta fasilitas laboratorium Pelayanan Mandiri. Termasuk fasilitas kesehatan strata kedua dan ketiga antara lain Balai kesehatan mata masyarakat, Balai pengobatan penyakit paru, Balai kesehatan indera masyarakat, Balai besar kesehatan paru masyarakat, RS Pemerintah dan swasta.

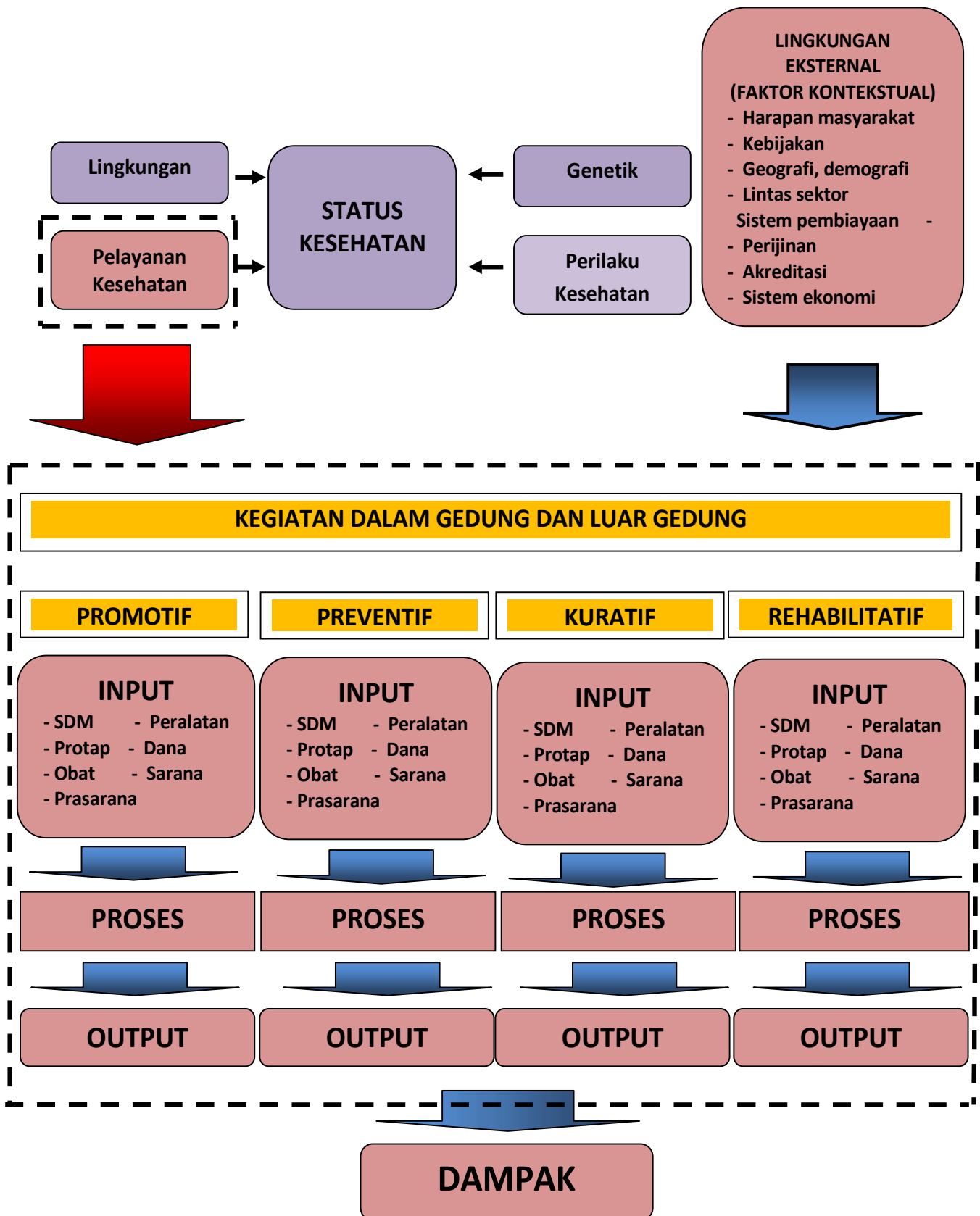
Berdasarkan tingkat kepentingannya (urgensi), maka Riset Fasilitas Kesehatan pertama ini ditujukan untuk Rumah Sakit, Puskesmas, dan Laboratorium pelayanan kesehatan mandiri.

2.2. KERANGKA KONSEP

Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan mengacu pada Konsep HL. Blum mengenai "*Health Determinant*", Konsep "*Organization System*" Donabedian dan Konsep Jakab mengenai "*Organizational Reform*".

Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan kerangka konsep seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011.

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011



Dimodifikasi dari : Blum, Donabedian, dan Jakab

HL. Blum menyebutkan bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh 4 (empat) determinan kesehatan, yakni Perilaku Kesehatan, Genetik, Lingkungan, dan Pelayanan Kesehatan. Riset Fasilitas terkait erat dengan determinan pelayanan kesehatan seperti yang dimaksud oleh Blum. Konsep ini dipadukan dengan pendekatan kesisteman organisasi yang dikemukakan oleh Donabedian, yang meliputi Input (Masukan), Proses, Output (Luaran), dan *Outcome* (Dampak). Secara khusus, Jakab menjabarkan komponen kesisteman organisasi Donabedian dalam konteks elemen-elemen yang mempengaruhi Fasilitas Kesehatan.

2.3. PENGEMBANGAN INDIKATOR PUSKESMAS

2.3.1. INDIKATOR INPUT

Indikator-indikator Input untuk puskesmas diklasifikasikan ke dalam kelompok:

A. Organisasi, meliputi:

1. Struktur
2. Fungsi
3. Jejaring
4. Luas wilayah
5. Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa

B. Peraturan/kebijakan, meliputi:

1. SPO/Protap pelayanan
2. Surat Edaran, Pedoman, Surat Keputusan

C. Sumber Daya Puskesmas, meliputi:

1. Sumber Daya Manusia: jumlah, kualifikasi, status kepegawaian, pendidikan, pelatihan
2. Fasilitas bangunan: kondisi bangunan, jenis ruang pelayanan, jenis ruang non pelayanan, sarana air, toilet, listrik, jaringan telepon, internet
3. Alat transportasi: kendaraan roda empat, roda dua, perahu bermotor, dan lain-lain. Penilaian mengenai alat transportasi ini termasuk jumlah dan kondisi dari alat transportasi tersebut.
4. Alat kesehatan: jenis, jumlah, dan kondisi
5. Obat-obatan: jenis dan jumlah
6. Buku Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Standar Prosedur Operasional untuk Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan
7. Dana operasional Puskesmas: Alokasi dan Realisasi

2.3.2. INDIKATOR PROSES

Indikator-indikator proses untuk Puskesmas diklasifikasikan ke dalam kelompok:

- A. Perencanaan (P1), meliputi keberadaan dokumen perencanaan:
 - 1. Bulanan,
 - 2. Tribulanan, dan
 - 3. Tahunan

- B. Penggerakan dan Pelaksanaan, meliputi:
 - 1. Dokumen pencatatan dan pelaporan, Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP) dan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)
 - 2. Pembagian tugas/pekerjaan jelas dan tertulis
 - 3. Pembagian daerah binaan
 - 4. Penetapan penanggung jawab Program

- C. Pembinaan dan pengawasan penilaian, meliputi:
 - 1. Bimbingan
 - 2. Monitoring: Terencana, Insidental, metode
 - 3. Evaluasi: Penilaian Kinerja

- D. Manajemen operasional Puskesmas, meliputi:
 - 1. Membuat data pencapaian/cakupan kegiatan pokok tahun lalu
 - 2. Menyusun RUK melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas
 - 3. Menyusun RPK secara rinci dan lengkap
 - 4. Melaksanakan lokakarya mini bulanan
 - 5. Melaksanakan lokakarya mini tribulanan (lintas sektoral)
 - 6. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan ke Kabupaten/kota
 - 7. Program Jaminan Mutu
 - 8. Penilaian kepuasan pasien

- E. Manajemen alat dan obat, meliputi:
 - 1. Membuat kartu inventarisasi dan menempatkan di masing-masing ruangan
 - 2. Melaksanakan up dating daftar inventaris alat
 - 3. Mencatat penerimaan dan pengeluaran obat/bahan di gudang secara rutin
 - 4. Menerapkan pendekatan *First In First Out* (FIFO) dan FEFO

2.3.3. INDIKATOR OUTPUT

A. Utilisasi (*outreach*)

1. Dalam gedung, artinya kegiatan-kegiatan upaya kesehatan yang dilakukan didalam gedung, misalnya pemeriksaan gigi.
2. Luar gedung, artinya kegiatan-kegiatan upaya kesehatan di masyarakat, misalnya puskesmas keliling, imunisasi.

B. Target cakupan pelayanan kesehatan

1. Upaya kesehatan wajib

- (1) Promosi Kesehatan,
- (2) Kesehatan lingkungan,
- (3) KIA,
- (4) Upaya perbaikan gizi masyarakat,
- (5) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular,
- (6) Upaya pengobatan.

2. Upaya kesehatan pengembangan (penambahan atau inovasi) :

- (1) Rawat inap dan PONEB
- (2) Usaha Kesehatan Sekolah
- (3) Kesehatan Gigi dan Mulut
- (4) Kesehatan usia lanjut,
- (5) Upaya kesehatan mata,
- (6) Kesehatan jiwa,
- (7) Kesehatan olah raga,
- (8) Perawatan Kesehatan Masyarakat,
- (9) Pembinaan Pengobatan Tradisional,
- (10) Kesehatan kerja
- (11) Kesehatan haji

3. Layanan Penunjang, meliputi:

- (1) Laboratorium
- (2) Farmasi
- (3) Gawat darurat bencana
- (4) Puskesmas keliling

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan Riset Fasilitas Kesehatan adalah studi potong lintang (*cross sectional*).

3.2. POPULASI dan SAMPEL

3.2.1. POPULASI PENELITIAN

Populasi penelitian adalah puskesmas di seluruh Provinsi DKI Jakarta.

3.2.2. SAMPEL PENELITIAN

Pada perencanaan awal, sampel penelitian adalah seluruh puskesmas yang terdaftar di Pusdatin seperti terlihat pada tabel 3.1. Namun sesudah dilaksanakan rapat koordinasi teknis dengan dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disepakati sampel Puskesmas adalah semua Puskesmas yang terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Sensus). Puskesmas yang akan didatangi hanya Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum bulan Februari 2010, sedangkan puskesmas lainnya informasinya diambil di Dinas kesehatan Kabupaten/Kota saja. Hasil pengumpulan data dari 337 puskesmas, 336 puskesmas yang dianalisis yaitu Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Februari 2010.

Tabel 3.1. Jumlah Puskesmas Per Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta

| NO | PROPINSI | JUMLAH PUSKESMAS |
|----|----------------------------|------------------|
| 1 | Kabupaten Kepulauan Seribu | 8 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 79 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 42 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 75 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 |
| | JUMLAH | 341 |

Sumber: Pusdatin, 2010

3.3. RESPONDEN

Responden di puskesmas meliputi :

1. Kepala Puskesmas
2. Staf puskesmas terkait
3. Pengelola informasi puskesmas

3.4. PENGUMPULAN DATA

3.4.1. JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Secara umum data yang dikumpulkan meliputi: Identitas tempat, karakteristik, Input (sumber daya manusia, fasilitas fisik, peralatan, pedoman dan ketatausahaan), proses (perencanaan, penggerakan-pelaksanaan, pengawasan penilaian dan pengendalian), dan out kegiatan.

Kuesioner Puskesmas terdiri dari 16 Blok sebagai berikut :

| | | |
|-----------|---|--|
| Blok I | : | Pengenalan Tempat |
| Blok II | : | Keterangan Pengumpul Data |
| Blok III | : | Karakteristik Puskesmas |
| Blok IV | : | Sumber Daya Manusia |
| Blok V | : | Fasilitas Fisik |
| Blok VI | : | Ketatausahaan (Tu) |
| Blok VII | : | Manajemen |
| Blok VIII | : | Pelayanan Kesehatan |
| Blok IX | : | Pelayanan Rawat Inap |
| Blok X | : | Puskesmas Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat A. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat B. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat |
| Blok XI | : | Puskesmas Sebagai Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan |
| Blok XII | : | Pustu Dan Bidan Desa |
| Blok XIII | : | Jaringan Pelayanan Kesehatan Dasar |
| Blok XIV | : | Rumah Dinas |
| Blok XV | : | Alat Kesehatan Dalam Gedung |
| Blok XVI | : | Alat Kesehatan Luar Gedung |

3.4.2. PENGUMPUL DATA

Pengumpul data adalah petugas yang direkrut Badan Litbangkes, yang berasal dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes), kalangan Universitas (perguruan tinggi), Dinas kesehatan Kabupaten/Kota ataupun masyarakat umum yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, baik di tingkat Pusat maupun daerah. Petugas pengumpul data di Puskesmas harus memenuhi kualifikasi latar belakang pendidikan D3 di bidang kesehatan. Sebelum melakukan pengumpulan data, setiap petugas mendapat pelatihan terlebih dahulu.

3.4.3. CARA PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan faktor penentu dan bagian penting dari rangkaian kegiatan survei sehingga data yang dikumpulkan terhindar dari bias, akurat, valid dan dapat diandalkan. Pengumpulan data dilakukan melalui :

1. *Interview* (wawancara) dengan menggunakan kuesioner
2. Pengamatan/ observasi langsung
3. Data sekunder, dikumpulkan dengan memperhatikan/ *check* dokumen yang ada di puskesmas.

Pada pengumpulan data, enumerator/ pengumpul data diharuskan memperhatikan etika sebagai berikut

1. Tim pengumpul data harus menghormati norma sosial setempat. Upayakan agar kunjungan ke Puskesmas dapat diatur sedemikian rupa sehingga seluruh responden sedang berada di tempat. Oleh karena itu, enumerator harus membuat perjanjian waktu terlebih dahulu sebelum berkunjung.
2. Pada waktu menggali informasi dari responden, pewawancara harus menciptakan suasana yang baik. memperhatikan dan bersikap netral terhadap respons dari responden, tidak memberi kesan memaksa. tidak emosi, tidak mengarahkan, dapat menghindari percakapan yang menyimpang atau bertele-tele. meminta izin sebelumnya untuk pertanyaan yang sensitif.
3. Setelah selesai melakukan wawancara, mengucapkan terima kasih pada saat berpamitan.

Untuk mengendalikan mutu hasil wawancara dilakukan hal seperti berikut:

1. Tim pewawancara harus bekerjasama dengan baik selama melaksanakan tugas di lapangan. Ketua Tim (Katim) harus dapat membagi tugas lapangan (dalam proses pengumpulan data) secara seimbang, baik untuk dirinya sendiri dan maupun untuk anggota tim pengumpul data yang lain.
2. Semua enumerator bertanggung jawab melakukan editing terhadap hasil wawancara yang telah dikumpulkan dan harus diverifikasi oleh Katim, segera setelah pengumpulan data dianggap selesai. Ketua tim meneliti **kelengkapan dan konsistensi** jawaban pada kuesioner yang telah diisi, segera setelah diserahkan oleh pewawancara.
3. Kualitas yang tinggi dari data yang dikumpulkan dapat dicapai apabila wawancara sudah diverifikasi dengan observasi yang cermat dan dilakukan mengikuti prosedur yang benar.
4. Apabila dalam hal-hal tertentu ada permasalahan dalam pengisian kuesioner yang tidak bisa diselesaikan oleh tim, maka tim segera menghubungi Penanggung Jawab Teknis (PJT) Kabupaten/Kota dan akan didiskusikan bersama dengan PJO Kabupaten/Kota, jika perlu berkoordinasi dengan PJT dan atau PJO Provinsi.

Kuesioner yang sudah selesai diedit oleh Ka Tim, diserahkan pada PJT Kab/Kota untuk selanjutnya dibawa ke Tim Manajemen Data. Sementara kuesioner yang belum terisi lengkap saat PJT Kab/Kota kembali ke Pusat, dilengkapi dan diserahkan kepada PJT Kab/Kota. Untuk selanjutnya dikirim via pos/paket ke Tim Manajemen Data.

3.5. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data yang direncanakan meliputi:

1. Deskriptif nasional dan provinsi
2. Peta wilayah
3. Analisis untuk menghasilkan berbagai indikator adekuasi, *apropriateness*, kinerja (efektivitas dan efisiensi), dan mutu.
4. Penyusunan Indeks Kinerja Puskesmas

Buku ini hanya memuat hasil analisis deskriptif.

3.6. RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan di dalam Riset Fasilitas Kesehatan ini meliputi:

3.6.1. TAHAP PERSIAPAN

3.6.1.1. Telaah Dokumen (*document review*)

Kegiatan ini diperlukan untuk menyusun protokol pelaksanaan penelitian, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3.6.1.2. Pertemuan Konsinyasi Lintas Program dan Organisasi Profesi

Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan lintas program dalam persiapan dan pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan tahun 2011. Pada pertemuan ini antara lain menghasilkan:

- a. Indikator-indikator kinerja Puskesmas dari unit-unit utama Kementerian Kesehatan yang terkait dan Organisasi Profesi
- b. Tersosialisasinya rencana kegiatan Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011
- c. Adanya pemahaman tentang perlu dan manfaat dari kegiatan Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011

3.6.1.3. Pertemuan Pakar

Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan dari para pakar dalam pengembangan indikator RIFAS 2011.

Pada pertemuan ini dihasilkan antara lain:

- a. Perumusan indikator Rifas 2011 untuk Puskesmas
- b. Sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- c. Pengembangan jejaring dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- d. Masukan pakar dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011

3.6.1.4. Penyusunan Instrumen

Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun instrumen penelitian Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011, meliputi instrumen RIFAS Puskesmas. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan dan berbagai masukan yang diterima melalui serangkaian pertemuan (diskusi). Kuesioner Puskesmas dikembangkan

dengan mempertimbangkan jenis (Puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan non rawat inap) dan lokasi (perkotaan dan perifer) Puskesmas.

3.6.1.5. Uji coba instrumen

Uji coba instrumen dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai validitas dan reliabilitas draft instrumen Riset Fasilitas 2011. Tujuan kegiatan uji coba instrumen adalah:

- a. Diperoleh hasil uji coba instrumen riset fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Diperolehnya gambaran untuk manajemen data hasil penelitian
- c. Diperolehnya masukan-masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan instrumen

Uji coba kuesioner Puskesmas dilakukan di 21 Puskesmas yang berbeda dengan mempertimbangkan keterwakilan Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap (dengan tempat tidur) dan Puskesmas non rawat inap (non tempat tidur), daerah perkotaan (urban) dan daerah perifer (*remote*). Puskesmas yang menjadi sampel dalam uji coba instrumen untuk masing-masing provinsi: 1 Puskesmas perawatan dan 2 *nonperawatan* (1 di perkotaan dan 1 di *remote area*) di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur.

3.6.1.6. Penyusunan *Plan of Action* (POA) Pelaksanaan

Tujuan pertemuan ini adalah tersusunnya perencanaan pelaksanaan (*plan of action*) Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011.

3.6.2. TAHAP PELAKSANAAN

Riset Fasilitas dilaksanakan pada tahun 2011. Pengumpulan data dilakukan antara bulan Juli sampai dengan pertengahan Oktober 2011. Pengorganisasian Rifaskes 2011 meliputi tingkat Pusat, tingkat Wilayah, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Susunan organisasi Rifaskes tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana Harian, Tim Manajemen, Tim Teknis, Tim Manajemen Data (Mandat) dan Tim Analisis Data (Andat).

3.6.2.1. Pengorganisasian Lapangan

Untuk memudahkan pengumpulan data dan menjaga kualitas data pelaksanaan pengumpulan dibagi dalam 4 wilayah. Setiap koordinator wilayah bertanggung jawab pada 8-9 provinsi. Koordinator Wilayah (korwil) terdiri dari Ketua, 1-2 orang Wakil Ketua, Penanggung Jawab Teknis Provinsi (PJT) dan Penanggung Jawab Administrasi.

Korwil 1. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (Pusat 1) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Papua

Korwil 2. Pusat Teknologi Kesehatan Terapan dan Epidemiologi Klinik (Pusat 2) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: Aceh, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat.

Korwil 3. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat (Pusat 3) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di Sembilan (9) provinsi, yaitu: Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Korwil 4. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pusat 4) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat.

3.6.2.2. Penyusunan Pedoman Instrumen

Sebagai perlengkapan pengumpulan data terlebih dahulu disiapkan formulir yang akan diisi oleh petugas. Sebagai pedoman cara pengisian formulir dibuat pedoman teknis instrumen Riset Fasilitas 2011. Pada pengumpulan data ini dibuat 4 pedoman teknis yaitu: pedoman teknis instrumen Puskesmas Riset Fasilitas 2011, serta pedoman teknis pertanggungjawaban keuangan Riset Fasilitas 2011. Pedoman Instrumen Riset fasilitas 2011 diperlukan sebagai acuan agar terjadi kesamaan di dalam definisi operasional dan pemaknaan dari instrumen yang sudah disusun.

Penyusunan pedoman instrumen dimaksudkan sebagai bagian dari upaya jaga mutu yang dilakukan agar data yang dikumpulkan didasarkan pada kesamaan pemahaman dari enumerator yang akan menghasilkan data yang valid. Penyusunan pedoman instrumen dilakukan melalui serangkaian diskusi yang melibatkan narasumber terkait dan kerja tim sehingga menghasilkan pedoman instrumen yang meliputi instrumen untuk pengambilan data Puskesmas.

3.6.2.3. Pertemuan Tim Manajemen

Tujuan dari kegiatan ini adalah menjamin pelaksanaan Riset Fasilitas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada pertemuan ini dihasilkan yaitu :

- a. Rencana teknis pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.
- b. Identifikasinya potensi permasalahan dan masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.
- c. Identifikasinya alternatif-alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.

Pertemuan tim manajemen merupakan salah satu bentuk dari upaya jaga mutu pelaksanaan Riset Fasilitas 2011. Pada tahap-tahap awal, pertemuan tim manajemen dilakukan untuk mematangkan perencanaan dan mempersiapkan penunjang pelaksanaan Rifas. Ketika Rifas berjalan, pertemuan tim manajemen dilakukan dengan maksud melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan Riset Fasilitas 2011 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pertemuan tim internal manajemen melibatkan tim inti, tim manajemen data, dan tim administrasi. Pelaksana kegiatan adalah Tim Riset Fasilitas 2011

3.6.2.4. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi

Rapat koordinasi tingkat provinsi bertujuan untuk koordinasi persiapan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa tujuan khusus rapat Koordinasi antara lain :

- a. Sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- b. Teridentifikasinya faktor penghambat dalam pelaksanaan Rifas 2011
- c. Teridentifikasinya faktor penunjang dan potensi untuk pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- d. Tersusunnya alternatif pemecahan untuk mengatasi faktor penghambat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- e. Tersusunnya rencana pelaksanaan dan mekanisme kerja Riset Fasilitas 2011 di setiap daerah
- f. Tersedianya tenaga penanggungjawab operasional Rifas 2011 di setiap daerah

Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 tingkat Provinsi dilaksanakan di seluruh provinsi dan dilakukan di ibukota provinsi. Rapat ini diikuti oleh pelaksana Riset Fasilitas 2011 (tim pusat yang terdiri dari ketua dan wakil penanggungjawab propinsi, tim administrasi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi).

Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 diikuti oleh pimpinan institusi terkait dengan harapan akan dilakukan sosialisasi dan persiapan pelaksanaan Riset Fasilitas di masing-masing fasilitas kesehatan yang dipimpinnya atau di setiap puskesmas yang berada di wilayah kerjanya. Kegiatan Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 dilakukan di ibukota 33 provinsi di Indonesia. Sebagai pelaksana kegiatan adalah seluruh Satuan kerja (satker) di lingkungan Badan Litbang Kesehatan.

3.6.2.5. *Workshop* Fasilitator Tingkat Pusat

Workshop fasilitator Riset Fasilitas dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlu adanya pendelegasian dan penyebarluasan pemahaman substansi Riset Fasilitas 2011 mengingat rentang kendali (*span of control*) kegiatan Rifas 2011 yang cukup lebar. Tujuan dari kegiatan ini agar peserta *workshop* mampu untuk memberikan materi dan arahan mengenai Riset Fasilitas pada Penanggungjawab Teknis (PJT) kabupaten/kota dan enumerator Riset Fasilitas 2011, dan memahami substansi, instrumen yang digunakan, serta mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011. Melalui kegiatan ini peserta mampu memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi.

Workshop diikuti oleh seluruh Penanggungjawab Teknis (PJT) Provinsi Riset Fasilitas 2011, Koordinator Wilayah, dan panitia. Pelatihan dilakukan selama 5 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum Puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggungjawaban keuangan.

3.6.2.6. *Workshop* Penanggung jawab Teknis Kabupaten/Kota

Tujuan *workshop* agar peserta *workshop* mampu untuk memberikan pemahaman mengenai substansi dan pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011 pada enumerator. Melalui kegiatan ini, peserta *workshop* mampu memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011

Workshop penanggungjawab teknis kabupaten/kota diikuti oleh seluruh Penanggungjawab Teknis (PJT) kabupaten/kota, Koordinator Wilayah, pembantu administrasi (PA) dan panitia. Pelatihan dilakukan selama 7 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Workshop ini khususnya ditujukan untuk PJT kabupaten/kota dan tenaga Pembantu Administrasi (PA). *Workshop* untuk PJT kabupaten/kota dilakukan oleh fasilitator tingkat pusat dengan dukungan dari Tim Manajemen Rifas 2011. Peserta *workshop* dapat memberikan pengarahan dan pemahaman untuk enumerator. Hal ini dilakukan mengingat akan ada sekitar 3352 enumerator Riset Fasilitas 2011 yang direkrut sehingga perlu adanya penyamaan pemahaman pelaksanaan Riset Fasilitas kepada PJT kabupaten/kota yang selanjutnya akan terlibat di dalam pelaksanaan *workshop* untuk enumerator.

3.6.2.7. *Workshop* Enumerator

Workshop untuk enumerator dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlu adanya penyamaan pemahaman substansi Riset Fasilitas 2011 kepada enumerator Rifas 2011. Dengan pemahaman yang baik, enumerator dapat mengumpulkan data dengan benar sehingga akan menghasilkan kualitas data yang baik. Tujuan umum dari *workshop* ini agar peserta *workshop* mampu untuk melakukan pengumpulan data Riset Fasilitas 2011 dengan baik, memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011

Workshop enumerator diikuti oleh seluruh enumerator Riset Fasilitas, enumerator untuk Puskesmas. *Workshop* dilakukan selama 5 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Workshop enumerator di seluruh Indonesia dilakukan terhadap 3352 enumerator Rifas 2011, dengan rincian 2186 enumerator puskesmas dan 498 orang tim entri data. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi paparan/presentasi dan tanya jawab, diskusi, dan praktek lapangan. *Workshop* dilakukan di ibukota propinsi. Pelaksanaan *workshop* dilakukan sesuai dengan kesediaan waktu masing-masing propinsi.

3.6.2.8. Pengumpulan Data

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data Riset Fasilitas di Puskesmas yang meliputi data input, proses, dan output. Kegiatan pengumpulan data riset fasilitas kesehatan, dilaksanakan di seluruh Puskesmas sebanyak 9.188 buah.

Riset fasilitas kesehatan untuk Puskesmas dilakukan secara total *coverage*. Ruang lingkup kegiatan meliputi: input, proses, output dan outcome pelayanan kesehatan di Puskesmas. Pengumpulan data dilakukan di setiap Puskesmas dengan cara mendatangi langsung fasilitas kesehatan tersebut dan melakukan wawancara terhadap responden terkait, pengamatan (observasi) dan telaah terhadap data sekunder yang ada.

3.6.2.9. Validasi Studi

Kegiatan validasi studi merupakan salah satu bentuk dari upaya jaga mutu pelaksanaan Riset Fasilitas 2011. Dilakukan oleh Akademisi dari beberapa universitas (perguruan tinggi), untuk melihat gambaran seberapa valid hasil Riset Fasilitas Kesehatan 2011. Validasi studi dilakukan oleh tim khusus dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin.

3.6.2.10. Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi *data editing*, *data entry*, *data cleaning*, dan *data processing*. Pelaksanaan pengolahan data dilakukan oleh 2 tim yaitu tim manajemen data dan tim analisis data. Tim manajemen data (mandat) bertanggung jawab pada data sejak diterima dari enumerator hingga data siap dianalisa. Sedangkan tim analisis data bertanggung jawab pada pembuatan *syntax*, *dummy table* dan mengeluarkan hasil.

3.6.2.11. Analisa Data

Analisa data meliputi: deskriptif nasional dan wilayah, Peta wilayah, analisis untuk menghasilkan berbagai indikator adekuasi, *apropriateness*, kinerja (efektivitas dan efisiensi), dan mutu, dan penyusunan Indeks Kinerja Puskesmas.

BAB IV HASIL

4.1. JUMLAH PUSKESMAS

Analisis deskriptif hasil Rifaskes 2011 untuk Puskesmas dilakukan berdasarkan seluruh Puskesmas yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah Puskesmas yang berhasil dikunjungi dan dilakukan pengumpulan data adalah sejumlah 336 Puskesmas yang tersebar di 6 kabupaten/kota. Pada tabel 4.1.1. disajikan distribusi Puskesmas tersebut.

Tabel 4.1.1
Jumlah Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Puskesmas beroperasi sebelum Februari 2010 dan dikunjungi | Puskesmas tidak dikunjungi karena beroperasi setelah Januari 2010 | Puskesmas tidak dikunjungi karena merupakan daerah sulit | Total Jumlah Puskesmas |
|--------------------|----------------------|---|---|--|------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 1 | 0 | 75 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 0 | 0 | 49 |
| DKI Jakarta | | 336 | 1 | 0 | 337 |

Dari total jumlah puskesmas, didapatkan bahwa ada 337 puskesmas yang dikunjungi, 1 Puskesmas tidak dikunjungi karena beroperasi setelah Januari 2010, tidak ada Puskesmas yang tidak dikunjungi karena akses yang sulit dan sebagainya. Analisis disepakati hanya pada Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Februari 2010 yaitu sejumlah 336 Puskesmas.

Bebeda dengan Provinsi lain, di provinsi DKI Jakarta Puskesmas dibedakan atas Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan. Puskesmas kelurahan mempunyai wilayah kerja satu Kelurahan atau sebagian Kelurahan. Puskesmas Kelurahan dan melaksanakan Upaya Kesehatan sesuai kemampuannya. Pelayanan yang tidak mampu dilaksanakan dirujuk ke Puskesmas Kecamatan.. Sedangkan puskesmas kecamatan mempunyai wilayah kerja satu atau sebagian Kecamatan dan berfungsi membina Puskesmas Kelurahan di wilayah kerjanya. Puskesmas Kecamatan melaksanakan kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan oleh Puskesmas Kelurahan. Puskesmas Kecamatan lebih tinggi tingkatnya dari puskesmas Kelurahan.

Dari tabel 4.1.2 terlihat bahwa di DKI Jakarta dari 336 puskesmas yang dianalisis, 44 puskesmas (13,1%) adalah Puskesmas Kecamatan dan 292 puskesmas (86,9%) adalah Puskesmas Kelurahan. Persentase Puskesmas kecamatan terbanyak adalah di kabupaten Pulau Seribu(33,3%) berikutnya adalah Kotajakarta Pusat(19,5%). Sedangkan persentase terendah ada di Kota Jakarta Barat (10,8%).

Tabel 4.1.2.
Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Tingkat Puskesmas
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas | Tingkat Puskesmas | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | Kecamatan | | Kelurahan | |
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,70 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 10 | 12,8 | 68 | 87,2 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 10 | 11,4 | 78 | 88,6 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 8 | 19,5 | 33 | 80,5 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 8 | 10,8 | 66 | 89,2 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 6 | 12,2 | 43 | 87,8 |
| DKI Jakarta | | 336 | 44 | 13,1 | 292 | 86,9 |

Menurut Jenis, Puskesmas diklasifikasikan menjadi dua: Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non-Perawatan. Yang dimaksud dengan Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang menjalankan fungsi perawatan. Untuk menjalankan fungsinya biasanya Puskesmas diberikan tambahan ruangan dan fasilitas rawat inap yang merupakan pusat rujukan antara.

Tabel 4.1.3.
Jumlah dan Persentase Puskesmas Menurut Jenis di Provinsi DKI Jakarta,
Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas | Jenis | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|
| | | | Perawatan | | Non Perawatan | |
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 8 | 10.3 | 70 | 89.7 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 14 | 15.9 | 74 | 84.1 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 6 | 14.6 | 35 | 85.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 8 | 10.8 | 66 | 89.2 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 6 | 12.2 | 43 | 87.8 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 31 | 70.5 | 13 | 29.5 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 15 | 5.1 | 277 | 94.9 |
| DKI Jakarta | | 336 | 46 | 13.7 | 290 | 86.3 |

Pada tabel 4.1.3. dapat dilihat bahwa dari 336 puskesmas terdapat 46 Puskesmas Perawatan (13,7%) dan 290 Puskesmas Non Perawatan (86,3%) di Provinsi DKI Jakarta. Persentase Puskesmas Perawatan terbanyak ada di Kepulauan Seribu (66,7%), .

Bila dilihat dari puskesmas menurut wilayah kerja , ternyata 70,5 persen Puskesmas kecamatan merupakan Puskesmas perawatan, sedangkan pada Puskesmas Kelurahan hanya 5,1 persen.

4.2. FASILITAS PELAYANAN LAIN DI PUSKESMAS

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan, selain mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dasar/wajib dan pengembangan, juga diperkenankan untuk memberikan fasilitas pelayanan lainnya. Fasilitas tersebut yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011, antara lain ditanyakan tentang ada/tidak ada PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar).

Tabel 4.2.1
Persentase Puskesmas dengan Fasilitas PONED Menurut Jenis Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Pusk | Puskesmas Perawatan | | Puskesmas Non Perawatan | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | % PONED | % Non PONED | % PONED | % Non PONED |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 6 | 33.3 | 16.7 | 16.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 78 | 6.4 | 7.7 | 82.1 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 88 | 8.0 | 2.3 | 81.8 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 41 | 4.9 | 7.3 | 78.0 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 75 | 5.4 | 1.4 | 87.8 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 49 | 10.2 | 4.1 | 83.7 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 36.4 | 34.1 | 13.6 | 15.9 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 1.7 | 3.4 | 3.1 | 91.8 |
| DKI Jakarta | | 336 | 6.3 | 7.4 | 4.5 | 81.8 |

Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetrik (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar. Pada umumnya, Puskesmas dimaksud mempunyai fasilitas rawat inap. Dari Rifaskes 2011, terdata bahwa dari 336 puskesmas di Provinsi DKI Jakarta ,fasilitas PONED dimiliki oleh 10,8 persen Puskesmas dengan rincian 6,3 persen di Puskesmas Perawatan dan 4,5persen di Puskesmas Non Perawatan. Terdapat perbedaan persentase Puskesmas Poned diantara 6 Kabupaten/Kota. Separuh Puskesmas di Kabupaten/Kota Kepulauan Seribu memiliki Fasilitas PONED, sementara di Jakarta Utara hanya 6,1 persen.

Bila dilihat dari Tingkat puskesmas ,menunjukkan fasilitas PONED dimiliki oleh 50,0 persen Puskesmas Kecamatan dengan rincian 36,4 persen di Puskesmas Perawatan dan 13,6

persen, Sementara di Puskesmas Kelurahan hanya 4,8 persen yang mempunyai fasilitas Poned (1,7% di Puskesmas perawatan dan 3,1% di Puskesmas nono perawatan).

4.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Puskesmas merupakan unit pelaksana pembangunan kesehatan terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Keberhasilan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sangat tergantung dari kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang ada. Yang dimaksud tenaga kesehatan di Puskesmas adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan. Selain itu dalam memberikan pelayanan kesehatan perlu pula dipertimbangkan distribusi tenaga kesehatan tersebut.

Analisis deskriptif tenaga kesehatan di Puskesmas dari hasil Rifaskes 2011 ditujukan untuk mengetahui ketersediaan tenaga Puskesmas dan penyebarannya di 6 Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan pada 336 Puskesmas yang dikunjungi. Analisis disepakati hanya pada Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Februari 2010.

Tabel 4.3.1.a.
Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Pusk | Dokter | | Dokter Gigi | | Perawat | | Bidan | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | % Ada | Jml Rata-rata/ Pusk | % Ada | Jml Rata-rata/ Pusk | % Ada | Jml Rata-rata/ Pusk | % Ada | Jml Rata-rata/ Pusk |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 2.33 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.5 | 100.0 | 2.8 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 100.0 | 2.23 | 98.7 | 1.8 | 97.4 | 3.0 | 100.0 | 3.2 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 100.0 | 2.38 | 95.5 | 2.0 | 100.0 | 4.8 | 98.9 | 3.8 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 100.0 | 2.68 | 100.0 | 1.8 | 100.0 | 3.7 | 100.0 | 2.9 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 95.9 | 1.81 | 93.2 | 1.5 | 95.9 | 2.6 | 98.6 | 2.9 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 98.0 | 2.33 | 93.9 | 1.6 | 100.0 | 4.1 | 100.0 | 3.8 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 100.0 | 10.0 | 95.5 | 6.3 | 100.0 | 15.8 | 100.0 | 13.3 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 98.6 | 1.1 | 94.2 | 1.0 | 98.3 | 1.9 | 99.3 | 1.8 |
| DKI Jakarta | | 336 | 98.8 | 2.25 | 94.3 | 1.7 | 98.5 | 3.8 | 99.4 | 3.3 |

Analisis dilakukan pada tenaga Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Sanitarian, Tenaga Gizi dan Promkes. Untuk setiap jenis tenaga dilihat keberadaannya dan jumlah rata-rata per Puskesmas, seperti dapat dilihat pada tabel 4.3.1.a. dan 4.3.1.b.

Untuk keberadaan Dokter (Tabel 4.3.1.a.) hampir seluruh Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki tenaga dokter (98,8%) dengan jumlah rata-rata 2,25 per Puskesmas. Ada 2 Kabupaten/Kota yang tidak seluruh Puskesmas nya memiliki tenaga Dokter yaitu Jakarta Barat(95,9%) dan Jakarta Utara (98,0%), nanun mempunyai rata rata 1,81 dan 2,33 dokter per Puskesmas. Semua Puskesmas Kecamatan mempunyai dokter dengan rata-rata 10

orang per puskesmas, sedangkan di Puskesmas Kelurahan hanya 98,8 persen dengan rata-rata 1,1 orang per puskesmas.

Untuk keberadaan Dokter Gigi, ada 94,3% Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki dokter gigi, dengan jumlah rata-rata 1,7 per Puskesmas. Semua Puskesmas di Kota Jakarta Pusat sudah memiliki dokter gigi, dengan rata-rata 1,8 per puskesmas. Sementara di kabupaten Kepulauan Seribu tidak ada dokter gigi di Puskesmas. Sedangkan di 4 Kota lainnya lebih dari 92 % puskesmas sudah ada dokter gigi. Namun untuk semua Kabupaten/Kota jumlah rata-rata dokter gigi per puskesmas lebih dari 1,8 orang. Keberadaan Dokter gigi di Puskesmas Kecamatan adalah 95,5% dengan rata-rata 6,3 orang per puskesmas, sedangkan di Puskesmas Kelurahan hanya 94,2% dengan rata-rata 1,0 orang per puskesmas.

Deskripsi keberadaan Perawat menunjukkan bahwa hampir 100 persen (98,5%) Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta telah memiliki tenaga Perawat dengan jumlah rata-rata 3,8 per Puskesmas. Ada 2 Kabupaten/Kota yang tidak semua Puskesmasnya memiliki perawat, yaitu kota Jakarta Selatan (97,8%) dan Jakarta Barat (95,9%), namun rata-rata nya 3,0 dan 2,6 orang per puskesmas. Keberadaan Perawat di Puskesmas Kecamatan adalah 100% dengan rata-rata 15,8 orang per puskesmas, sedangkan di Puskesmas Kelurahan hanya 98,3% dengan rata-rata 1,9 orang per puskesmas.

Tabel 4.3.1.b.
Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas | Sanitarian | | Tenaga Gizi | | Promkes | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | | % Ada | Jml Rata-rata/Pusk | % Ada | Jml Rata-rata/Pusk | % Ada | Jml Rata-rata/Pusk |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 26.9 | 0.4 | 25.6 | 0.4 | 11.5 | 0.2 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 15.9 | 0.3 | 28.4 | 0.6 | 18.2 | 0.4 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 19.5 | 0.4 | 26.8 | 0.5 | 19.5 | 0.2 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 14.9 | 0.3 | 14.9 | 0.3 | 6.8 | 0.2 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 24.5 | 0.3 | 30.6 | 0.4 | 20.4 | 0.4 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 84.1 | 2.0 | 97.7 | 2.5 | 70.5 | 1.4 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 9.9 | 0.1 | 14.0 | 0.1 | 5.8 | 0.1 |
| DKI Jakarta | | 336 | 19.6 | 0.34 | 25.0 | 0.4 | 14.3 | 0.3 |

Keberadaan Bidan di Provinsi DKI Jakarta juga hampir 100 persen (99,4%) dengan jumlah rata-rata 3,3 Bidan per Puskesmas. Ada 2 Kabupaten/Kota yang tidak semua Puskesmasnya memiliki Bidan, yaitu kota Jakarta Timur (98,9%) dan Jakarta Barat (98,6%),

namun rata-ratanya 3,2 dan 2,9 orang per puskesmas. Semua Puskesmas Kecamatan mempunyai Bidan dengan rata-rata 13,3 orang per puskesmas, sedangkan di Puskesmas Kelurahan hanya 99,3% dengan rata-rata 1,8 orang per puskesmas

Analisis keberadaan tenaga Sanitarian menunjukkan bahwa di Provinsi DKI Jakarta hanya ada di 19,6 persen Puskesmas dengan jumlah rata-rata 0,34 Sanitarian per Puskesmas. Di Kepulauan Seribu tidak ada Puskesmas yang mempunyai Sanitarian. Sementara di Kota lainnya kurang dari seperempatnya yang memiliki Sanitarian dengan jumlah rata-rata 0,3-0,04 orang per Puskesmas. Persentase Puskesmas Kecamatan mempunyai Sanitarian adalah 84,1% dengan rata-rata 2,0 orang per puskesmas, sedangkan di Puskesmas Kelurahan hanya 9,9% dengan rata-rata 0,1 orang per puskesmas

Puskesmas dengan Tenaga gizi di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 25,0 persen dengan jumlah rata-rata 0,4 per Puskesmas. Persentase tertinggi ada Kepulauan Seribu (33,3%) dan terendah ada di Jakarta Barat (14,9%). Sementara untuk jumlah rata-rata per Puskesmas, persentase tertinggi ada di Jakarta Timur (0,6) dan persentase terendah ada di Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat (0,3 Per Puskesmas). Persentase Puskesmas Kecamatan mempunyai tenaga gizi adalah 97,7% dengan rata-rata 2,5 orang per puskesmas, sedangkan di Puskesmas Kelurahan hanya 14,0% dengan rata-rata 0,1 orang per puskesmas

Tenaga Promosi Kesehatan termasuk tenaga di Puskesmas yang mempunyai peran penting untuk kontribusi pelayanan kesehatan masyarakat. Akan tetapi tenaga Promosi Kesehatan ini termasuk tenaga yang jumlahnya sedikit, di Provinsi DKI Jakarta hanya 14,3 persen Puskesmas dengan jumlah rata-rata 0,3 Tenaga Promkes Per Puskesmas. Di Kepulauan Seribu tidak ada Puskesmas yang mempunyai tenaga Promosi Kesehatan. Sementara di Kota lainnya bervariasi dari 6,8 persen di Jakarta Barat dan 20,4 persen di Jakarta Utara. Demikian juga bila dilihat dari Jumlah rata-rata per Puskesmas, tidak ada yang melebihi 0,4 per Puskesmas. Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas Persentase Puskesmas Kecamatan mempunyai tenaga Promkes adalah 70,5% dengan rata-rata 1,4 orang per puskesmas, sedangkan di Puskesmas Kelurahan hanya 5,8% dengan rata-rata 0,1 orang per puskesmas

4.4. SARANA DAN PRASARANA

Pada tabel 4.4.1. dan 4.4.2. disajikan data tentang Sarana dan Prasarana Puskesmas yang meliputi Jenis dan Kondisi bangunan, listrik 24 jam, dan air bersih.

Persentase Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kondisi bangunan dalam keadaan baik atau rusak ringan sebanyak 83,0 persen. Terbesar di Kepulauan Seribu (100%), seluruh Puskesmas di Kepulauan Seribu dalam keadaan baik atau rusak ringan. Sedangkan terendah di Jakarta Timur (71,6%). Sementara di Kota Barat dan Jakarta Utara sebesar 87,8 persen, serta di Jakarta Pusat 82,9 persen, Jakarta Selatan 87,2 persen. Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas Persentase Puskesmas Kecamatan mempunyai kondisi bangunan dalam keadaan baik atau rusak ringan adalah 88,6%, sementara di Puskesmas Kelurahan 81,8%.

Tabel 4.4.1.

Persentase Puskesmas dengan Kondisi dan Jenis Seluruh Bangunan Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas | Keadaan Bangunan Baik/Rusak Ringan | Jenis Bangunan Permanen |
|---------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 87.2 | 94.9 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 71.6 | 95.5 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 82.9 | 95.1 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 87.8 | 97.3 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 87.8 | 89.8 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 88.6 | 93.2 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 81.8 | 94.5 |
| DKI Jakarta | | 336 | 83.0 | 94.9 |

Persentase Puskesmas yang memiliki jenis bangunan permanen di Provinsi DKI Jakarta sudah 94,9 persen. Terbesar di Kepulauan Seribu (100%), seluruh Puskesmas Kepulauan Seribu dalam keadaan baik atau rusak ringan. Sedangkan terendah di Jakarta Utara (89,8%). Sementara di Kota Jakarta Barat 97,3 persen, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur sebesar 95,5 persen, serta Jakarta Selatan 94,9 persen. Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas Persentase Puskesmas Kecamatan mempunyai jenis bangunan permanen adalah 93,2%, sementara di Puskesmas Kelurahan 94,5%.

Tabel 4.4.2.

Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Listrik 24 jam dan Air Bersih Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas | Puskesmas dengan Ketersediaan (%) | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | Listrik 24 Jam | Air Bersih* |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 83.3 | 66.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 97.4 | 89.7 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 95.5 | 84.1 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 87.8 | 90.2 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 95.9 | 78.4 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 98.0 | 91.8 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 100.0 | 84.1 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 94.5 | 86.0 |
| DKI Jakarta | | 336 | 95.2 | 85.7 |

* komposit : tersedia sumber air, tersedia sepanjang tahun dan kualitas air baik

Pada tabel 4.4.2 terlihat Persentase Puskesmas yang tersedia listrik 24 jam di Provinsi DKI Jakarta 95,2 persen. Tidak ada Kabupaten/Kota yang seluruh Puskesmas mempunyai ketersediaan listrik 24 jam, tertinggi di Jakarta Utara 98,0 persen. Sementara terendah ada di Kepulauan Seribu (83,3%). Persentase Puskesmas Kecamatan yang tersedia listrik 24 jam adalah 88,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 81,8%.

Untuk ketersediaan air bersih, di Provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan air bersih sepanjang tahun hanya 85,7 persen. Tidak ada Kabupaten/Kota yang seluruh Puskesmas nya mempunyai ketersediaan listrik 24 jam, tertinggi di Jakarta Utara 91,8 persen. Sementara terendah ada di Kepulauan Seribu (66,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas Persentase Puskesmas Kecamatan mempunyai ketersediaan air bersih sepanjang tahun adalah 93,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 94,5%.

4.5. ALAT TRANSPORTASI

Untuk ketersediaan sarana transportasi, , tabel 4.5.1. menunjukkan dari 336 puskesmas menunjukkan hanya 9,5 persen Puskesmas di DKI Jakarta memiliki kendaraan bermotor roda dua. Persentase Puskesmas paling tinggi ada Jakarta Selatan (11,5%) dan Persentase kepemilikan kendaraan roda dua terendah ada di Kepulauan Seribu (0,0%), diikuti oleh Jakarta Barat (8,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai kendaraan bermotor roda dua adalah 63,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 1,4%.

Di Provinsi DKI Jakarta, hanya 4,2 persen puskesmas yang memiliki kendaraan Puskesmas Keliling (Pusling) roda 4. Persentase puskesmas tertinggi adalah Jakarta Pusat (12,2%), Jakarta Timur(4,4%). Jakarta Pusat (12,2%). Sementara yang terendah ada di kepulauan Seribu (0,0%), Jakarta Utara (2,0%) , dan Jakarta Selatan (2,6%). Persentase Puskesmas Kecamatan mempunyai Puskesmas Keliling adalah 31,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 0,3%.

Kepemilikan perahu bermotor di provinsi DKI Jakarta sebesar 0,9 persen, dan hanya ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%) dan Jakarta Pusat (2,4%) Persentase Puskesmas Kecamatan mempunyai perahu bermotor adalah 6,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan tidak ada.

Persentase puskesmas di Prov DKI Jakarta yang memiliki sarana transportasi tiga (3) kendaraan bermotor roda 2 (yang masing-masing diasumsikan digunakan oleh Sanitarian, Perawat dan Bidan untuk pelayanan luar gedung) dan pusling roda 4 atau perahu bermotor, hanya 2,7 persen. Persentase puskesmas tertinggi adalah Jakarta Pusat (4,9%), Jakarta Timur(3,4%). Jakarta Barat (2,7%). Sementara yang terendah ada di kepulauan Seribu (0,0%), Jakarta Selatan (1,3%) , dan Jakarta Utara (1,3%). Persentase Puskesmas Kecamatan mempunyai sarana transportasi tiga (3) kendaraan bermotor roda 2 dan pusling roda 4 atau perahu bermotor adalah 20,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan tidak ada.

Tabel 4.5.1.
Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Alat Transportasi
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Juml Pusk | Ketersediaan Alat Transportasi Puskesmas (%) | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--|------------|--------------------|--|-----------------------|---|
| | | | Kendaraan Roda 2 | Pusling | Perahu Bermotor | 3 Roda 2 + 1 Pusling / Perahu Bermotor | Pusling / Ambulans | Pusling/ Ambulans/ Perahu Bermotor |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 11.5 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 12.8 | 12.8 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 9.1 | 4.5 | 0.0 | 3.4 | 11.4 | 11.4 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 9.8 | 12.2 | 2.4 | 4.9 | 17.1 | 17.1 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 8.1 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 6.8 | 6.8 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 10.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.2 | 12.2 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 63.6 | 31.8 | 6.8 | 20.5 | 86.4 | 88.6 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 1.4 | 0,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DKI Jakarta | | 336 | 9.5 | 4.2 | 0.9 | 2.7 | 11.3 | 11.6 |

Ambulans merupakan sarana transportasi pasien untuk kasus yang tidak bisa ditangani Puskesmas dan memerlukan rujukan ke sarana pelayanan yang lebih mampu seperti ke rumah sakit. Puskesmas Keliling walaupun tidak didesain seperti ambulans, namun bila tidak ada ambulans digunakan juga sebagai kendaraan ambulans, yaitu membawa pasien yang memerlukan rujukan segera.

Di Provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas yang memiliki ambulans atau pusling roda empat adalah sebesar 11.3 persen. Persentase tertinggi ada di Jakarta Pusat (17,1%) dan Jakarta Selatan (12,8%), sedangkan persentase terendah adalah Kepulauan Seribu (0,0%) dan Jakarta Barat (6,8%). Sementara yang memiliki ambulans atau pusling roda empat atau perahu bermotor di DKI Jakarta sebanyak 11,6 persen. Persentase Puskesmas Kecamatan mempunyai ambulans atau pusling roda empat adalah 86,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan tidak ada.

4.6. MANAJEMEN PUSKESMAS

4.6.1. Perencanaan Tahunan Lokakarya Mini dan Penilaian Kinerja

Pada Rifaskes 2011 ditanyakan apakah Puskesmas mempunyai dokumen Rencana Kerja Tahunan tahun 2010, bila ada dilihat apakah dokumennya berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan dilihat juga apakah Penanggung Jawab Program terlibat dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Penilaian Kinerja. Selain Rencana Kerja Tahunan, Rifaskes 2011 juga melihat dokumen Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan dan Lokakarya Mini Triwulanan .

Dari 366 Puskesmas yang dianalisis di DKI Jakarta, persentase puskesmas yang mempunyai Rencana Kerja Tahunan sebanyak 86,9% (292 puskesmas). Kabupaten Kepulauan Seribu seluruh puskesmasnya mempunyai Rencana Kerja Tahunan (100%), Sedangkan di Kota Jakarta Barat hanya 94,6 persen. Sementara Persentase terendah Kota Jakarta Selatan (80,8%) dan Jakarta Timur (81,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai Rencana Kerja Tahunan adalah 97,7%, sementara di Puskesmas Kelurahan 85,3%.

Dari 366 Puskesmas yang dianalisis, persentase puskesmas yang melaksanakan Penilaian Kinerja di Provinsi DKI Jakarta adalah 95,2 persen. Ada 2 Kabupaten/Kota yang seluruh puskesmasnya melaksanakan Penilaian Kinerja (100%) yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Pusat. Sementara Persentase terendah ada di Kota Jakarta Barat (90,5%) dan Jakarta Utara (91,8). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan Penilaian Kinerja adalah 97,7%, sementara di Puskesmas Kelurahan 94,9%.

Tabel 4.6.1.1.
Persentase Puskesmas Menurut Kegiatan Perencanaan dan Penilaian Kinerja di Provinsi DKI Jakarta., Rifaskes 2011

| No. | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | % Rencana Kerja Tahunan (2010) | % Penilaian Kinerja |
|--------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 80.8 | 96.2 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 81.8 | 97.7 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 92.7 | 100.0 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 94.6 | 90.5 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 87.8 | 91.8 |
| Tingkat Puskesmas | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 97.7 | 97.7 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 85.3 | 94.9 |
| DKI Jakarta | | 336 | 86.9 | 95.2 |

Tabel 4.6.1.2. juga menggambarkan persentase puskesmas menurut pelaksanaan lokakarya mini bulanan dan Lokakarya Mini Triwulanan. Di Provinsi DKI Jakarta ada 88,4 persen puskesmas yang melaksanakan lokakarya mini bulanan dan ada dokumennya. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Seribu telah melaksanakan lokakarya mini bulanan dan ada dokumennya (100%). Sementara terendah ada di Kota Jakarta Utara (83,7%).

Sedangkan yang mengatakan melaksanakan lokakarya mini bulanan, tapi tidak dapat memperlihatkan dokumennya di Provinsi DKI Jakarta hanya 7,7 persen. Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan melaksanakan lokakarya mini bulanan dan ada dokumennya adalah 88,6%, sementara di Puskesmas Kelurahan 88,4%.

Persentase puskesmas menurut Pelaksanaan Lokakarya Mini Triwulan dan ada dokumennya di Provinsi DKI Jakarta hanya 19,3 persen Puskesmas. Terbesar di Kabupaten Kepulauan Seribu (83,3%), diikuti oleh Kota Jakarta Utara (24,5%). Sementara terendah ada di Kota Jakarta Selatan (9,0%). Sedangkan yang mengatakan melaksanakan lokakarya mini bulanan, tapi tidak dapat memperlihatkan dokumennya di Provinsi DKI Jakarta hanya 8,9 persen. Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan Lokakarya Mini Triwulan adalah 43,2%, sementara di Puskesmas Kelurahan 15,8%.

Tabel 4.6.1.2.
Persentase Puskesmas Menurut Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas | Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Lokakarya Mini Bulanan | | Lokakarya Mini Triwulan | |
| | | | % Ya, ada Dokumen | % Ya, Tidak ada Dokumen | % Ya, ada Dokumen | % Ya, Tidak ada Dokumen |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 0.0 | 83.3 | 16.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 88.5 | 10.3 | 9.0 | 10.3 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 88.6 | 5.7 | 21.6 | 6.8 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 85.4 | 7.3 | 14.6 | 7.3 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 91.9 | 8.1 | 21.6 | 5.4 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 83.7 | 8.2 | 24.5 | 16.3 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 88.6 | 4.5 | 43.2 | 9.1 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 88.4 | 8.2 | 15.8 | 8.9 |
| DKI Jakarta | | 336 | 88.4 | 7.7 | 19.3 | 8.9 |

Tabel 4.6.1.3. menunjukkan Dari 292 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, Di Provinsi DKI Jakarta terdapat 87,0 persen yang memiliki dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK). Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%). Sementara terendah ada di Kota Jakarta Selatan (82,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, semua Puskesmas Kecamatan mempunyai dokumen RUK (100,0%) , sementara di Puskesmas Kelurahan hanya 84,7%.

Bila dilihat dari keberadaan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), dari 292 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, di Provinsi DKI Jakarta terdapat 88,7 persen Puskesmas yang memiliki dokumen RPK. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), berikutnya Kota Jakarta Pusat (92,1%). Sementara terendah ada di Kota Jakarta Selatan (87,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai dokumen RPK adalah 97,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 87,1%.

Tabel 4.6.1.3
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Dokumen dan Keterlibatan PJ Program dalam menyusun Perencanaan di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No. | Kabupaten/Kota | Jml Pusk dengan RKT | % Ketersediaan Dokumen | | % Keterlibatan PJ Program dalam menyusun RKT |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------|--|
| | | | RUK | RPK | |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 63 | 82.5 | 87.3 | 93.7 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 72 | 86.1 | 88.9 | 90.3 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 38 | 89.5 | 92.1 | 97.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 70 | 88.6 | 88.6 | 95.7 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 43 | 88.4 | 86.0 | 100.0 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 43 | 100.0 | 97.7 | 100.0 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 249 | 84.7 | 87.1 | 94.0 |
| DKI Jakarta | | 292 | 87.0 | 88.7 | 94.9 |

Dari 292 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, di Provinsi DKI Jakarta terdapat 94,9% yang mengikutsertakan penanggung jawab program dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Seluruh Puskesmas di 2 Kabupaten/kota telah mengikutsertakan penanggung jawab program dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Kabupaten kepulauan Seribu dan Jakarta Utara.(100%). Sedangkan terendah ada di Kota Jakarta Timur (90,3%), kemudian Kota Jakarta Selatan (93,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, Semua Puskesmas Kecamatan mengikutsertakan penanggung jawab program dalam penyusunan rencana kerja tahunan (100%), sementara di Puskesmas Kelurahan hanya 94,0%.

4.6.2. Sistem Informasi Puskesmas

Tabel 4.6.2.1. menunjukkan Sistem Informasi yang dimiliki Puskesmas, diantaranya mengenai penggunaan sistem komputerisasi di Puskesmas, yaitu computer antar ruang terhubung satu sama lain dengan jaringan tertentu (LAN/Local Area Network) dan Penggunaan Sistem Pengkodean Penyakit dalam pencatatan pelaporan dengan ICD X di Puskesmas.

Penggunaan system komputerisasi di Puskesmas yang terhubung satu sama lain dengan jaringan tertentu (LAN/Local Area Network) di Provinsi DKI Jakarta hanya 10,7 persen. Persentase tertinggi di Kota Jakarta Pusat (22,0%), Jakarta Selatan (11,5%) . sementara terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0%) dan berikutnya Jakarta Utara (2,0%) Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai system komputerisasi dengan jaringan LAN/Local Area Network adalah 45,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 5,5%.

Sedangkan untuk penggunaan komputer tanpa jaringan antar ruang di Provinsi DKI Jakarta hanya 45,8 persen puskesmas. Persentase yang terendah di di Kabupaten Kepulauan

Seribu (0%) dan berikutnya Jakarta Selatan (37,2%). Sementara penggunaan komputer tanpa jaringan antar ruangan yang tertinggi di Jakarta Utara (59,2%) dan berikutnya Jakarta Pusat (53,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menggunakan system komputer tanpa jaringan antar ruang adalah 38,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 46,9%.

Persentase Puskesmas yang telah menggunakan system pengkodean penyakit dalam pencatatan pelaporan dengan ICD X di Provinsi DKI Jakarta hanya 65,9 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Kepulauan Seribu (83,3%) dan berikutnya di Jakarta Selatan (79,5%), Sedangkan persentase terendah ada di Jakarta Barat (43,2%), dan Jakarta Utara(55,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menggunakan system pengkodean penyakit dalam pencatatan pelaporan dengan ICD X adalah 88,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 62,3%.

Tabel 4.6.2.1.
Persentase Puskesmas Menurut Sistem Informasi Puskesmas
di Provinsi DKI Jakarta., Rifaskes 2011

| No. | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | % Penggunaan sistem komputer untuk pelayanan dalam gedung | | % Penggunaan ICD X di Puskesmas |
|---------------------------------|----------------------|------------|---|--|---------------------------------|
| | | | Ya, ada jaringan antar ruangan | Ya, menggunakan komputer tapi tidak ada jaringan antar ruang | |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 0.0 | 0.0 | 83.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 11.5 | 37.2 | 79.5 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 10.2 | 46.6 | 76.1 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 22.0 | 53.7 | 68.3 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 10.8 | 44.6 | 43.2 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 2.0 | 59.2 | 55.1 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 45.5 | 38.6 | 88.6 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 5.5 | 46.9 | 62.3 |
| DKI Jakarta | | 336 | 10.7 | 45.8 | 65.8 |

4.7. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Di dalam melaksanakan fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, sesuai Kepmenkes No. 128/2004, seluruh Puskesmas di Indonesia diharapkan melaksanakan program Upaya Kesehatan Wajib. Sedangkan Upaya Kesehatan Pengembangan di setiap Puskesmas disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana masing-masing Puskesmas,. Untuk kelancaran pelaksanaan setiap upaya atau program ditunjuk penanggung jawabnya dan dibuatkan Surat Keputusannya oleh

pejabat yang berwenang menetapkan. Pada tabel 4.7.1.a. dan 4.7.1.b. terlihat tentang kesesuaian latar belakang pendidikan penanggung jawab program Upaya Kesehatan Wajib.

Tabel 4.7.1.a.
Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No. | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | % Kesesuaian PJ Program | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| | | | Promosi Kesehatan | Kesehatan Lingkungan | KIA/KB |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 33.3 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 10.3 | 21.8 | 96.2 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 6.8 | 11.4 | 98.9 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 9.8 | 24.4 | 100.0 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 6.8 | 12.2 | 98.6 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 14.3 | 26.5 | 93.9 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 52.3 | 84.1 | 95.5 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 3.1 | 7.5 | 97.9 |
| DKI Jakarta | | 336 | 9.5 | 17.6 | 97.6 |

Dalam Rifaskes 2011 latar belakang pendidikan diasumsikan sesuai untuk Penanggungjawab Program Promosi Kesehatan adalah dari DIII Promosi Kesehatan atau S1 Kesehatan Masyarakat. Persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 9,5 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu (0%). Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%) dan berikutnya Jakarta Utara (14,3%). Sedangkan persentase terendah ada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat (masing masing 6,8%), dan berikutnya Jakarta Pusat (9,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah 52,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 3,1%.

Dalam Rifaskes 2011, latar belakang pendidikan diasumsikan sesuai untuk Penanggungjawab Program Kesehatan Lingkungan adalah DIII Kesehatan Lingkungan atau Sanitarian atau S1 Kesehatan Masyarakat. Persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 17,6 persen. Persentase tertinggi adalah di Jakarta Utara (26,5%) dan Jakarta Pusat (24,4%). Sedangkan persentase terendah ada Kabupaten Kepulauan Seribu (0%), di Jakarta Timur(11,4%) dan Jakarta Barat (12,2%), Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai

penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah 84,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 7,5%.

Dalam Rifaskes 2011 latar belakang pendidikan diasumsikan sesuai untuk Penanggungjawab Program KIA/KB adalah DIII Kebidanan, DIII Keperawatan, atau Dokter. Persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di DKI Jakarta adalah sebesar 97,6 persen. Terdapat 2 Kabupaten/Kota dengan persentase 100,0 persen dalam hal penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai. Persentase terendah yang mempunyai penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kota Jakarta Utara (93,9%) dan Jakarta Selatan (96,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah 95,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 97,9%.

Tabel 4.7.1.b.
Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No. | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | % Kesesuaian PJ Program | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | Perbaikan Gizi Masyarakat | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit | Pengobatan |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 16.7 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 21.8 | 75.6 | 82.1 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 28.4 | 85.2 | 89.8 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 24.4 | 85.4 | 78.0 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 8.1 | 91.9 | 90.5 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 26.5 | 85.7 | 87.8 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 86.4 | 88.6 | 95.5 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 11.6 | 84.2 | 85.3 |
| DKI Jakarta | | 336 | 21.4 | 84.8 | 86.6 |

Dalam Rifaskes 2011 latar belakang pendidikan diasumsikan sesuai untuk Penanggungjawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah DIII Gizi, S1 Kesehatan Masyarakat, atau S1 Gizi. Persentase penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya sebesar 21,4 persen. Persentase tertinggi ada di Jakarta Timur (28,4%) dan Jakarta Utara (26,5%). Sedangkan persentase terendah ada di Jakarta Barat (8,1%), dan Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%), Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah 86,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 11,6%.

Dalam Rifaskes 2011 latar belakang pendidikan diasumsikan Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular adalah DIII Kebidanan, DIII Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, atau Dokter. Persentase Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai penanggungjawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 84,8 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), dan di Jakarta Barat (91,9%). Sedangkan persentase terendah ada di Jakarta Selatan (75,6%) dan Jakarta Timur (85,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai penanggungjawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah 88,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 84,2%.

Dalam Rifaskes 2011 latar belakang pendidikan diasumsikan sesuai untuk Penanggungjawab Program Pengobatan adalah DIII Kebidanan, DIII Keperawatan, atau Dokter. Di Provinsi DKI Jakarta, Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Pengobatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 86,6 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), dan di Jakarta Barat (91,9%). Sedangkan persentase terendah ada di Jakarta Pusat (78,0%) dan Jakarta Selatan (82,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai penanggung jawab Program Pengobatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah 95,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 85,3%.

4.8. PELAYANAN KESEHATAN

4.8.1. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

4.8.1.1. Kegiatan Program Promosi Kesehatan

Jenis Kegiatan dalam pelaksanaan Program Promosi Kesehatan yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi, Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pembinaan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pembinaan Forum Desa Siaga, dan Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Di Provinsi DKI Jakarta, dari keempat jenis kegiatan Program Promosi Kesehatan, kegiatan Penyuluhan PHBS merupakan presentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (94,9%) dan disusul oleh kegiatan Pembinaan UKBM (78,3%), Pembinaan Forum Desa Siaga (77,4%), dan Pembinaan di Poskesdes (33,0%), Sedangkan persentase Puskesmas melakukan keempat jenis kegiatan dalam Program Promosi Kesehatan secara lengkap sebesar 27,7 (Tabel 4.8.1.1.1).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Penyuluhan PHBS dalam lingkup provinsi adalah sebesar 94,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan penyuluhan PHBS terdapat di Kabupaten kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Pusat(masing-masing 100%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (95,5%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Utara (91,8%) dan Jakarta Barat (93,2%). Bila dibedakan menurut tingkat

Laporan Provinsi DKI Jakarta Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Puskesmas, semua Puskesmas Kecamatan sudah melakukan kegiatan Penyuluhan PHBS (100%) , sementara di Puskesmas Kelurahan 94,2%.

Tabel 4.8.1.1.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Promosi Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Juml Pusk | PHBS | Pembinaan Poskesdes | Pembinaan Forum Desa Siaga | UKBM | Kegiatan Lengkap Promosi Kesehatan |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 50.0 | 83.3 | 100.0 | 50.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 94.9 | 46.2 | 91.0 | 91.0 | 41.0 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 95.5 | 35.2 | 86.4 | 78.4 | 31.8 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 100.0 | 24.4 | 65.9 | 80.5 | 17.1 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 93.2 | 25.7 | 62.2 | 60.8 | 17.6 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 91.8 | 24.5 | 71.4 | 79.6 | 20.4 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 100.0 | 38.6 | 77.3 | 93.2 | 31.8 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 94.2 | 32.2 | 77.4 | 76.0 | 27.1 |
| DKI Jakarta | | 336 | 94.9 | 33.0 | 77.4 | 78.3 | 27.7 |

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan pembinaan di Poskesdes dalam lingkup provinsi adalah sebesar 33,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten kepulauan Seribu (50,0%) dan Kota Jakarta Selatan(46,2%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (35,2%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Utara (24,5%) dan Jakarta Barat (25,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan pembinaan di Poskesdes adalah 38,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 32,2%.

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 77,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga terdapat di Kota Jakarta Selatan(91,0%), dan Kota Jakarta Timur (86,4%) dan diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (83,3%) . Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Barat (62,2%) dan di Kota Jakarta Pusat (65,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga adalah 77,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 77,4%.

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 78,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi di Kabupaten kepulauan Seribu (100%) dan Kota Jakarta Selatan (91,0%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (80,5%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Barat (60,8%), dan Kota Jakarta Timur (78,4%). Bila dibedakan

menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Pembinaan UKBM adalah 93,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 76,0%.

Persentase Puskesmas yang melakukan secara lengkap keempat jenis kegiatan dalam Program Promosi Kesehatan dalam lingkup provinsi adalah sebesar 27,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan secara lengkap terdapat di Kabupaten kepulauan Seribu (50,0%) dan Kota Jakarta Selatan (41,0%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (31,8%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Pusat (17,1%) dan Jakarta Barat (17,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan secara lengkap keempat jenis kegiatan dalam Program Promosi Kesehatan adalah 31,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 27,1%.

4.8.1.2. Pelatihan Program Promosi Kesehatan

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Program Promosi Kesehatan yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pelatihan Desa Siaga dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2009 dan 2010. Di Provinsi DKI Jakarta, dari ketiga jenis pelatihan Program Promosi Kesehatan, Pelatihan Desa Siaga merupakan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas Puskesmas (39,3%) dan berikutnya adalah Pelatihan PHBS (36,6%), dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (29,8%). Sedangkan persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keempat pelatihan dalam Program Promosi Kesehatan sebesar 20,2 persen (Tabel 4.8.1.2.1).

Persentase petugas Puskesmas yang mengikuti Pelatihan PHBS dalam lingkup provinsi adalah sebesar 36,6 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan PHBS terdapat di Kabupaten kepulauan Seribu (66,6%) dan Kota Jakarta Pusat (46,3%), diikuti oleh Kota Jakarta Utara (42,9%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Selatan (28,2%) dan Jakarta Timur (33,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan PHBS adalah 65,9% , sementara di Puskesmas Kelurahan 32,2%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Desa Siaga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 39,3 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Desa Siaga terdapat di Kabupaten kepulauan Seribu (83,3%) dan Kota Jakarta Selatan (46,2%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (44,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Pusat (24,4%) dan Jakarta Barat (28,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan Desa Siaga adalah 61,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 36,0%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam lingkup provinsi adalah sebesar 29,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat terdapat di Kabupaten kepulauan Seribu (66,7%) dan Kota Jakarta Pusat (34,1%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (33,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Barat (23,0%). dan Kota Jakarta Selatan (26,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas,

persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan Pemberdayaan Masyarakat adalah 59,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 25,3%.

Tabel 4.8.1.2.1
Persentase Puskesmas Menurut Keikutsertaan Pada Pelatihan Program
Promosi Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pelatihan PHBS | Pelatihan Desa Siaga | Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat | Pelatihan Lengkap Promosi Kesehatan |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 66.7 | 83.3 | 66.7 | 33.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 28.2 | 46.2 | 26.9 | 19.2 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 33.0 | 44.3 | 33.0 | 25.0 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 46.3 | 24.4 | 34.1 | 17.1 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 37.8 | 28.4 | 23.0 | 16.2 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 42.9 | 42.9 | 30.6 | 20.4 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 65.9 | 61.4 | 59.1 | 50.0 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 32.2 | 36.0 | 25.3 | 15.8 |
| DKI Jakarta | | 336 | 36.6 | 39.3 | 29.8 | 20.2 |

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan lengkap ketiga jenis pelatihan Program Promosi Kesehatan dalam lingkup provinsi adalah sebesar 20,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti secara lengkap ketiga jenis pelatihan dalam Program Promosi Kesehatan adalah di Kabupaten kepulauan Seribu (33,3%) dan Kota Jakarta Timur (25,0%), diikuti oleh Kota Jakarta Utara (20,4%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Barat (16,2%) dan Jakarta Pusat (17,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti secara lengkap ketiga jenis pelatihan dalam Program Promosi Kesehatan adalah 50,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 15,8%.

4.8.1.3. Pedoman Program Promosi Kesehatan

Dalam Program Promosi Kesehatan, buku pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes, Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, Juknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga.

Di Provinsi DKI Jakarta pedoman Program Promosi Kesehatan terbanyak dimiliki oleh puskesmas adalah Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga (57,4%) kemudian berturut turut Juknis Penggerakan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Siaga (44,3%) dan Juknis Poskesdes (35,7%) . Sedangkan persentase Puskesmas memiliki ketiga jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 30,4 persen (Tabel 4.8.1.3.1).

Persentase Puskesmas yang memiliki petunjuk teknis pengembangan dan penyelenggaraan Poskesdes dalam lingkup provinsi adalah sebesar 35,7 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes ditemukan di Kota Jakarta Utara (44,9%), Jakarta Timur (39,8%), dan Jakarta Pusat (39,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kabupaten kepulauan Seribu (16,7%) dan Kota Jakarta Selatan (25,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes adalah 54,5%, sementara di Puskesmas Kelurahan 32,9%.

Tabel 4.8.1.3.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman
Program Promosi Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Juml Pusk | Juknis Poskesdes | Pengembangan Desa Siaga | Juknis Penggerakan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Siaga | Pedoman Lengkap Promosi Kesehatan |
|--------------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 16.7 | 100.0 | 100.0 | 16.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 25.6 | 51.3 | 33.3 | 20.5 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 39.8 | 63.6 | 48.9 | 34.1 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 39.0 | 61.0 | 51.2 | 34.1 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 35.1 | 48.6 | 37.8 | 27.0 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 44.9 | 61.2 | 51.0 | 42.9 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 54.5 | 79.5 | 68.2 | 45.5 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 32.9 | 54.1 | 40.8 | 28.1 |
| DKI Jakarta | | 336 | 35.7 | 57.4 | 44.3 | 30.4 |

Persentase Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 57,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%) dan Kota Jakarta Timur (63,6%), diikuti oleh Kota Jakarta Utara (61,2%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Barat (48,6%) dan Jakarta Selatan (51,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga adalah 79,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 54,1%.

Persentase Puskesmas yang memiliki Petunjuk Teknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 44,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas di Kabupaten kepulauan Seribu (100%) dan Kota Jakarta Pusat (51,2%), diikuti oleh Kota Jakarta Utara (51,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Selatan (33,3%) dan Jakarta Barat (37,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Petunjuk Teknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga adalah 68,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 40,8%.

Persentase Puskesmas yang memiliki pedoman Program Promosi Kesehatan secara lengkap (yaitu memiliki ketiga jenis pedoman dan juknis yang disebutkan di atas) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 30,4 persen. Persentase tertinggi di Kota Jakarta Utara (42,9%) Kota Jakarta Timur dan Jakarta Pusat (masing masing 34,1%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kabupaten kepulauan Seribu (16,7%) dan diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (20,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki pedoman Program Promosi Kesehatan secara lengkap adalah 45,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 28,1%.

4.8.1.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis dapat berupa kunjungan supervisi atau bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi (monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Di Provinsi DKI Jakarta bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam Program Promosi Kesehatan yang paling banyak diterima Puskesmas adalah Pertemuan Monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (66,4%), Supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas (64,9%) dan dan kemudian Umpan Balik (50,9%). Sedangkan persentase Puskesmas menerima lengkap ketiga bentuk evaluasi dan bimbingan (kunjungan supervisi, umpan balik tertulis dan pertemuan monev) adalah sebesar 42,3 persen. (Tabel 4.8.1.4.1.).

Tabel 4.8.1.4.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Supervisi Dinkes | Umpan Balik | Pertemuan Monev | Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------------|-------------|-----------------|--|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 79.5 | 52.6 | 76.9 | 43.6 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 53.4 | 52.3 | 59.1 | 39.8 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 75.6 | 63.4 | 70.7 | 53.7 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 52.7 | 45.9 | 60.8 | 39.2 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 67.3 | 36.7 | 63.3 | 32.7 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 84.1 | 63.6 | 79.5 | 59.1 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 62.0 | 49.0 | 64.4 | 39.7 |
| DKI Jakarta | | 336 | 64.9 | 50.9 | 66.4 | 42.3 |

Di Provinsi DKI Jakarta, dari 336 Puskesmas sebesar 64,9 persen Puskesmas menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Promosi Kesehatan. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%) dan Kota Jakarta Selatan (79,5%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (75,6%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Barat (52,7) dan Jakarta Timur (53,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Kunjungan Supervisi adalah 84,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 62,0%.

Di Provinsi DKI Jakarta, dari 336 Puskesmas sebesar 50,9 persen Puskesmas menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk Program Promosi Kesehatan. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kabupaten kepulauan Seribu (100%) dan Kota Jakarta Pusat (63,4%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (52,6%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Utara (36,7%) dan Jakarta Barat (45,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima umpan balik Program Promosi Kesehatan adalah 63,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 49,0%.

Di Provinsi DKI Jakarta, dari 336 Puskesmas sebesar 66,4 persen Puskesmas mengikuti Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi Program Promosi Kesehatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kabupaten kepulauan Seribu (100%) dan Kota Jakarta Selatan (76,9%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (70,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Timur (59,1%) dan Jakarta Barat (60,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi Program Promosi Kesehatan adalah 79,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 64,4%.

Di Provinsi DKI Jakarta, dari 336 Puskesmas, sebesar 42,3 persen Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap (ketiga jenis) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Promosi Kesehatan. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kabupaten kepulauan Seribu (100%) dan Kota Jakarta Pusat (53,7%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (43,6%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Utara (32,7%) dan Jakarta Barat (39,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap (ketiga jenis) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Promosi Kesehatan adalah 59,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 39,7%.

4.8.2. PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN

4.8.2.1. Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan

Jenis Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah, Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelola Makanan/Minuman (TPM), Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga, Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dan Pemberantasan Sarang Nyamuk atau Pemeriksaan Jentik Nyamuk dan

Pelayanan Klinik Sanitasi.. Di Provinsi DKI Jakarta, dari ketujuh jenis kegiatan Program Kesehatan Lingkungan, kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jentik Nyamuk (87,5%) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh puskesmas, diikuti oleh Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah (74,7%) dan disusul oleh kegiatan TTU (72,6%), Pemeriksaan Sanitasi TPM (65,2%), Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga (60,7%), dan Kunjungan/Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah (27,4%), Pelayanan Klinik Sanitasi (20,2%),. Sedangkan persentase Puskesmas melakukan lengkap ketujuh kegiatan Program Kesehatan Lingkungan sebesar 14,8 persen (Tabel 4.8.2.1.1.a dan 4.8.2.1.1.b).

Tabel 4.8.2.1.1.a.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Juml Pusk | Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah | Pemeriksaan Sanitasi TTU | Pemeriksaan Sanitasi TTM | Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga |
|---------------------------------|----------------------|------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 85.9 | 91.0 | 87.2 | 80.8 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 73.9 | 77.3 | 69.3 | 70.5 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 65.9 | 51.2 | 51.2 | 41.5 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 54.1 | 59.5 | 45.9 | 43.2 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 69.4 | 69.4 | 59.2 | 49.0 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 93.2 | 95.5 | 88.6 | 77.3 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 67.8 | 69.2 | 61.6 | 58.2 |
| DKI Jakarta | | 336 | 100.0 | 72.6 | 65.2 | 60.7 |

Di Provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas melakukan kegiatan Kunjungan/ Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah adalah sebesar 74,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten kepulauan Seribu (100%) dan Kota Jakarta Selatan (85,9%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (73,9%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Barat (54,1%) dan Jakarta Utara (69,4%).). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Kunjungan/ Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah adalah 93,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 67,8%.

Di Provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TTU adalah sebesar 72,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kabupaten kepulauan Seribu (100%) dan Kota Jakarta Selatan (91,0%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (77,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Pusat (51,2%) dan Jakarta Barat (59,5%).). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TTU adalah 95,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 69,2%.

Di Provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPM adalah sebesar 65,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kabupaten kepulauan Seribu (100%) dan Kota Jakarta Selatan (87,2%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (69,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Barat (45,9%) dan Jakarta Pusat (51,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPM adalah 88,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 61,6%.

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 60,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kabupaten kepulauan Seribu (100%) dan Kota Jakarta Selatan (80,8%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (70,5%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Pusat (41,5%) dan Jakarta Barat (43,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga adalah 77,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 58,2%.

Tabel 4.8.2.1.1.b. menunjukkan Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah dalam lingkup provinsi adalah sebesar 27,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kabupaten kepulauan Seribu (100%) dan Kota Jakarta Selatan (34,6%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (28,4%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Utara (18,4%) dan Jakarta Barat (20,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah adalah 38,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 25,7%.

Tabel 4.8.2.1.1.b.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program
Kesehatan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Juml Pusk | Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah | Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jentik | Pelayanan Klinik Sanitasi | Kegiatan Lengkap Program Kesling |
|--------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 34.6 | 97.4 | 20.5 | 11.5 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 28.4 | 90.9 | 27.3 | 13.6 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 24.4 | 82.9 | 17.1 | 7.3 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 20.3 | 75.7 | 18.9 | 8.1 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 18.4 | 85.7 | 8.2 | 4.1 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 38.6 | 100.0 | 31.8 | 20.5 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 25.7 | 85.6 | 18.5 | 8.9 |
| DKI Jakarta | | 336 | 27.4 | 87.5 | 20.2 | 10.4 |

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jenis Nyamuk dalam lingkup provinsi adalah sebesar 87,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten kepulauan Seribu (100%) dan Kota Jakarta Selatan(97,4%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (90,9%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta barat (75.7%) dan Jakarta pusat (85,7%)%. Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, terlihat semua Puskesmas Kecamatan sudah melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jenis Nyamuk (100%) , sementara di Puskesmas Kelurahan 85,6%.

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pelayanan Klinik Sanitasi dalam Program Kesehatan Lingkungan dalam lingkup provinsi adalah sebesar 20,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten kepulauan Seribu (50,0) dan Kota Jakarta Timur (27,3%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (20,5%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Utara (8,2%) dan Jakarta Pusat (17,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Pelayanan Klinik Sanitasi adalah 31,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 18,5%.

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan lengkap (melaksanakan ketujuh kegiatan tersebut di atas) dalam Program Kesehatan Lingkungan dalam lingkup provinsi adalah sebesar 10,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten kepulauan Seribu (50,0) dan Kota Jakarta Timur (13,6%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (11,5%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Utara (4,1%) dan Jakarta Pusat (7,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan lengkap Program Kesehatan Lingkungan adalah 20,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 8,9%.

4.8.2.2. Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan

Pelatihan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi Pelatihan Air Minum/Bersih, Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman, Pelatihan Pengelolaan Sampah, dan Pelatihan Pengelolaan Air Limbah yang diikuti petugas Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. .

Tabel 4.8.2.2.1. menunjukkan bahwa dari keempat jenis pelatihan Program Kesehatan Lingkungan, persentase tertinggi yang diikuti Puskesmas adalah Pelatihan Air Minum/Bersih (19,9%), Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman (15,2%), Pelatihan Pengelolaan Sampah (11,6%), dan Pelatihan Pengelolaan Air Limbah (13,4%). Sedangkan Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keempat jenis pelati han di atas adalah sebesar 8,0 persen.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Bersih/ Minum dalam lingkup provinsi adalah sebesar 19,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten kepulauan Seribu (33,3%) dan Kota Jakarta Pusat (31,7%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (20,5%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Timur 13,6%) dan Jakarta Barat (18,9%).%. Bila dibedakan menurut tingkat

Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Bersih/ Minum adalah 54,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 12,7%.

Tabel 4.8.2.2.1.
Persentase Puskesmas Menurut Keikutsertaan Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pelatihan Air Minum/Air Bersih | Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman | Pelatihan Pengelolaan Sampah | Pelatihan Pengelolaan Air Limbah | Pelatihan Lengkap |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 33.3 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 20.5 | 10.3 | 7.7 | 10.3 | 5.1 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 13.6 | 8.0 | 5.7 | 8.0 | 2.3 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 31.7 | 29.3 | 31.7 | 29.3 | 22.0 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 18.9 | 13.5 | 12.2 | 14.9 | 9.5 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 20.4 | 18.4 | 12.2 | 12.2 | 10.2 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 54.5 | 54.5 | 27.3 | 45.5 | 27.3 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 12.7 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 5.1 |
| DKI Jakarta | | 336 | 19.9 | 15.2 | 11.6 | 13.4 | 8.0 |

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman dalam lingkup provinsi adalah sebesar 34,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten kepulauan Seribu (33,3%) dan Kota Jakarta Pusat (31,7%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (20,5%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Timur 13,6%) dan Jakarta Barat (18,9%).). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman adalah 54,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 9,2%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah dalam lingkup provinsi adalah sebesar 11,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Pusat (31,7%), diikuti oleh Jakarta Barat dan Jakarta Utara (masing masing 12,2%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%) dan Kota Jakarta Timur (5,7%)%. Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah adalah 27,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 9,2%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Limbah dalam lingkup provinsi adalah sebesar 13,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Pusat (29,3%), Kabupaten kepulauan Seribu (16,7%) dan diikuti oleh Kota Jakarta Barat (14,9%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Timur (8,0%) dan Jakarta selatan (10,3%).). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Limbah adalah 45,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 8,6%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keempat jenis pelatihan dalam Program Kesehatan Lingkungan dalam lingkup provinsi adalah sebesar 8,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Pusat (22,0%), diikuti oleh Kota Jakarta Utara (10,2). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kabupaten kepulauan Seribu (0,0%) Kota Jakarta Selatan (5,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti secara lengkap keempat jenis pelatihan dalam Program Kesehatan Lingkungan adalah 27,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 5,1%.

4.8.2.3. Pedoman Program Kesehatan Lingkungan

Jenis pedoman Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi, Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah, Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, dan Permenkes Tentang Persyaratan Kualitas Air. Pedoman Program Kesehatan Lingkungan terbanyak dimiliki oleh Puskesmas di provinsi DKI Jakarta adalah Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan (35,1%) diikuti oleh Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah (34,5%) dan Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air (31,5%) . (Tabel 4.8.2.3.1).

Persentase Puskesmas yang memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah adalah sebesar 34,5 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%) diikuti oleh di Kota Jakarta Pusat (46,3%), Kota Jakarta Utara (40,8). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Timur (28,4%) dan Jakarta Barat (31,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah adalah 56,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 31,2%.

Tabel 4.8.2.3.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman
Program Kesehatan Lingkungan, di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pedoman Penyelenggaraan Kesling di Sekolah | Pedoman Penyelenggaraan Kesling | Permenkes Tentang Kualitas Air |
|---------------------------------|----------------------|------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 66.7 | 66.7 | 50.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 32.1 | 29.5 | 33.3 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 28.4 | 34.1 | 23.9 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 46.3 | 53.7 | 43.9 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 31.1 | 29.7 | 28.4 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 40.8 | 34.7 | 34.7 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 56.8 | 70.5 | 81.8 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 31.2 | 29.8 | 24.0 |
| DKI Jakarta | | 336 | 34.5 | 35.1 | 31.5 |

Persentase Puskesmas yang memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan adalah sebesar 35,1 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%) diikuti oleh di Kota Jakarta Pusat (53,7%), Kota Jakarta Utara (34,7). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Selatan (29,5%) dan Jakarta Barat (29,7%).). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan adalah 70,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 29,8%.

Persentase Puskesmas yang memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air adalah sebesar 31,5 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0) diikuti oleh di Kota Jakarta Pusat (43,9%), Kota Jakarta Utara (34,7). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Timur (23,9%) dan Jakarta Barat (28,4%).). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air adalah 81,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 24,0%.

4.8.2.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Program Kesehatan Lingkungan untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dapat berupa Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Umpan Balik dalam bentuk tertulis, dan Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Program Kesehatan Lingkungan adalah dalam bentuk Pertemuan Monev (47,6%) diikuti oleh Supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (43,8%) dan Umpan Balik (36,0%). Sedangkan persentase Puskesmas yang menerima secara lengkap ketiga bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Kesehatan Lingkungan adalah sebesar 29,5 persen (Tabel 4.8.2.4.1.).

Persentase Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk Kunjungan Supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah sebesar 43,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%) diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (58,5%), Kota Jakarta Selatan (48,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Timur (29,5%) dan Jakarta Utara (38,8%).). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Kunjungan Supervisi Program Kesehatan Lingkungan adalah 79,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 38,4%.

Persentase Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk Umpan Balik adalah sebesar 36,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%) diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (46,3%), Kota Jakarta Selatan (39,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Utara (24,5%) dan Jakarta Timur (28,4%).). Bila dibedakan menurut

tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Umpan Balik Program Kesehatan Lingkungan adalah 56,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 32,9%.

Tabel 4.8.2.4.1.

Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | % Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesling | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|---|-------------|-----------------|--|
| | | | Supervisi Dinkes | Umpan Balik | Pertemuan Monev | Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 48.7 | 39.7 | 62.8 | 35.9 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 29.5 | 28.4 | 29.5 | 19.3 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 58.5 | 46.3 | 53.7 | 36.6 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 45.9 | 37.8 | 43.2 | 32.4 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 38.8 | 24.5 | 51.0 | 18.4 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 79.5 | 56.8 | 86.4 | 56.8 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 38.4 | 32.9 | 41.8 | 25.3 |
| DKI Jakarta | | 336 | 43.8 | 36.0 | 47.6 | 29.5 |

Persentase Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk Pertemuan Monitoring dan Evaluasi adalah sebesar 47,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%) diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (62,8%), Kota Jakarta Pusat (53,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kota Jakarta Timur (29,5%) dan Jakarta Barat (43,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Lingkungan adalah 86,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 41,8%.

Persentase Puskesmas yang menerima ketiga bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap adalah sebesar 29,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%) diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (36,6%), Kota Jakarta Selatan (35,9%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Utara (18,4%) dan Kota Jakarta Timur (19,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap Program Kesehatan Lingkungan adalah 56,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 32,9%.

4.8.3. PROGRAM KESEHATAN IBU

4.8.3.1. Kegiatan Program Kesehatan Ibu

Kegiatan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Ibu yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas, Kelas Ibu (Hamil dan Nifas), dan Pelayanan Antenatal Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas pada tahun 2010. Dari keempat jenis kegiatan kesehatan ibu, kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (81,0%), dan diikuti oleh Pelayanan Antenatal Terintegrasi (74,3%), dan Kelas Ibu Hamil dan Nifas (38,1%), Kemitraan Bidan dan Dukun (28,3%). Sedangkan persentase Puskesmas yang melakukan keempat jenis kegiatan Program Kesehatan Ibu secara lengkap adalah sebesar 12,8 persen (Tabel 4.8.3.1.1.).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) adalah sebesar 81,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%) diikuti oleh Kota Jakarta Utara (85,7%), Kota Jakarta Barat (83,8%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Pusat (70,7%) dan Kota Jakarta Selatan (76,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan program P4K adalah 97,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 78,4%.

Tabel 4.8.3.1.1
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Ibu di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | P4K | Kemitraan Dukun dan Bidan di Puskesmas | Kelas Ibu (Hamil dan Nifas) | Pelayanan Antenatal Terintegrasi | Kegiatan Lengkap Kesehatan Ibu |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 83.3 | 33.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 76.9 | 32.1 | 25.6 | 85.9 | 11.5 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 83.0 | 39.8 | 67.0 | 69.3 | 21.6 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 70.7 | 4.9 | 24.4 | 56.1 | 2.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 83.8 | 27.0 | 29.7 | 74.3 | 12.2 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 85.7 | 18.4 | 30.6 | 77.6 | 6.1 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 97.7 | 38.6 | 61.4 | 79.5 | 27.3 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 78.4 | 26.7 | 34.6 | 73.3 | 10.6 |
| DKI Jakarta | | 336 | 81.0 | 28.3 | 38.1 | 74.1 | 12.8 |

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas adalah sebesar 28,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%) diikuti oleh Kota Jakarta Timur (39,8%), Kota Jakarta Selatan (32,1%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Pusat (4,9%) dan Kota

Jakarta Utara (18,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas adalah 38,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 26,7%.

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Nifas adalah sebesar 38,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Timur (67,0%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%), Kota Jakarta Barat (29,75%) . Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Pusat (24,4%) dan Jakarta Selatan (25,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Nifas adalah 61,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 34,6%.

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pelayanan Antenatal Terintegrasi di Puskesmas adalah sebesar 74,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Selatan (85,9%).Kabupaten diikuti oleh Kepulauan Seribu (83,3%), Kota Jakarta Utara (77,6%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Pusat (56,1%) dan diikuti oleh Jakarta Barat (74,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Pelayanan Antenatal Terintegrasi di Puskesmas adalah 79,5%, sementara di Puskesmas Kelurahan 73,3%.

Persentase Puskesmas yang melakukan keempat jenis kegiatan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu adalah 12,8 persen. Persentase puskesmas tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%), Kota Jakarta Timur (21,6%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (12,2%) . Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Pusat (2,4%) dan Jakarta Selatan (11,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu adalah 27,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 10,6%.

4.8.3.2. Pelatihan Program Kesehatan Ibu

Pelatihan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Ibu yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelatihan Pemantauan Wilayah Setempat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) yang diikuti tenaga Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Dari ketiga jenis pelatihan Program Kesehatan Ibu, pelatihan PWS KIA merupakan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas Puskesmas (43,8%), kemudian pelatihan APN (34,2%), dan pelatihan PONED (12,5%). Sedangkan persentase Puskesmas yang secara lengkap mengikuti ketiga jenis pelatihan dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 7,7 persen (Tabel 4.8.3.2.1.).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan APN adalah 34,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), diikuti oleh Kota Jakarta Utara (46,9%) dan Jakarta Barat (43,2%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Selatan (16,7%) dan Jakarta Pusat (29,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan APN adalah 75,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 28,1%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan PONED adalah sebesar 12,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (20,5%) dan Jakarta Barat (14,9%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Pusat (2,4%) dan Jakarta Selatan (5,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan PONED adalah 29,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 9,9%.

Tabel 4.8.3.2.1.

Persentase Puskesmas Menurut Keikutsertaan Pelatihan Program Kesehatan Ibu pada Tahun 2009-2010, di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pelatihan APN | Pelatihan PONED | Pelatihan PWS-KIA | Pelatihan Lengkap Kesehatan Ibu |
|---------------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 66.7 | 33.3 | 100.0 | 16.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 16.7 | 5.1 | 26.9 | 2.6 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 35.2 | 20.5 | 54.5 | 12.5 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 29.3 | 2.4 | 36.6 | 2.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 43.2 | 14.9 | 48.6 | 9.5 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 46.9 | 12.2 | 42.9 | 8.2 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 75.0 | 29.5 | 59.1 | 22.7 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 28.1 | 9.9 | 41.4 | 5.5 |
| DKI Jakarta | | 336 | 34.2 | 12.5 | 43.8 | 7.7 |

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan PWS KIA adalah sebesar 43,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (54,5%) dan Jakarta Barat (48,6%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Selatan (26,9%) dan Jakarta Pusat (36,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan PWS KIA adalah 59,1%, sementara di Puskesmas Kelurahan 41,4%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan lengkap dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 7,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (12,5%) dan Jakarta Barat (9,5%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Pusat (2,4%) dan Jakarta Selatan (2,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan lengkap Program Kesehatan Ibu adalah 22,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 5,5%.

4.8.3.4. Pedoman Program Kesehatan Ibu

Jenis Program Kesehatan Ibu, yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 ini meliputi, Acuan Asuhan Persalinan Normal (APN), Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Buku Pedoman

Laporan Provinsi DKI Jakarta Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, Pedoman Kelas Ibu, Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA), Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria Pada Ibu Hamil dan Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi, yang dimiliki oleh puskesmas.

Di Provinsi DKI Jakarta pedoman Program kesehatan Ibu yang terbanyak dimiliki adalah Buku KIA (90,9,2%) kemudian berturut turut Pedoman PWS-KIA (74,7%), Buku Pedoman P4K (53,6%), Pedoman APN (49,4%), Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal (45,5%), %, Pedoman Kelas Ibu (44,6%) Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi (39,9, dan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria Pada Ibu Hamil (30,7%). Sedangkan presentase Puskesmas yang memiliki keseluruhan jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 17,3 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki pedoman APN adalah sebesar 49,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (63,4%) dan Jakarta Barat (59,5%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Selatan (30,8%) dan Jakarta Utara (46,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki pedoman APN adalah 88,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 43,5%.

Tabel 4.8.3.4.1.a.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Kesehatan Ibu di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pedoman APN | Pedoman Buku KIA | Pedoman P4K | Pedoman Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal | Pedoman Kelas Ibu |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------|------------------|-------------|---|-------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 66.7 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 30.8 | 69.2 | 35.9 | 33.3 | 28.2 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 51.1 | 89.8 | 56.8 | 44.3 | 63.6 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 63.4 | 90.2 | 51.2 | 56.1 | 34.1 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 59.5 | 85.1 | 64.9 | 54.1 | 45.9 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 46.9 | 83.7 | 55.1 | 42.9 | 36.7 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 88.6 | 95.5 | 77.3 | 72.7 | 75.0 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 43.5 | 81.5 | 50.0 | 41.4 | 40.1 |
| DKI Jakarta | | 336 | 49.4 | 83.3 | 53.6 | 45.5 | 44.6 |

Persentase Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku KIA adalah sebesar 83,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Kota Jakarta pusat (90,2%) dan Jakarta Barat (85,1%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Selatan (69,2%) dan Jakarta Utara (83,7%). Bila

dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku KIA adalah 95,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 81,5%.

Persentase Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki pedoman P4K adalah sebesar 53,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (64,9%) dan Jakarta Timur (56,8%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Selatan (35,9%) dan Jakarta Utara (42,9). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki pedoman P4K adalah 77,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 50,0%.

Persentase Puskesmas yang memiliki buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal adalah sebesar 45,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (56,1%) dan Jakarta Barat (54,1%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Selatan (33,3%) dan Jakarta Utara (42,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal adalah 72,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 74,4%.

Persentase Puskesmas yang memiliki pedoman Kelas Ibu adalah sebesar 44,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (63,6%) dan Jakarta Barat (45,9). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Selatan (28,2%) dan Jakarta pusat (34,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki pedoman Kelas Ibu adalah 75,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 40,1%.

Tabel 4.8.3.4.1.b. menunjukkan persentase Puskesmas yang memiliki pedoman PWS - KIA adalah sebesar 74,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Kota Jakarta Utara (87,8%) dan Jakarta Pusat (80,5%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Selatan (67,9%) dan Jakarta Timur dan Jakarta Barat (masing masing 71,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki pedoman PWS - KIA adalah 88,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 72,6%.

Persentase Puskesmas yang memiliki pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil adalah sebesar 30,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Pusat (43,9%), dan Jakarta Barat (39,2%), Jakarta Utara(34,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Selatan (17,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil adalah 38,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 29,5%.

Persentase Puskesmas yang memiliki Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi adalah sebesar 39,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Barat (56,8%) , Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (37,5). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Selatan (25,6%) dan Jakarta Utara (36,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi adalah 68,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 35,6%.

Persentase Puskesmas yang memiliki secara lengkap seluruh pedoman tersebut di atas adalah sebesar 17,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Barat (27,0%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (24,4%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%), dan Jakarta Timur (11,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki secara lengkap seluruh pedoman tersebut di atas adalah 27,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 15,8%.

Tabel 4.8.3.4.1.b.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Kesehatan Ibu di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pedoman PWS-KIA | Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria Pada Ibu Hamil | Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kespro | Pedoman Lengkap Kesehatan Ibu |
|--------------------------|----------------------|------------|-----------------|--|--|-------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 67.9 | 17.9 | 25.6 | 11.5 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 71.6 | 26.1 | 37.5 | 11.4 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 80.5 | 43.9 | 43.9 | 24.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 71.6 | 39.2 | 56.8 | 27.0 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 87.8 | 34.7 | 36.7 | 18.4 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 88.6 | 38.6 | 68.2 | 27.3 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 72.6 | 29.5 | 35.6 | 15.8 |
| DKI Jakarta | | 336 | 74.7 | 30.7 | 39.9 | 17.3 |

4.8.3.5. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Program Kesehatan Ibu untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Kesehatan Ibu. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dapat berupa Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, penerimaan Umpan Balik dalam bentuk tertulis, Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi(Monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Audit Maternal Perinatal (AMP).

Tabel 4.8.3.5.1. menunjukkan bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Program Kesehatan Ibu adalah dalam bentuk Pertemuan Monev yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (71,1%) diikuti oleh Kunjungan Supervisi dan monitoring oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (65,8%), Umpan Balik (50,6%), dan Audit Maternal dan Perinatal (32,1%).

Persentase Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk Kunjungan Supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 65,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100,0%), di Jakarta Utara (71,4%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (68,9%).

Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Timur (61,4%) dan Jakarta Selatan (61,5%). Bila dibandingkan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Kunjungan Supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah 93,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 61,6%.

Tabel 4.8.3.5.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Supervisi Dinkes | Umpan Balik | Pertemuan Monev | Audit Maternal Perinatal |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 61.5 | 52.6 | 69.2 | 46.2 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 61.4 | 48.9 | 72.7 | 35.2 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 65.9 | 43.9 | 70.7 | 36.6 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 68.9 | 51.4 | 70.3 | 17.6 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 71.4 | 49.0 | 69.4 | 16.3 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 93.2 | 79.5 | 93.2 | 65.9 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 61.6 | 46.2 | 67.8 | 27.1 |
| DKI Jakarta | | 336 | 65.8 | 50.6 | 71.1 | 32.1 |

Persentase Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk Umpan Balik untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 50,6 persen. . Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100,0%), di Jakarta Selatan (52,6%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (51,4%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Pusat (43,9%) dan Jakarta Timur (48,9%). Bila dibandingkan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Umpan Balik Program Kesehatan Ibu adalah 79,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 46,2%.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk Pertemuan Monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 71,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100,0%), di Jakarta Timur (72,7%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (70,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Selatan (69,2%), dan Jakarta Utara (69,4%). Bila dibandingkan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pertemuan Monev Program Kesehatan Ibu adalah 93,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 67,8%.

Persentase Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk Audit Maternal dan Perinatal untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 32,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (83,3%), di Jakarta Selatan (46,2%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (36,6%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Utara 16,3%), dan Jakarta Barat (17,6%). Bila dibandingkan

menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Audit Maternal dan Perinatal adalah 65,9% , sementara di Puskesmas Kelurahan 27,1%.

4.8.4. PROGRAM KESEHATAN BAYI DAN ANAK

4.8.4.1. Kegiatan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Jenis Kegiatan dalam pelaksanaan Pelayanan kesehatan bayi dan Anak yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi Manajemen Asfiksia, Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Kelas Ibu Balita, Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), dan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat.

Dalam lingkup provinsi, dari keseluruhan jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di atas, kegiatan MTBS merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (69,3%) dan disusul oleh Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat (62,2%), SDIDTK (51,2%), MTBM (37,5%), PKPR (34,2%), Kelas Ibu Balita (21,1%) dan KTA (17,9%) Manajemen Asfiksia (17,6%). Sedangkan persentase puskesmas melakukan keseluruhan kegiatan secara lengkap Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak sebesar 3,0 persen (Tabel 4.8.4.1.1 a, b,c).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Manajemen Asfiksia dalam lingkup provinsi adalah sebesar 17,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (83,3%), di Jakarta Utara (24,5%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (20,5%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Barat (10,8%), dan Jakarta Selatan (12,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Manajemen Asfiksia adalah 63,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 10,6%.

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan MTBM dalam lingkup provinsi adalah sebesar 37,5persen. . Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100,0%), di Jakarta Pusat (43,9%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (41,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Utara (30,6%), dan Jakarta Timur (33,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan MTBM adalah 86,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 30,1%.

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan MTBS dalam lingkup provinsi adalah sebesar 69,3 persen. . Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100,0%), di Jakarta Pusat (43,9%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (41,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Utara (30,6%), dan Jakarta Timur (33,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan MTBS adalah 97,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 65,1%.

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Kelas Ibu Balita dalam lingkup provinsi adalah sebesar 21,1 persen. . Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), diikuti oleh Jakarta Timur(28,4%), Jakarta Barat (24,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Utara (8,2%), dan Jakarta Selatan (16,7%).

Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Kelas Ibu Balita adalah 31,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 19,5%.

Tabel 4.8.4.1.1.a
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Bayi dan Anak di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Manajemen Asfiksia | MTBM | MTBS | Kelas Ibu Balita | SDIDTK |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 66.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 12.8 | 41.0 | 70.5 | 16.7 | 66.7 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 20.5 | 33.0 | 65.9 | 28.4 | 51.1 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 14.6 | 43.9 | 78.0 | 19.5 | 34.1 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 10.8 | 35.1 | 67.6 | 24.3 | 37.8 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 24.5 | 30.6 | 65.3 | 8.2 | 59.2 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 63.6 | 86.4 | 97.7 | 31.8 | 59.1 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 10.6 | 30.1 | 65.1 | 19.5 | 50.0 |
| DKI Jakarta | | 336 | 17.6 | 37.5 | 69.3 | 21.1 | 51.2 |

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 51,2 persen. . Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Selatan (masing masing 100,0%), diikuti oleh Jakarta Utara (59,2%),). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Pusat (34,1%) dan Jakarta Barat (37,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan SDIDTK adalah 59,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 50,0%.

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 17,9 persen. . Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), di Jakarta Selatan (20,5%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (20,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Timur (11,4%), dan Jakarta Utara (16,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan KTA adalah 68,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 10,3%.

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 34,2 persen. . Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), di Jakarta Selatan (46,2%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (37,8%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Timur (22,7%), dan Jakarta Pusat (24,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan PKPR adalah 79,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 27,4%.

Tabel 4.8.4.1.1.b.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Bayi dan Anak di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak | Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja | Penanganan Kasus Diare Pada Balita | Kegiatan Lengkap Bayi dan Anak |
|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 50.0 | 66.7 | 83.3 | 33.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 20.5 | 46.2 | 62.8 | 0.0 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 11.4 | 22.7 | 52.3 | 5.7 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 19.5 | 24.4 | 51.2 | 0.0 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 20.3 | 37.8 | 73.0 | 4.1 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 16.3 | 34.7 | 69.4 | 0.0 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 68.2 | 79.5 | 86.4 | 15.9 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 10.3 | 27.4 | 58.6 | 1.0 |
| DKI Jakarta | | 336 | 17.9 | 34.2 | 62.2 | 3.0 |

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat dalam lingkup provinsi adalah sebesar 62,2 persen. . Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (83,3%), di Jakarta Barat (73,0%), diikuti oleh Kota Jakarta Utara (69,4%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Jakarta Pusat (51,2%), dan Jakarta Timur (52,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat adalah 86,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 58,6%.

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan lengkap terkait dengan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dalam lingkup provinsi adalah sebesar 3,0 persen. . Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%), di Jakarta Timur (5,7%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (4,1%). Sedangkan di 3 Kota lainnya tidak ada Puskesmas yang melakukan lengkap semua kegiatan tersebut diatas. Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan lengkap Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah 15,9% , sementara di Puskesmas Kelurahan 1,0%.

4.8.4.2. Pelatihan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan Manajemen Asfiksia, Pelatihan Kelas Ibu Balita, Pelatihan Pelayanan KTA, Pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), dan Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) yang diikuti petugas puskesmas pada tahun 2009 dan 2010.

Dari keseluruhan pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak yang tersebut di atas, pelatihan MTBS merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (36,0%), dan disusul oleh Pelatihan SDIDTK (23,2%), Pelatihan manajemen Asfiksia (20,2%), pelatihan Pelayanan KTA (14,0%) dan Pelatihan Kelas Ibu Balita (13,4%),). Dalam lingkup provinsi, sebesar 2,1 persen Puskesmas yang petugasnya mengikuti keseluruhan pelatihan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak (Tabel 4.8.4.2.1).

Tabel 4.8.4.2.1
Persentase Puskesmas Menurut Keikutsertaan Pelatihan Program Bayi dan Anak Tahun 2009-2010 di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pelatihan Manajemen Asfiksia | Pelatihan Kelas Ibu Balita | Pelatihan KTA | Pelatihan SDIDTK | Pelatihan MTBS | Pelatihan Lengkap Kesehatan Bayi dan Anak |
|--------------------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------|---|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 33.3 | 16.7 | 100.0 | 100.0 | 16.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 12.8 | 9.0 | 11.5 | 17.9 | 24.4 | 1.3 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 21.6 | 20.5 | 15.9 | 29.5 | 31.8 | 2.3 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 24.4 | 4.9 | 12.2 | 26.8 | 29.3 | 2.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 13.5 | 13.5 | 14.9 | 18.9 | 50.0 | 1.4 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 26.5 | 12.2 | 14.3 | 16.3 | 38.8 | 2.0 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 65.9 | 25.0 | 56.8 | 68.2 | 86.4 | 11.4 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 13.4 | 11.6 | 7.5 | 16.8 | 28.4 | 0.7 |
| DKI Jakarta | | 336 | 20.2 | 13.4 | 14.0 | 23.5 | 36.0 | 2.1 |

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Manajemen Asfiksia adalah sebesar 20,2,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), di Jakarta Utara (26,5%), diikuti oleh Kota Jakarta pusat (24,4%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (12,8%) dan Jakarta Barat (13,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan Manajemen Asfiksia adalah 65,9% , sementara di Puskesmas Kelurahan 13,4%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Kelas Ibu Balita adalah sebesar 13,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%), di Jakarta Timur (20,5%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (13,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Pusat (4,9%) dan Jakarta Selatan (9,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan Kelas Ibu Balita adalah 25,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 11,6%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan KTA dalam lingkup provinsi adalah sebesar 14,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%), di Jakarta Timur (15,9%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (14,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (11,5%) dan Jakarta pusat

(12,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan KTA adalah 56,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 7,5%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) adalah sebesar 23,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), di Jakarta Timur (29,5%), diikuti oleh Kota Jakarta pusat (26,8%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (16,3%) dan Jakarta Selatan (17,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan SDIDTK adalah 68,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 16,8%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 336,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), di Jakarta Barat (50,0%), diikuti oleh Kota Jakarta Utara (38,8%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (24,4%) dan Jakarta Pusat (29,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan MTBS adalah 86,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 28,4%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keseluruhan jenis pelatihan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak pada lingkup provinsi adalah sebesar 2,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%), di Jakarta Pusat (2,4%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (2,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (1,3%) dan Jakarta Barat (1,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti secara lengkap keseluruhan jenis pelatihan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah 11,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan hanya 0,7%.

4.8.4.3. Pedoman Program Kesehatan Bayi dan Anak

Jenis Buku Pedoman yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi, Pedoman Manajemen Asfiksia, Buku KIA, Pedoman SDIDTK, Pedoman Kelas Ibu Balita, Modul BBLR, Modul MTBS, Pedoman pelayanan KTA, dan Pedoman PKPR. Di Provinsi DKI Jakarta, Pedoman upaya Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terbanyak dimiliki oleh Puskesmas adalah Buku KIA (72,3%) kemudian Modul MTBS (59,2%), Pedoman SDIDTK (41,1%), Modul BBLR (36,9%), Pedoman Manajemen Asfiksia (34,2%), Pedoman PKPR (32,4%), Pedoman Kelas Ibu Balita (33,9%) dan Pedoman Pelayanan KTA (3,7%). Persentase Puskesmas yang memiliki seluruh Pedoman seperti yang disebutkan di atas dalam lingkup provinsi adalah sebesar 18,8 persen. (Tabel 4.8.4.3.1.a dan 4.8.4.3.1.b.).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman Manajemen Asfiksia dalam lingkup provinsi adalah sebesar 34,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), di Jakarta Pusat (41,5%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (36,4%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (24,4%) dan Jakarta Barat (32,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Pedoman Manajemen Asfiksia adalah 72,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 28,4%.

Tabel 4.8.4.3.1.a.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Bayi dan Anak di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pedoman Manajemen Asfiksia | Pedoman Buku KIA | Pedoman SDIDTK | Pedoman Kelas Ibu Balita | Modul BBLR |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 66.7 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 24.4 | 61.5 | 32.1 | 19.2 | 24.4 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 36.4 | 71.6 | 45.5 | 43.2 | 36.4 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 41.5 | 70.7 | 39.0 | 26.8 | 43.9 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 32.4 | 75.7 | 44.6 | 41.9 | 40.5 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 34.7 | 83.7 | 42.9 | 30.6 | 38.8 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 72.7 | 86.4 | 70.5 | 45.5 | 54.5 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 28.4 | 70.2 | 36.6 | 32.2 | 34.2 |
| DKI Jakarta | | 336 | 34.2 | 72.3 | 41.1 | 33.9 | 36.9 |

Persentase Puskesmas memiliki Buku KIA dalam lingkup provinsi adalah sebesar 72,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), di Jakarta Utara (83,7%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (75,7%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (61,5%) dan Jakarta Pusat (70,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku KIA adalah 86,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 70,2%.

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman SDIDTK dalam lingkup provinsi adalah sebesar 41,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), di Jakarta Timur (45,5%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (44,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (32,1%) dan Jakarta Pusat (39,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Pedoman SDIDTK adalah 70,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 36,6%.

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman Kelas Ibu Balita dalam lingkup provinsi adalah sebesar 33,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), di Jakarta Timur (43,2%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (41,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (19,2%) dan Jakarta Pusat (26,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Pedoman Kelas Ibu Balita adalah 45,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 32,2%.

Persentase Puskesmas memiliki Modul BBLR dalam lingkup provinsi adalah sebesar 36,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), di Jakarta Pusat (43,9%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (40,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (24,4%) dan Jakarta Timur (36,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Modul BBLR adalah 54,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 34,2%.

Tabel 4.8.4.3.1.b.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program
Bayi dan Anak di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Modul MTBS | Pedoman KTA | Pedoman PKPR | Pedoman Lengkap Kesehatan Ibu Balita |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 50.0 | 33.3 | 33.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 57.7 | 17.9 | 26.9 | 7.7 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 48.9 | 30.7 | 26.1 | 18.2 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 65.9 | 41.5 | 36.6 | 22.0 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 58.1 | 36.5 | 40.5 | 25.7 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 71.4 | 44.9 | 36.7 | 22.4 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 88.6 | 61.4 | 59.1 | 22.7 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 54.8 | 28.4 | 28.4 | 18.2 |
| DKI Jakarta | | 336 | 59.2 | 32.7 | 32.4 | 18.8 |

Tabel 4.8.4.3.1.b menunjukkan Persentase Puskesmas memiliki Modul MTBS dalam lingkup provinsi adalah sebesar 59,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), di Jakarta Utara (71,4%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (65,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Timur (48,9%) dan Jakarta Selatan (57,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Modul MTBS adalah 88,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 54,8%.

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman KTA dalam lingkup provinsi adalah sebesar 32,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), di Jakarta Utara (44,9%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (41,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (17,9%) dan Jakarta Timur (30,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Pedoman KTA adalah 61,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 28,4%.

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman PKPR dalam lingkup provinsi adalah sebesar 32,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Barat (40,5%), diikuti oleh Kota Jakarta Utara (36,7%) dan Jakarta Pusat (36,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Timur (26,1%) dan Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Pedoman PKPR adalah 59,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 28,4%.

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap dalam lingkup provinsi adalah sebesar 18,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%), di Jakarta Pusat (25,75%), diikuti oleh Kota Jakarta Utara (22,4%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (7,7%) dan Jakarta Timur (18,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase

Puskesmas Kecamatan yang memiliki Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap adalah 22,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 18,2%.

4.8.4.4 Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dapat berupa Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Umpan Balik dalam bentuk tertulis, dan Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi(Monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak yang paling banyak diterima Puskesmas adalah dalam bentuk Pertemuan Monev (55,4%) dan diikuti oleh Supervisi ke Puskesmas (50,3%) kemudian Umpan Balik (42,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap (Supervisi, Umpan Balik dan Pertemuan Monev) adalah sebesar 35,1 persen . (Tabel 4.8.4.4.1).

Tabel 4.8.4.4.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Bayi dan Anak di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | % Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Bayi dan Anak | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|---|-------------|-----------------|--|
| | | | Supervisi Dinkes | Umpan Balik | Pertemuan Monev | Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 46.2 | 44.9 | 53.8 | 37.2 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 39.8 | 37.5 | 45.5 | 27.3 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 61.0 | 43.9 | 58.5 | 39.0 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 51.4 | 43.2 | 58.1 | 35.1 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 59.2 | 36.7 | 63.3 | 34.7 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 84.1 | 68.2 | 75.0 | 56.8 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 45.2 | 38.4 | 52.4 | 31.8 |
| DKI Jakarta | | 336 | 50.3 | 42.3 | 55.4 | 35.1 |

Dari 336 Puskesmas yang dianalisis Persentase Puskesmas menerima Kunjungan Supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan kesehatan bayi dan Anak dalam lingkup provinsi adalah sebesar 50,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), di Jakarta Pusat (61,0%), diikuti oleh Kota Jakarta Utara (59,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Timur (39,8%) dan Jakarta Selatan (46,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas

Kecamatan yang menerima Kunjungan Supervisi adalah 84,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 45,2%.

Dari 336 Puskesmas yang dianalisis Persentase Puskesmas menerima Umpan Balik Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah sebesar 42,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), di Jakarta Selatan (44,9%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (43,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (36,7%) dan Jakarta Timur (37,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Umpan Balik Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah 68,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 38,4%.

Persentase Puskesmas mengikuti Pertemuan Monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah sebesar 55,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), di Jakarta Utara (63,3%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (58,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Timur (45,5%) dan Jakarta Selatan (53,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pertemuan Monev adalah 75,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 52,4%.

Persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dalam lingkup provinsi adalah sebesar 35,1. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), di Jakarta Pusat 39,0%), diikuti oleh Kota Jakarta selatan (37,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Timur (27,3%) dan Jakarta Utara (34,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah 56,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 31,8%.

4.8.5. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

4.8.5.1 Kegiatan Program Keluarga Berencana

Jenis Kegiatan dalam Pelayanan Keluarga Berencana yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi), Penanganan Komplikasi Kontrasepsi, dan Konsultasi KB (Keluarga Berencana). Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi DKI Jakarta adalah Konsultasi KB 98,2 persen ,Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap 89,3 persen, dan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi 47,0 persen.. Sedangkan persentase Puskesmas yang melaksanakan ketiga kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 45,5 persen (Tabel 4.8.5.1.1).

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap adalah sebesar 89,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (98,7%), diikuti oleh Jakarta Utara (95,9%), Jakarta Timur (92,0%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Pusat (78,0%) dan Jakarta Barat (78,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap adalah 93,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 88,7%.

Tabel 4.8.5.1.1.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan KB
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Kegiatan Pelayanan KB | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | | Pemasangan Alat Kontrasepsi | Penanganan Komplikasi | Konsultasi KB | Kegiatan Lengkap |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 83.3 | 16.7 | 100.0 | 16.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 98.7 | 48.7 | 100.0 | 48.7 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 92.0 | 52.3 | 98.9 | 52.3 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 78.0 | 36.6 | 92.7 | 31.7 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 78.4 | 48.6 | 98.6 | 44.6 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 95.9 | 44.9 | 98.0 | 44.9 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 93.2 | 54.5 | 97.7 | 52.3 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 88.7 | 45.9 | 98.3 | 44.5 |
| DKI Jakarta | | 336 | 89.3 | 47.0 | 98.2 | 45.5 |

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi adalah sebesar 47,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Timur (52,3%), diikuti oleh Jakarta Selatan (48,7%), Jakarta Barat (48,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%), dan Kota Jakarta Pusat (36,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi adalah 54,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 45,9%.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Konsultasi KB adalah sebesar 98,2%. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Selatan (masing masing 100%), diikuti oleh Jakarta Timur (98,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Pusat (92,7%) dan Jakarta Utara (98,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Pelayanan Konsultasi KB adalah 97,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 98,3%.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan lengkap Pelayanan Keluarga Berencana sebesar 45,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Timur (52,3%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (48,7%), Jakarta Utara (44,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%), di Jakarta Pusat (31,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan lengkap Pelayanan Keluarga Berencana adalah 52,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 44,5%.

4.8.5.2 Pelatihan Program Keluarga Berencana

Pelatihan dalam pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana yang dikumpulkan Rifaskes 2011 meliputi Pelatihan Program KB, Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi, dan Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi yang diikuti tenaga puskesmas pada tahun 2009 dan tahun 2010. Dari tiga jenis pelatihan tersebut, Pelatihan Program KB (61,7%) merupakan persentase tertinggi, kemudian diikuti oleh Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi (28,6%), dan Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi (15,8%). Sedangkan persentase Puskesmas yang mengikuti secara lengkap ketiga jenis pelatihan tersebut di atas sebesar 15,2 persen (Tabel 4.8.5.2.1.).

Tabel 4.8.5.2.1.
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan
Pelayanan KB Tahun 2009-2010 di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pelatihan Program KB | Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi | Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi | Pelatihan Lengkap |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 50.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 23.1 | 19.2 | 12.8 | 11.5 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 30.7 | 30.7 | 18.2 | 17.0 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 36.6 | 31.7 | 19.5 | 19.5 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 39.2 | 35.1 | 18.9 | 18.9 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 32.7 | 28.6 | 10.2 | 10.2 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 59.1 | 59.1 | 31.8 | 31.8 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 28.4 | 24.0 | 13.4 | 12.7 |
| DKI Jakarta | | 336 | 32.1 | 28.6 | 15.8 | 15.2 |

Dari 336 Puskesmas di DKI Jakarta, Persentase yang mengikuti Pelatihan Program KB sebesar 32,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), diikuti oleh Jakarta Barat (39,2%), Jakarta Pusat (36,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (23,1%), dan Kota Jakarta Timur (30,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Program KB adalah 59,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 28,4%.

Dari 336 Puskesmas di DKI Jakarta, Persentase yang mengikuti Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi sebesar 28,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Barat (35,1%), diikuti oleh Jakarta Pusat (31,7%), Jakarta Timur (30,7%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%), dan Kota Jakarta Selatan (19,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi adalah 59,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 24,0%.

Dari 336 Puskesmas di DKI Jakarta, Persentase yang mengikuti Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi sebesar 15,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Pusat (19,5%), diikuti oleh Jakarta Barat (18,9%), Jakarta Timur (18,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%), dan Kota Jakarta Utara (10,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi adalah 31,8%, sementara di Puskesmas Kelurahan 12,7%.

Dari 336 Puskesmas di DKI Jakarta, Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti ketiga pelatihan dalam Program Pelayanan KB sebesar 15,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Pusat (19,5%), diikuti oleh Jakarta Barat (18,9%), Jakarta Timur (17,0%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%), dan Kota Jakarta Utara (10,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti ketiga pelatihan dalam Program Pelayanan KB adalah 31,8%, sementara di Puskesmas Kelurahan 12,7%.

4.8.5.3. Pedoman Program Keluarga Berencana

Jenis Pelayanan Keluarga Berencana, buku pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi, Panduan Audit Medik Pelayanan KB, Panduan Baku Klinis KB, Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Yankespro) Terpadu, Panduan Kontrasepsi Darurat, dan Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi.

Jenis pedoman Pelayanan KB yang dipunyai di Provinsi DKI Jakarta tertinggi adalah ketersediaan Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (53,6%), kemudian Panduan Baku Klinis KB (40,8%), Pedoman Yankespro Terpadu (37,8%), Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi (33,0%), Panduan Kontrasepsi Darurat (34,29%), dan Panduan Audit Medik Pelayanan KB (35,4%). Sedangkan presentase Puskesmas yang memiliki keseluruhan jenis pedoman seperti disebutkan di atas adalah sebesar 25,3 persen (Tabel 4.8.5.3.1.a-b).

Dari 336 Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta, Persentase Puskesmas yang memiliki buku Panduan Pelayanan Kontrasepsi sebesar 53,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Jakarta Barat (68,9%), Jakarta Pusat (56,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Timur (43,2%), dan Kota Jakarta Selatan (46,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki buku Panduan Pelayanan Kontrasepsi adalah 81,8%, sementara di Puskesmas Kelurahan 49,3%.

Dari 336 Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta, Persentase Puskesmas yang memiliki Panduan Audit Medik Pelayanan KB sebesar 35,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), diikuti oleh Jakarta Barat (41,9%), Jakarta Pusat (41,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Timur (27,3%), dan Kota Jakarta Selatan (33,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Panduan Audit Medik Pelayanan KB adalah 52,3%, sementara di Puskesmas Kelurahan 32,9%.

Tabel 4.8.5.3.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Ketersediaan Buku Pedoman Program KB | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Panduan Pelayanan Kontrasepsi | Panduan Audit Medik Pelayanan KB | Panduan Klinis KB | Pedoman Yankespro Terpadu |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 50.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 46.2 | 33.3 | 30.8 | 32.1 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 43.2 | 27.3 | 40.9 | 34.1 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 56.1 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 68.9 | 41.9 | 45.9 | 43.2 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 53.1 | 36.7 | 40.8 | 40.8 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 81.8 | 52.3 | 59.1 | 54.5 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 49.3 | 32.9 | 38.0 | 35.3 |
| DKI Jakarta | | 336 | 53.6 | 35.4 | 40.8 | 37.8 |

Persentase puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai buku Panduan Baku Klinis KB sebesar 40,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Jakarta Barat (45,9%), Jakarta Pusat (41,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (30,8%), dan Kota Jakarta Utara (40,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai buku Panduan Baku Klinis KB adalah 59,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 38,0%.

Persentase puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai buku Pedoman Yankespro Terpadu sebesar 37,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), diikuti oleh Jakarta Barat (43,2%), Jakarta Pusat (41,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (32,1%), dan Kota Jakarta Timur (34,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai buku Pedoman Yankespro Terpadu adalah 35,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 35,3%.

Tabel 4.8.5.3.1.b. menunjukkan Persentase puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai buku Panduan Kontrasepsi Darurat sebesar 34,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%) , diikuti oleh Jakarta Utara (44,9%), dan Jakarta Pusat (43,9%), Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (24,4%) dan Kota Jakarta Timur (25,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai buku Panduan Kontrasepsi Darurat adalah 56,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 30,8%.

Tabel 4.8.5.3.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman Pelayanan KB
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Ketersediaan Buku Pedoman Program KB | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| | | | Panduan Kontrasepsi Darurat | Panduan Penanggulangan Efek Samping Kontrasepsi | Pedoman Lengkap |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 50.0 | 33.3 | 33.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 24.4 | 26.9 | 17.9 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 25.0 | 26.1 | 17.0 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 43.9 | 41.5 | 34.1 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 41.9 | 41.9 | 32.4 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 44.9 | 34.7 | 32.7 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 56.8 | 52.3 | 40.9 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 30.8 | 30.1 | 22.9 |
| DKI Jakarta | | 336 | 34.2 | 33.0 | 25.3 |

Persentase puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai buku Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi sebesar 33,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Barat (41,9%), diikuti oleh Jakarta Pusat (41,5%), Jakarta Utara (34,7%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Timur (26,1%), dan Kota Jakarta Selatan (26,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai buku Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi adalah 52,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 30,1%.

Persentase puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai lengkap keenam buku pedoman/ panduan seperti tersebut di atas sebesar 25,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Pusat (34,1%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%), Jakarta Utara (32,7%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Timur (17,0%), dan Kota Jakarta Selatan (17,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai lengkap keenam buku pedoman/panduan seperti tersebut di atas adalah 40,9% , sementara di Puskesmas Kelurahan 22,9%.

4.8.5.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Keluarga Berencana

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Pelayanan Keluarga Berencana untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan berupa Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Umpan Balik dalam bentuk tertulis, dan Mengikuti Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Persentase Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Keluarga Berencana yang paling banyak diterima Puskesmas adalah dalam bentuk mengikuti Pertemuan Monev yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (56,8%) kemudian Kunjungan Supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (46,1%), dan Umpan Balik (35,4%). Sedangkan persentase Puskesmas yang lengkap menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Keluarga berencana adalah sebesar 29,2 persen (Tabel 4.8.5.4.1.).

Tabel 4.8.5.4.1.

Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan KB | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota | Umpan Balik Laporan | Pertemuan Monitoring dan Evaluasi | Bimbingan Teknis Lengkap |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 51.3 | 38.5 | 61.5 | 33.3 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 38.6 | 28.4 | 44.3 | 20.5 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 70.7 | 53.7 | 68.3 | 48.8 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 47.3 | 40.5 | 60.8 | 33.8 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 28.6 | 18.4 | 57.1 | 12.2 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 72.7 | 47.7 | 68.2 | 40.9 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 42.1 | 33.6 | 55.1 | 27.4 |
| DKI Jakarta | | 336 | 46.1 | 35.4 | 56.8 | 29.2 |

Persentase Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang menerima Kunjungan Supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 46,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di di Kota Jakarta Pusat (70,7%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (51,3%), Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%) . Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (28,6%) dan di Kota Jakarta Timur (38,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Kunjungan Supervisi adalah 72,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 42,1%.

Persentase Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang menerima Umpan Balik untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 35,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di di Kota Jakarta Pusat (53,7%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%) dan Kota Jakarta Barat (40,5%), Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (18,4%) dan di Kota Jakarta Timur (28,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Umpan Balik untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah 47,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 33,6%.

Persentase Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pertemuan Monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 56,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Pusat (68,3%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (61,5%) dan Jakarta Barat (60,7). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Timur (44,3%), dan Kota Jakarta Utara (57,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pertemuan Monev adalah 68,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 55,1%.

Persentase Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang menerima ketiga jenis Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Keluarga Berencana sebesar 29,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), diikuti oleh di Kota Jakarta Pusat (48,8%), Kota Jakarta Barat (33,8%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (12,2%), dan Kota Jakarta Timur (20,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima ketiga jenis Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap adalah 40,9% , sementara di Puskesmas Kelurahan 27,4%.

4.8.6. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

4.8.6.1. Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Jenis Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif, Pemberian MP-ASI Anak Umur 6-24 bulan, Pemberian Kapsul Vit-A pada Balita, Pemberian Tablet Besi (90 tablet) pada Ibu Hamil, Pemberian PMT Pemulihan Balita pada Gakin dan Penimbangan Balita.

Di provinsi DKI Jakarta jenis kegiatan Program Perbaikan Gizi yang terbanyak dilaksanakan adalah kegiatan pemberian kapsul vitamin A pada Balita (98,2%), kemudian penimbangan balita (97,9%) dan pemberian tablet besi pada ibu hamil (94,6%), Pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan (93,8%), peningkatan pemberian ASI eksklusif (89,6%), dan pemberian PMT pemulihan balita Gakin (89,3%). Sedangkan persentase Puskesmas yang melaksanakan keenam kegiatan program perbaikan gizi masyarakat seperti tersebut di atas secara lengkap adalah sebesar 78,6 persen (Tabel 4.8.6.1.1.a-b).

Dari 366 Puskesmas di DKI Jakarta ,Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif adalah sebesar 89,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh di Kota Jakarta Utara (98,0%), Kota Jakarta Barat (91,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (83,3%), dan Kota Jakarta Pusat 87,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif adalah 93,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 89,0%.

Dari 366 Puskesmas di DKI Jakarta ,Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan adalah sebesar 93,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara (masing masing 100%), diikuti oleh di Kota Jakarta Selatan (96,2%), Kota Jakarta Pusat (95,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (12,2%), dan Kota Jakarta Timur (20,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan

Pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan adalah 95,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 93,5%.

Dari 366 Puskesmas di DKI Jakarta ,Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemberian Kapsul Vit-A pada balita adalah sebesar 98,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara (masing masing100%), diikuti oleh di Kota Jakarta Timur (98,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Barat(95,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, Tidak ada Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Pemberian Kapsul Vit-A pada balita (0,0%), sementara di Puskesmas Kelurahan 97,9%.

Dari 366 Puskesmas di DKI Jakarta ,Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemberian Tablet Besi (90 tablet) pada ibu hamil adalah sebesar 94,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara (masing masing100%), diikuti oleh di Kota Jakarta Barat (94,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Pusat(90,2%), dan Kota Jakarta Selatan (93,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Pemberian Tablet Besi (90 tablet) pada ibu hamil adalah 97,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 94,2%.

Tabel 4.8.6.1.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | Pemberian ASI Eksklusif | Pemberian MP-ASI Anak Umur 6-24 Bulan | Pemberian Kapsul Vitamin A | Pemberian Tablet Besi |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 83.3 | 96.2 | 98.7 | 93.6 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 88.6 | 87.5 | 98.9 | 94.3 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 87.8 | 95.1 | 97.6 | 90.2 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 91.9 | 93.2 | 95.9 | 94.6 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 93.2 | 95.5 | 0,0 | 97.7 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 89.0 | 93.5 | 97.9 | 94.2 |
| DKI Jakarta | | 336 | 89.6 | 93.8 | 98.2 | 94.6 |

Tabel 4.8.6.1.1.b menunjukkan bahwa dari 366 Puskesmas di DKI Jakarta ,Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin adalah sebesar 89,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh di Kota Jakarta Barat (90,5%), Kota Jakarta selatan (91,0%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Pusat(85,4%), dan Kota Jakarta Timur (87,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan

kegiatan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin adalah 95,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 88,4%.

Dari 366 Puskesmas di DKI Jakarta ,Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Penimbangan Balita adalah sebesar 97,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara (masing masing 100%), diikuti oleh di Kota Jakarta Timur (98,9%), Kota Jakarta Pusat (97,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota JakartaBarat(95,9). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Penimbangan Balita adalah 97,7%, sementara di Puskesmas Kelurahan 97,9%.

Tabel 4.8.6.1.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | Pemberian PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk Pada Gakin | Penimbangan Balita | Kegiatan Lengkap |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 91.0 | 97.4 | 74.4 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 87.5 | 98.9 | 72.7 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 85.4 | 97.6 | 75.6 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 90.5 | 95.9 | 83.8 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 89.8 | 100.0 | 87.8 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 95.5 | 97.7 | 86.4 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 88.4 | 97.9 | 77.4 |
| DKI Jakarta | | 336 | 89.3 | 97.9 | 78.6 |

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang melakukan keenam kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap adalah sebesar 78,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100,0%), diikuti oleh di Kota Jakarta Utar (87,8%), Kota Jakarta Barat (83,8%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Timur(72,7%), dan Kota Jakarta Selatan (74,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap adalah 86,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 77,4%.

4.8.6.2. Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Jenis Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang telah dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Pelatihan Konseling ASI, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Konseling MP-ASI, dan Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk yang diikuti oleh tenaga Puskesmas tahun 2009 dan 2010.

Laporan Provinsi DKI Jakarta Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Dari keseluruhan pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang terbanyak diikuti adalah Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk (34,8%) diikuti oleh Pelatihan Konseling ASI (44,3%), Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan (35,1%) dan Pelatihan Konseling MP-ASI (30,4%). Sedangkan persentase Puskesmas yang melakukan secara lengkap keempat kegiatan program Perbaikan Gizi Masyarakat sebesar 16,7 persen (Tabel 4.8.6.2.1.).

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling ASI adalah sebesar 44,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100,0%), diikuti oleh di Kota Jakarta Utara (77,6%), Kota Jakarta Pusat (51,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan(29,5%), dan Kota Jakarta Barat (31,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan konseling ASI adalah 86,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 38,0%.

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan adalah sebesar 5,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100,0%), diikuti oleh di Kota Jakarta Timur (52,3%), Kota Jakarta pusat (36,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara(22,4%), dan Kota Jakarta Selatan (24,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan adalah 70,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 29,8%.

Tabel 4.8.6.2.1.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2009-2010 di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pelatihan Konseling ASI | Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan | Pelatihan Konseling MP-ASI | Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk | Pelatihan Lengkap |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 33.3 | 33.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 29.5 | 24.4 | 17.9 | 29.5 | 9.0 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 43.2 | 52.3 | 44.3 | 43.2 | 23.9 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 51.2 | 36.6 | 43.9 | 34.1 | 26.8 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 31.1 | 28.4 | 27.0 | 32.4 | 17.6 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 77.6 | 22.4 | 16.3 | 32.7 | 4.1 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 86.4 | 70.5 | 50.0 | 59.1 | 31.8 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 38.0 | 29.8 | 27.4 | 31.2 | 14.4 |
| DKI Jakarta | | 336 | 44.3 | 35.1 | 30.4 | 34.8 | 16.7 |

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Konseling MP-ASI adalah sebesar 30,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), diikuti oleh di Kota Jakarta Timur(44,3%), dan Kota Jakarta Pusat (43,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (16,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas

Kecamatan yang mengikuti pelatihan Konseling MP-ASI adalah 50,0%, sementara di Puskesmas Kelurahan 27,4%.

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk adalah sebesar 34,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Timur(43,2%) dan Jakarta Pusat (34,1%) dan di Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%). Sedangkan Persentase terendah ada, dan Kota Jakarta Selatan (29,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk adalah 59,1%, sementara di Puskesmas Kelurahan 31,2%.

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti kelima pelatihan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap adalah sebesar 16,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%), diikuti oleh di Kota Jakarta Pusat (26,8%), Kota Jakarta Timur (23,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (4,1%), dan Kota Jakarta Selatan (9,0%), Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap adalah 31,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 14,4%.

4.8.6.3. Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Jenis Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi, Buku program perbaikan Gizi Masyarakat, Buku Pegangan Kader, Buku Manajemen Pemberian Vitamin A, Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe, Buku Pedoman ASI, Buku Pedoman Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium, Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan, dan Buku Pengelolaan MP-ASI untuk anak usia 6-24 bulan.

Persentase Puskesmas yang mempunyai buku pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, tertinggi adalah ketersediaan Buku Pegangan Kader (61,9%) diikuti oleh ketersediaan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan (55,4%), Buku Pedoman ASI (51,8%), Buku Manajemen Pemberian Vitamin A (48,2%) Buku Pedoman MP-ASI (42,9%), Buku Surveilans Gizi (39,0%), dan Buku Pedoman Pengelolaan MP-ASI untuk Anak Usia 6-24 Bulan (38,7%), Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe (36,0%) dan Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium (35,4%),. Sedangkan persentase Puskesmas yang memiliki keseluruhan jenis Pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 20,5 persen (Tabel 4.8.6.3.1.).

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang memiliki Buku pedoman Surveilans Gizi adalah sebesar 39,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (88,3%), diikuti oleh di Kota Jakarta Utara (44,9%), Kota Jakarta Pusat (41,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (28,2%), dan Kota Jakarta Timur (39,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku pedoman Surveilans Gizi adalah 61,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 35,6%.

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang memiliki Buku Pegangan Kader adalah sebesar 61,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh di Kota Jakarta Barat (66,2%), Kota Jakarta Selatan (61,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Timur (58,0%), dan Kota Jakarta Pusat (58,5). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pegangan Kader adalah 90,9% , sementara di Puskesmas Kelurahan 57,5%.

Tabel 4.8.6.3.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|---|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | Pedoman Gizi | Buku Pegangan Kader | Buku Manajemen Pemberian Vitamin A | Panduan Pemberian Tablet Fe |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 66.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 28.2 | 61.5 | 35.9 | 25.6 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 39.8 | 58.0 | 45.5 | 33.0 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 41.5 | 58.5 | 56.1 | 48.8 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 40.5 | 66.2 | 52.7 | 41.9 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 44.9 | 61.2 | 53.1 | 34.7 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 61.4 | 90.9 | 81.8 | 61.4 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 35.6 | 57.5 | 43.2 | 32.2 |
| DKI Jakarta | | 336 | 39.0 | 61.9 | 48.2 | 36.0 |

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang memiliki Buku Manajemen Pemberian Vit A adalah sebesar 48,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh di Kota Jakarta Pusat (56,1%), Kota Jakarta Utara (53,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (35,9%), dan Kota Jakarta Timur (45,5). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Manajemen Pemberian Vit A adalah 81,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 43,2%.

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang memiliki Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe adalah sebesar 36,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,6%), diikuti oleh di Kota Jakarta pusat (48,8%), Kota Jakarta barat (41,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (25,6%), dan Kota Jakarta Timur (33,0). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe adalah 61,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 32,2%.

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman ASI adalah sebesar 51,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh di Kota Jakarta Utara (63,3%), Kota Jakarta Timur (55,7%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (37,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pedoman ASI adalah 84,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 46,9%.

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman MP-ASI adalah sebesar 42,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), diikuti oleh di Kota Jakarta pusat(53,7%), Kota Jakarta Utara (53,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (25,6%), dan Kota Jakarta Timur (44,3). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pedoman MP-ASI adalah 79,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 37,3%.

Tabel 4.8.6.3.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|---|----------------|-----------------------------------|
| | | | Pedoman ASI | Pedoman MP-ASI | Pedoman Pemberian Garam Beryodium |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 66.7 | 66.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 37.2 | 25.6 | 20.5 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 55.7 | 44.3 | 35.2 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 53.7 | 53.7 | 43.9 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 50.0 | 44.6 | 40.5 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 63.3 | 53.1 | 40.8 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 84.1 | 79.5 | 77.3 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 46.9 | 37.3 | 29.1 |
| DKI Jakarta | | 336 | 51.8 | 42.9 | 35.4 |

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium adalah sebesar 35,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), diikuti oleh di Kota Jakarta Pusat (43,9%), Kota Jakarta Utara (40,8%). Sedangkan persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (20,5%), dan Kota Jakarta Timur (35,2). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium adalah 77,3%, sementara di Puskesmas Kelurahan 29,1%.

Tabel 4.8.6.3.1.c. menunjukkan bahwa dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang memiliki Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan adalah sebesar 55,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu

(100%), diikuti oleh di Kota Jakarta Timur (60,2%), Kota Jakarta Pusat (53,7%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (51,0%), dan Kota Jakarta Selatan (52,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan adalah 84,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 51,0%.

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang memiliki Buku Pengelolaan MP-ASI adalah sebesar 38,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Pusat (56,1%), di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), diikuti oleh di Kota Jakarta Utara (44,9%),. Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (23,1%), dan Kota Jakarta Timur (37,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pengelolaan MP-ASI adalah 84,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 31,8%.

Tabel 4.8.6.3.1.c.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|---|-------------------------|-----------------|
| | | | Buku Pemantauan Pertumbuhan | Buku Pengelolaan MP-ASI | Pedoman Lengkap |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 50.0 | 16.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 52.6 | 23.1 | 9.0 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 60.2 | 37.5 | 19.3 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 53.7 | 56.1 | 29.3 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 52.7 | 41.9 | 27.0 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 51.0 | 44.9 | 24.5 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 84.1 | 84.1 | 36.4 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 51.0 | 31.8 | 18.2 |
| DKI Jakarta | | 336 | 55.4 | 38.7 | 20.5 |

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang memiliki keseluruhan pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap adalah sebesar 20,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Pusat (29,3%), Jakarta Barat (27,0%), diikuti oleh di Kota Jakarta Utara (24,5%),. Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan (9,0%), dan Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki keseluruhan pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap adalah 36,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 18,2%.

4.8.6.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan dapat berupa Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Umpan Balik dalam bentuk tertulis, dan Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi(Monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang diterima Puskesmas adalah dalam bentuk Pertemuan Monev (68,2%) diikuti oleh Kunjungan Supervisi (59,2%) dan Umpan Balik (49,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas yang menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan sebesar 42,6 persen. (Tabel 4.8.6.4.1)

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang menerima Kunjungan Supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 59,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh di Kota Jakarta Selatan (75,6%), dan di Kota Jakarta Pusat (56,1%). Sedangkan . Persentase Puskesmas terendah adalah di Jakarta Utara(46,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Kunjungan Supervisi adalah 88,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 54,8%.

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang menerima Umpan Balik Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 49,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (83,3%), dan diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (60,3%), Jakarta Pusat (48,8%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (40,8%), Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Umpan Balik Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah 81,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 44,9%.

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang mengikuti Pertemuan Monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 68,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (75,6%), dan Jakarta Utara (67,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Barat (60,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pertemuan Monev Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah 88,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 65,1%.

Dari 336 Puskesmas di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 42,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (83,3%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (53,8%), dan Jakarta Pusat (46,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (26,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah 72,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 38,0%.

Tabel 4.8.6.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota | Umpan Balik Laporan | Pertemuan Monitoring dan Evaluasi | Bimbingan Teknis Lengkap |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 83.3 | 100.0 | 83.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 75.6 | 60.3 | 75.6 | 53.8 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 54.5 | 44.3 | 67.0 | 36.4 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 56.1 | 48.8 | 65.9 | 46.3 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 54.1 | 48.6 | 60.8 | 43.2 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 46.9 | 40.8 | 67.3 | 26.5 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 88.6 | 81.8 | 88.6 | 72.7 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 54.8 | 44.9 | 65.1 | 38.0 |
| DKI Jakarta | | 336 | 59.2 | 49.7 | 68.2 | 42.6 |

4.8.7. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

4.8.7.1. Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular

Jenis Kegiatan dalam pelaksanaan Upaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi: Program TB paru, Program ISPA, Program Diare, Program DBD, Program Malaria, Program Kusta, Program Schistosomiasis, Program HIV-AIDS, Program Filariasis, Surveilans Terpadu, dan Program Rabies.

Tabel 4.8.7.1.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|--|-------------------------|---------------|-------------|
| | | | Program TB Paru | Program ISPA/ Pneumonia | Program Diare | Program DBD |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 66.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 100.0 | 97.4 | 100.0 | 100.0 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 94.3 | 90.9 | 100.0 | 96.6 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 100.0 | 95.1 | 95.1 | 95.1 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 98.6 | 90.5 | 97.3 | 97.3 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 100.0 | 87.8 | 87.8 | 87.8 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 97.7 | 97.7 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 98.3 | 91.8 | 96.6 | 94.9 |
| DKI Jakarta | | 336 | 98.2 | 92.6 | 97.0 | 95.5 |

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Program TB Paru di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 98,2 persen. Terdapat 4 kabupaten/ kota yang semua Puskesmasnya 100,0 persen melakukan Program TB Paru, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Kota Jakarta Utara. Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Timur (94,3%) dan Jakarta Barat (98,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Program TB Paru adalah 97,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 98,3%.

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Program ISPA/Pneumonia adalah sebesar 92,6 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu(100%)diikuti oleh Kota Jakarta Selatan(97,4%) dan Jakarta Pusat (95,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (87,8%) dan Jakarta Barat (90,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Program ISPA/Pneumonia adalah 97,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 91,8%.

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Program Diare adalah sebesar 97,0 persen. Terdapat 3 kabupaten/ kota yang semua Puskesmasnya 100,0 persen melakukan kegiatan program Diare, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (87,8%) dan Jakarta Pusat (95,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, semua Puskesmas Kecamatan sudah melakukan kegiatan Program Diare (100%) , sementara di Puskesmas Kelurahan 96,65%.

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Program DBD adalah sebesar 95,5 persen. Persentase tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan(100%), dan Jakarta Barat (97,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%) dan Jakarta Utara (87,8%) Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, semua Puskesmas Kecamatan sudah melakukan kegiatan Program DBD (100%) , sementara di Puskesmas Kelurahan 94,9%.

Tabel 4.8.7.1.1.b. menunjukkan Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Malaria adalah sebesar 17,9 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu(83,3%)diikuti oleh Kota Jakarta Barat (36,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Selatan (9,0%) dan Jakarta Timur (9,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Program Malaria adalah 36,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 15,1%.

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Kusta adalah sebesar 53,6 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%) diikuti oleh Kota Jakarta Selatan(62,8%) dan Jakarta Timur (59,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (32,7%) dan Jakarta Barat (45,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Program Kusta adalah 86,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 48,6%.

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Schistosomiasis adalah sebesar 10,4 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (83,3%) diikuti oleh Kota Jakarta Barat (18,9%) dan Jakarta Pusat (12,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (2,0%) dan Jakarta Timur (5,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Program Schistosomiasis adalah 27,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 7,9%.

Tabel 4.8.7.1.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit
Menular di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|--|---------------|-------------------------|------------------|
| | | | Program Malaria | Program Kusta | Program Schistosomiasis | Program HIV-AIDS |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 83.3 | 100.0 | 83.3 | 33.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 9.0 | 62.8 | 6.4 | 50.0 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 9.1 | 59.1 | 5.7 | 33.0 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 19.5 | 56.1 | 12.2 | 43.9 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 36.5 | 45.9 | 18.9 | 36.5 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 10.2 | 32.7 | 2.0 | 30.6 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 36.4 | 86.4 | 27.3 | 75.0 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 15.1 | 48.6 | 7.9 | 33.2 |
| DKI Jakarta | | 336 | 17.9 | 53.6 | 10.4 | 38.7 |

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Program HIV-AIDS adalah sebesar 38,7 persen. Persentase tertinggi ada di Jakarta Selatan (50,0%), diikuti oleh Jakarta Pusat (43,9%), Kota Jakarta Selatan (97,4%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (30,6%), Kabupaten Kepulauan Seribu dan Jakarta Timur (masing-masing 33,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Program HIV-AIDS adalah 75,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 33,2%.

Tabel 4.8.7.1.1.c. menunjukkan Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Filariasis adalah sebesar 26,5 persen. Persentase tertinggi ada Kota Jakarta Selatan(37,2%), di diikuti oleh Jakarta Pusat (31,7%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%) dan Jakarta Timur (15,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Program Filariasis adalah 59,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 21,6%.

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu adalah sebesar 70,5 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu(100%)diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (82,9%) dan Jakarta Selatan (74,4%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (59,2%) dan Jakarta Timur (64,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu adalah 86,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 68,2%.

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Rabies adalah sebesar11,9 persen. Persentase tertinggi ada di Jakarta Barat (21,6%) dan Jakarta Pusat (12,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (4,1%) dan Jakarta Timur (9,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Program Rabies adalah 34,1%, sementara di Puskesmas Kelurahan 8,6%.

Tabel 4.8.7.1.1.c.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|--|--------------------|----------------|------------------|
| | | | Program Filariasis | Surveilans Terpadu | Program Rabies | Kegiatan Lengkap |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 0.0 | 100.0 | 16.7 | 0.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 37.2 | 74.4 | 10.3 | 2.6 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 15.9 | 64.8 | 9.1 | 1.1 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 31.7 | 82.9 | 12.2 | 4.9 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 29.7 | 71.6 | 21.6 | 6.8 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 22.4 | 59.2 | 4.1 | 0.0 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 59.1 | 86.4 | 34.1 | 9.1 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 21.6 | 68.2 | 8.6 | 2.1 |
| DKI Jakarta | | 336 | 26.5 | 70.5 | 11.9 | 3.0 |

Persentase Puskesmas yang melakukan seluruh kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular secara lengkap adalah sebesar 3,0 persen. Persentase tertinggi ada di Jakarta Barat (6,8%) diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (4,9%) dan Jakarta Selatan (2,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu Jakarta Utara (masing masing 0,0%), Jakarta Timur (1,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular secara lengkap adalah 9,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 2,1%.

4.8.7.2. Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Upaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan TB Paru, ISPA/Pneumonia, Diare, DBD, Malaria, Kusta, Schistosomiasis, Pencegahan HIV-AIDS, Pengenalan HIV-AIDS (konseling dan VCT) di RS dan Puskesmas, Filariasis, Rabies dan Tim Gerak Cepat yang diikuti oleh tenaga puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Dari keseluruhan pelatihan Upaya Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta, urutan persentase yang diikuti oleh petugas puskesmas dari tertinggi ke terendah adalah: pelatihan TB Paru (61,3%), pelatihan ISPA (39,0%) dan pelatihan Diare (34,2,0%) pelatihan DBD (32,1%) , pelatihan Kusta (28,6%), pelatihan Pencegahan HIV-AIDS (25,3%), pelatihan Pengenalan HIV-AIDS (22,3%) , pelatihan Filariasis (11,6%), pelatihan Malaria (9,5%), pelatihan Rabies (5,1%) dan pelatihan Schistosomiasis (3,9%), pelatihan Tim Gerak Cepat (1,2%).

Tabel 4.8.7.2.1.a. menunjukkan dari 366 Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta, Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit TB Paru adalah sebesar 61,3 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan

Seribu(100%), diikuti oleh Jakarta Barat (71,6%), Jakarta Utara (65,3%). Sedangkan Persentase terendah ada Jakarta Pusat (51,2%), dan di Jakarta Timur (54,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit TB Paru adalah 88,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 57,2%.

Tabel 4.8.7.2.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program
Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pelatihan TB Paru | Pelatihan ISPA/ Pneumonia | Pelatihan Diare | Pelatihan DBD | Pelatihan Malaria |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 66.7 | 66.7 | 50.0 | 83.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 59.0 | 29.5 | 30.8 | 25.6 | 6.4 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 54.5 | 40.9 | 38.6 | 30.7 | 3.4 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 51.2 | 53.7 | 43.9 | 36.6 | 12.2 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 71.6 | 40.5 | 33.8 | 33.8 | 13.5 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 65.3 | 32.7 | 20.4 | 36.7 | 8.2 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 88.6 | 70.5 | 65.9 | 54.5 | 25.0 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 57.2 | 34.2 | 29.5 | 28.8 | 7.2 |
| DKI Jakarta | | 336 | 61.3 | 39.0 | 34.2 | 32.1 | 9.5 |

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia adalah sebesar 39,0 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu(66,7%), diikuti oleh Jakarta Pusat (53,7%) ,Kota Jakarta Timur (40,9%). Sedangkan Persentase terendah ada Jakarta Selatan (29,5%), dan di Jakarta Utara (32,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia adalah 70,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 34,2%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diare adalah sebesar 34,2 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu(66,7%), diikuti oleh Jakarta Pusat (43,9%) ,Kota Jakarta Timur (38,6%). Sedangkan Persentase terendah ada Jakarta Utara (20,4%), dan di Jakarta Selatan (30,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diare adalah 65,9% , sementara di Puskesmas Kelurahan 29,5%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBD adalah sebesar 32,1 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), diikuti oleh Jakarta Utara (36,7%) ,Kota Jakarta Pusat (36,6%). Sedangkan Persentase terendah ada Jakarta Selatan (25,6%), dan di Jakarta Timur (30,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti

Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBD adalah 54,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 28,8%.

Sementara Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Malaria adalah sebesar 9,5 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu(83,3%), diikuti oleh Jakarta barat (13,5%) ,Kota Jakarta pusat (12,2%). Sedangkan Persentase terendah ada Jakarta Timur (3,4%), dan di Jakarta selatan (6,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Malaria adalah 25,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 7,2%.

Tabel .8.7.2.1.b.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pelatihan Kusta | Pelatihan Schistosomiasis | Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS | Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS |
|---------------------------------|----------------------|------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 16.7 | 33.3 | 16.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 26.9 | 5.1 | 20.5 | 15.4 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 28.4 | 1.1 | 23.9 | 23.9 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 29.3 | 7.3 | 31.7 | 24.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 24.3 | 5.4 | 24.3 | 25.7 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 28.6 | 0.0 | 30.6 | 24.5 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 70.5 | 11.4 | 72.7 | 72.7 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 22.3 | 2.7 | 18.2 | 14.7 |
| DKI Jakarta | | 336 | 28.6 | 3.9 | 25.3 | 22.3 |

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta adalah sebesar 28,6 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu(100%), diikuti oleh Jakarta Pusat (29,3%) ,Kota Jakarta Utara (28,6%). Sedangkan Persentase terendah ada Jakarta Barat (24,3%), dan di Jakarta Selatan (26,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta adalah 70,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 22,3%.

persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Schistosomiasis adalah sebesar 3,9 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu(16,7%), diikuti oleh Jakarta Pusat (7,3%), Kota Jakarta Barat (5,4%). Sedangkan Persentase terendah ada Jakarta Utara (0,0%), dan di Jakarta Timur (1,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Schistosomiasis adalah 11,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 2,7%.

Laporan Provinsi DKI Jakarta Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS adalah sebesar 25,3 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu(33,3%), diikuti oleh Jakarta Pusat (31,7%) ,Kota Jakarta Utara (30,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Selatan (20,5%), dan di Jakarta Timur (23,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS adalah 72,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 18,2%.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS adalah sebesar 22,3 persen. Persentase tertinggi ada di Kota Jakarta Barat (25,7%), diikuti oleh Jakarta Utara (24,5%). Sedangkan Persentase terendah ada Jakarta Selatan (15,4%), di Kabupaten Kepulauan Seribu(16,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS adalah 72,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 14,7%.

Tabel 4.8.7.2.1.c.
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pelatihan Filariasis | Pelatihan Rabies | Pelatihan Tim Gerak Cepat | Pelatihan Lengkap |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 9.0 | 3.8 | 10.3 | 1.3 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 9.1 | 2.3 | 11.4 | 0.0 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 14.6 | 4.9 | 9.8 | 4.9 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 12.2 | 8.1 | 10.8 | 1.4 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 18.4 | 8.2 | 18.4 | 0.0 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 38.6 | 18.2 | 50.0 | 4.5 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 7.5 | 3.1 | 6.2 | 0.7 |
| DKI Jakarta | | 336 | 11.6 | 5.1 | 11.9 | 1.2 |

Persentase Puskesmas yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Filariasis adalah 11,6 persen. Persentase tertinggi ada di di Jakarta Utara (18,4%), diikuti oleh Jakarta Pusat (814,6%). Sedangkan Persentase terendah ada Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%), Jakarta Selatan (9,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Filariasis adalah 38,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 7,5%.

Persentase Puskesmas yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Rabies adalah 5,1 persen. Persentase tertinggi ada di Jakarta Utara (8,2%), diikuti oleh Jakarta Barat (8,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%), Jakarta Timur (2,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Rabies adalah 18,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 3,1%.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat adalah sebesar 11,9 persen. Persentase tertinggi ada di di Jakarta Utara (18,4%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%). Sedangkan Persentase terendah ada Jakarta Pusat (9,8%), dan Jakarta Selatan (10,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat adalah 50,0%, sementara di Puskesmas Kelurahan 6,2%.

4.8.7.3. Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular

Pedoman pelaksanaan Upaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi: Penanggulangan TB Paru, Penanggulangan ISPA, Penanggulangan Diare, Penanggulangan DBD, Penanggulangan Malaria, Penanggulangan Kusta, Penanggulangan Schistosomiasis, Pencegahan HIV-AIDS, Penanggulangan Filariasis, pedoman KLB dan Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza, seperti pada tabel 4.8.7.3.1.

Tabel 4.8.7.3.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | Pedoman Penanggulangan TB Paru | Pedoman Penanggulangan an ISPA | Pedoman Penanggulangan Diare | Pedoman Penanggulangan DBD |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 84.6 | 47.4 | 62.8 | 53.8 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 83.0 | 60.2 | 56.8 | 52.3 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 87.8 | 73.2 | 78.0 | 80.5 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 85.1 | 70.3 | 71.6 | 67.6 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 77.6 | 49.0 | 49.0 | 59.2 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 88.6 | 70.5 | 75.0 | 84.1 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 83.2 | 58.6 | 62.0 | 57.9 |
| DKI Jakarta | | 336 | 83.9 | 60.1 | 63.7 | 61.3 |

Dalam lingkup provinsi DKI Jakarta, Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanggulangan TB Paru adalah sebesar 83,9 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Jakarta Pusat (87,8%) ,Kota Jakarta Barat (85,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (77,6%), dan di Jakarta Selatan (84,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Pedoman Penanggulangan TB Paru adalah 88,6%, sementara di Puskesmas Kelurahan 83,2%.

Dalam lingkup provinsi DKI Jakarta, Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPA adalah sebesar 60,1 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten

Kepulauan Seribu(100%), diikuti oleh Jakarta Pusat (73,2%) ,Kota Jakarta Barat (70,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Selatan (47,4%), dan di Jakarta Utara (49,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPA adalah 70,5%, sementara di Puskesmas Kelurahan 58,6%.

Dalam lingkup provinsi DKI Jakarta, Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diare adalah sebesar 63,7 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Jakarta Pusat (78,0%) ,Kota Jakarta Barat (71,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (49,0%), dan di Jakarta Timur (56,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diare adalah 75,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 62,0%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBD adalah sebesar 61,3 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Jakarta Pusat (80,5%) ,Kota Jakarta Barat (67,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Timur (52,3%), dan di Jakarta selatan (53,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBD adalah 84,1%, sementara di Puskesmas Kelurahan 57,9%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Malaria adalah sebesar 40,5 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Jakarta Pusat (56,1%) ,Kota Jakarta Barat (47,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Timur (26,1%), dan di Jakarta Selatan (34,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Malaria adalah 52,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 38,7%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Kusta adalah sebesar 52,7 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Jakarta Pusat (61,0%) ,Kota Jakarta Barat (56,8%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Timur (44,3%), dan di Jakarta Selatan (48,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Kusta adalah 77,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 49,0%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis adalah sebesar 26,2 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), diikuti oleh Jakarta Pusat (39,0%) ,Kota Jakarta Barat (35,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Selatan (12,8%), dan di Jakarta Timur (19,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis adalah 36,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 24,7%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS adalah sebesar 52,7 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten

Kepulauan Seribu (83,3%), diikuti oleh Jakarta Pusat (63,4%), Kota Jakarta Utara (61,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Selatan (43,6%), dan di Jakarta Timur (44,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS adalah 81,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 47,6%.

Tabel 4.8.7.3.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|---|------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Pedoman Penanggulangan Malaria | Pedoman Penanggulangan Kusta | Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis | Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 83.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 34.6 | 48.7 | 12.8 | 43.6 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 26.1 | 44.3 | 19.3 | 44.3 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 56.1 | 61.0 | 39.0 | 63.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 47.3 | 56.8 | 35.1 | 55.4 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 44.9 | 55.1 | 32.7 | 61.2 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 52.3 | 77.3 | 36.4 | 81.8 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 38.7 | 49.0 | 24.7 | 47.6 |
| DKI Jakarta | | 336 | 40.5 | 52.7 | 26.2 | 52.1 |

Tabel 4.8.7.3.1.c. menunjukkan, Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki Pedoman Penanggulangan Filariasis adalah sebesar 35,7 persen. Persentase tertinggi ada di Jakarta Pusat (53,7%) diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), Kota Jakarta Utara (44,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Timur (20,5%), dan di Jakarta Selatan (32,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Pedoman Penanggulangan Filariasis adalah 63,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 31,5%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan KLB adalah sebesar 40,2 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Jakarta Pusat (51,2%), Kota Jakarta Barat (47,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Selatan (29,5%), dan di Jakarta Timur (33,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan KLB adalah 65,9% , sementara di Puskesmas Kelurahan 36,3%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Rabies adalah sebesar 28,6 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), diikuti oleh Jakarta Pusat (43,9%), Kota Jakarta Barat (36,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Selatan (15,4%), dan di Jakarta Timur (20,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki

Buku Pedoman Penanggulangan Rabies adalah 47,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 25,7%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Avian Influenza adalah sebesar 42,3 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Jakarta Barat (51,4%) ,Kota Jakarta pusat (51,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Selatan (28,2%), dan di Jakarta Timur (34,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Avian Influenza adalah 63,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 39,0%.

Tabel 4.8.7.3.1.c.

Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular | | | | Pedoman Lengkap |
|--------------------------|----------------------|------------|---|----------------------------|-------------------------------|--|-----------------|
| | | | Pedoman Penanggulangan Filariasis | Pedoman Penanggulangan KLB | Pedoman Penanggulangan Rabies | Pedoman Penanggulangan Avian Influenza | |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 50.0 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | 33.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 32.1 | 29.5 | 15.4 | 28.2 | 9.0 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 20.5 | 33.0 | 20.5 | 34.1 | 12.5 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 53.7 | 51.2 | 43.9 | 51.2 | 36.6 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 40.5 | 47.3 | 36.5 | 51.4 | 28.4 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 44.9 | 42.9 | 34.7 | 51.0 | 28.6 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 63.6 | 65.9 | 47.7 | 63.6 | 22.7 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 31.5 | 36.3 | 25.7 | 39.0 | 20.5 |
| DKI Jakarta | | 336 | 35.7 | 40.2 | 28.6 | 42.3 | 20.8 |

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki secara lengkap seluruh buku pedoman dalam Program Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 20,8%. Persentase tertinggi ada di Jakarta Pusat (36,6%) diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%), Kota Jakarta Utara (28,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Selatan (9,0%), dan di Jakarta Timur (12,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki secara lengkap seluruh buku pedoman dalam Program Pengendalian Penyakit Menular adalah 22,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 20,5%.

4.8.7.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Pengendalian Penyakit Menular

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan diperlukan dalam Upaya Pengendalian Penyakit Menular untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan dapat berupa Kunjungan Supervisi dari Dinas

Kesehatan, Umpan Balik dalam bentuk tertulis, dan Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Upaya Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta, yang paling banyak diterima Puskesmas adalah dalam bentuk Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi (71,4%), dan diikuti oleh Kunjungan Supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (69,0%) dan kemudian Umpan Balik (54,8%). Sedangkan persentase Puskesmas yang menerima secara lengkap sebesar 49,4 persen.

Tabel 4.8.7.4.1.

Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Pengendalian Penyakit Menular | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|--|---------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Kunjungan Supervisi | Umpan Balik Laporan | Pertemuan Monev | Bimbingan Teknis Lengkap |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 83.3 | 100.0 | 83.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 71.8 | 55.1 | 69.2 | 50.0 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 62.5 | 51.1 | 71.6 | 47.7 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 82.9 | 73.2 | 73.2 | 65.9 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 66.2 | 56.8 | 75.7 | 50.0 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 65.3 | 38.8 | 63.3 | 32.7 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 93.2 | 75.0 | 84.1 | 68.2 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 65.4 | 51.7 | 69.5 | 46.6 |
| DKI Jakarta | | 336 | 69.0 | 54.8 | 71.4 | 49.4 |

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang menerima Kunjungan Supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 69,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di di Kota Jakarta Pusat (82,9%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (71,8%) dan Jakarta Barat (66,2). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Timur (62,5%), dan Kota Jakarta Utara(65,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Kunjungan Supervisi adalah 93,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 65,4%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang menerima Umpan Balik Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 54,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (83,3%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (73,2%), Kota Jakarta Barat (56,8%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (38,3%), dan Kota Jakarta Timur (51,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Umpan Balik Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah 75,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 51,7%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pertemuan Monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 71,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (75,7%), Kota Jakarta Pusat (73,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (63,3%), dan Kota Jakarta Selatan (69,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pertemuan Monev adalah 84,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 69,5%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang menerima keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan secara lengkap Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 49,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (65,9%), Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Barat (masing masing 50,0%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (32,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah 68,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 46,6%.

4.8.8. PROGRAM IMUNISASI

4.8.8.1. Program Imunisasi di Puskesmas

Pada Rifaskes 2011 jenis Pelayanan Imunisasi yang dikumpulkan meliputi Pelayanan Imunisasi Dalam Gedung Puskesmas dan Pelayanan Imunisasi di Luar Gedung Puskesmas. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta tertinggi adalah dengan frekuensi seminggu sekali (39,9%), kemudian frekuensi setiap hari (31,8%), dua hari dalam seminggu (19,6%), dan tiga hari dalam seminggu (7,1%).

Di Provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi setiap hari adalah sebesar 31,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%), diikuti oleh Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Barat (masing masing 50,0%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (32,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi setiap hari adalah 27,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 32,5%.

Di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dengan frekuensi 3 hari dalam seminggu adalah sebesar 7,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada Kota Jakarta Pusat (19,5%) dan di Jakarta Selatan (7,7%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten kepulauan Seribu (0,0%) dan Kota Jakarta Timur (2,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dengan frekuensi 3 hari dalam seminggu adalah 13,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 6,2%.

Di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas tertinggi yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi 2 hari dalam seminggu adalah sebesar 19,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (38,5%) dan di Jakarta Barat (16,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten kepulauan Seribu

(0,0%) dan Kota Jakarta Pusat (9,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi 2 hari dalam seminggu adalah 34,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 17,5%.

Di provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas tertinggi yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi seminggu sekali adalah sebesar 39,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada Kota Jakarta Utara (55,1%) dan di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%). Sedangkan Persentase terendah ada di dan Kota Jakarta Selatan (26,9%), dan Jakarta Pusat(29,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi seminggu sekali adalah 22,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 42,5%.

Tabel 4.8.8.1.1.
Persentase Puskesmas menurut Frekuensi Pelayanan Imunisasi di Dalam dan Luar Gedung di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Frekuensi Pelayanan Imunisasi Dalam Gedung Puskesmas | | | | Kegiatan Pelayanan Imunisasi di Luar Gedung Puskesmas |
|---------------------------------|----------------------|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | % Setiap Hari | % Tiga Hari/Minggu | % Dua Hari/Minggu | % Seminggu Sekali | |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 25.6 | 7.7 | 38.5 | 26.9 | 94.9 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 34.1 | 2.3 | 14.8 | 47.7 | 95.5 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 39.0 | 19.5 | 9.8 | 29.3 | 92.7 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 37.8 | 6.8 | 16.2 | 39.2 | 97.3 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 22.4 | 6.1 | 14.3 | 55.1 | 87.8 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 27.3 | 13.6 | 34.1 | 22.7 | 77.3 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 32.5 | 6.2 | 17.5 | 42.5 | 96.9 |
| DKI Jakarta | | 336 | 31.8 | 7.1 | 19.6 | 39.9 | 94.3 |

Di Provinsi DKI Jakarta Persentase Puskesmas tertinggi yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi di luar gedung adalah sebesar 94,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten kepulauan Seribu (100,0%), diikuti oleh Kota Jakarta Barat (97,3%), dan di Jakarta Timur (95,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (87,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan kegiatan Pelayanan imunisasi di luar gedung adalah 77,3%, sementara di Puskesmas Kelurahan 96,9%.

4.8.8.2. Pelatihan Program Imunisasi

Jenis Pelatihan dalam pelayanan imunisasi yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan Tatalaksana Imunisasi dan Pelatihan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) yang diikuti oleh petugas Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Dari kedua jenis pelatihan

tersebut, Pelatihan Tatalaksana Imunisasi merupakan pelatihan dengan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas Puskesmas (53,0%) dan kemudian Pelatihan KIPI (37,8%).

Tabel 4.8.8.2.1.
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Imunisasi Tahun 2009-2010 di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pelatihan Tata Laksana Imunisasi | Pelatihan KIPI | Pelatihan Lengkap Pelayanan Imunisasi |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 83.3 | 33.3 | 33.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 48.7 | 30.8 | 25.6 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 61.4 | 51.1 | 47.7 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 56.1 | 53.7 | 43.9 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 45.9 | 31.1 | 31.1 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 49.0 | 22.4 | 18.4 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 88.6 | 59.1 | 59.1 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 47.6 | 34.6 | 30.1 |
| DKI Jakarta | | 336 | 53.0 | 37.8 | 33.9 |

Persentase Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tatalaksana Imunisasi adalah sebesar 53,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten kepulauan Seribu (83,3%), diikuti oleh Kota Jakarta Timur (61,8%), dan di Jakarta Pusat (56,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Barat (45,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Tatalaksana Imunisasi adalah 88,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 47,6%.

Persentase Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang petugasnya mengikuti Pelatihan KIPI adalah sebesar 37,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Pusat (53,7%), diikuti oleh Jakarta Timur (51,1%) dan Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (22,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pelatihan KIPI adalah 59,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 34,6%.

Persentase Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang petugasnya mengikuti secara lengkap kedua jenis pelatihan pelayanan imunisasi tersebut adalah sebesar 33,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Timur (47,7%) diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (43,9%), dan Kabupaten kepulauan Seribu (33,3). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (18,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti secara lengkap kedua jenis pelatihan pelayanan imunisasi adalah 59,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 30,1%.

4.8.8.3. Pedoman Program Imunisasi

Jenis pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 ini meliputi Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi, Pedoman Penanganan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Imunisasi.

Persentase Puskesmas yang memiliki buku pedoman Pelayanan Imunisasi di Provinsi DKI Jakarta, terbanyak adalah Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia (75,9%), berturut turut diikuti oleh Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi (65,2%), SOP Pelayanan Imunisasi (51,8%), dan Pedoman Penanganan KIPI (49,7%). Sedangkan persentase Puskesmas yang memiliki lengkap keempat Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi tersebut adalah sebesar 36,9 persen.

Tabel 4.8.8.3.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Imunisasi di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Imunisasi | | | | Lengkap Pedoman Pelayanan Imunisasi |
|---------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia | Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi | Pedoman Penanganan KIPI | SOP Pelayanan Imunisasi | |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 83.3 | 66.7 | 50.0 | 16.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 71.8 | 60.3 | 41.0 | 53.8 | 32.1 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 77.3 | 63.6 | 52.3 | 47.7 | 35.2 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 92.7 | 85.4 | 70.7 | 68.3 | 61.0 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 75.7 | 68.9 | 52.7 | 48.6 | 40.5 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 63.3 | 51.0 | 34.7 | 46.9 | 24.5 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 86.4 | 93.2 | 75.0 | 79.5 | 61.4 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 74.3 | 61.0 | 45.9 | 47.6 | 33.2 |
| DKI Jakarta | | 336 | 75.9 | 65.2 | 49.7 | 51.8 | 36.9 |

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia adalah sebesar 75,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Jakarta Pusat (92,7%) dan Kota Jakarta Timur (77,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (63,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi adalah 86,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 74,3%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi adalah sebesar 65,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Pusat (85,4%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (83,3%), dan Jakarta

Barat (68,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (51,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi adalah 93,2%, sementara di Puskesmas Kelurahan 61,0%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki Pedoman Penanganan KIPi adalah sebesar 49,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Pusat (70,7%) diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), dan Jakarta Barat (52,7%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (34,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki Pedoman Penanganan KIPi adalah 75,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 45,9%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki SOP Pelayanan Imunisasi adalah sebesar 51,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Pusat (68,3%) diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (53,8%), dan Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (46,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki SOP Pelayanan Imunisasi adalah 79,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 47,6%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memiliki secara lengkap keempat jenis pedoman untuk Pelayanan Imunisasi adalah sebesar 36,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Pusat (61,0%) diikuti oleh Kota Jakarta Barat (40,5%), dan Jakarta Timur (35,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten kepulauan Seribu (16,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki secara lengkap keempat jenis pedoman untuk Pelayanan Imunisasi adalah 61,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 33,2%.

4.8.8.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan diperlukan dalam Pelayanan Imunisasi untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Pelayanan Imunisasi. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan dapat berupa kunjungan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Supervisi, Umpan Balik tertulis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, maupun ikut serta pada Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi(Monev) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta dalam Pelayanan Imunisasi adalah dalam bentuk Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi Program (73,2%), kemudian kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Supervisi (68,5%), dan Umpan Balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (59,2%).

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang menerima Kunjungan Supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah sebesar 68,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Jakarta Pusat (85,4%) dan oleh Kota Jakarta Selatan (73,1%). Sedangkan Persentase terendah ada Kota Jakarta Utara (55,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Kunjungan Supervisi adalah 93,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 64,7%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang menerima Umpan Balik pelayanan Imunisasi dari Dinas Kesehatan kabupaten/ Kota adalah sebesar 59,28 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (83,3%). diikuti oleh Kota Jakarta Jakarta Pusat (75,5%) dan Jakarta Timur (67,0%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Utara (46,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima Umpan Balik pelayanan Imunisasi adalah 86,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 55,1%.

Tabel 4.8.8.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Imunisasi di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|--|---------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota | Umpan Balik Laporan | Pertemuan Monev | Bimbingan Teknis Lengkap |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 100.0 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 73.1 | 60.3 | 82.1 | 53.8 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 68.2 | 67.0 | 68.2 | 50.0 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 85.4 | 75.6 | 85.4 | 73.2 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 60.8 | 45.9 | 62.2 | 44.6 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 55.1 | 46.9 | 73.5 | 40.8 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 93.2 | 86.4 | 90.9 | 79.5 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 64.7 | 55.1 | 70.5 | 47.6 |
| DKI Jakarta | | 336 | 68.5 | 59.2 | 73.2 | 51.8 |

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pertemuan Monitoring dan Evaluasi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebesar 73,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Pusat (85,4%) diikuti oleh Kabupaten kepulauan Seribu (83,3%), Kota Jakarta selatan (82,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Barat (62,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mengikuti Pertemuan Monitoring dan Evaluasi adalah 90,9% , sementara di Puskesmas Kelurahan 70,5%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang menerima secara lengkap seluruh bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi adalah sebesar 51,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (83,3%) diikuti oleh Jakarta Pusat (73,2%) dan Kota Jakarta Selatan (53,8%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (40,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang menerima secara lengkap seluruh bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi adalah 79,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 47,6%.

4.9. PELAYANAN PONED PUSKESMAS PERAWATAN

Pelayanan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar) ditanyakan pada Puskesmas Perawatan dengan Pelayanan PONED. Di Provinsi DKI Jakarta, Puskesmas dengan Pelayanan PONED berjumlah 21 Puskesmas. Semua Kabupaten/Kota di DKI Jakarta memiliki Puskesmas perawatan dengan PONED.

Tabel 4.9.1.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan
PONED di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No. | Kabupaten/Kota | Jml Pusk Perawatan PONED | Pelayanan PONED 24 jam | Pelatihan PONED yang diikuti Petugas |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Kepulauan Seribu | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 3 | 100.0 | 66.7 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 7 | 71.4 | 0.0 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 4 | 100.0 | 50.0 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 4 | 100.0 | 100.0 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 1 | 100.0 | 100.0 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 16 | 87.5 | 56.3 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 5 | 60.0 | 60.0 |
| DKI Jakarta | | 21 | 81.0 | 42.9 |

Tabel 4.9.1. menunjukkan ketersediaan Pelayanan PONED 24 jam dan Keikutsertaan petugas dalam pelatihan PONED. Persentase puskesmas Perawatan PONED yang memberikan pelayanan PONED 24 jam di Provinsi DKI Jakarta adalah 90,9 persen. Seluruh Puskesmas Perawatan PONED di 4 Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta memberikan pelayanan PONED 24 jam, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Persentase Puskesmas tertinggi ada di) diikuti oleh Jakarta Pusat (73,2%) dan Kota Jakarta Selatan (53,8%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0% dan Jakarta Timur (71,4%).). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memberikan pelayanan PONED 24 jam adalah 87,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 60,0%.

Persentase puskesmas Perawatan PONED di DKI Jakarta yang petugasnya telah mengikuti pelatihan PONED adalah 42,9 persen..Seluruh Puskesmas Perawatan PONED di 2 Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta yang petugasnya telah mengikuti pelatihan PONED (100%) yaitu di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Selatan (masing masing 0,0 %) , sementara di Jakarta Pusat (50,0%) dan di Jakarta Selatan hanya (66,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang petugasnya telah mengikuti pelatihan PONED adalah 56,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 60,0%.

4.10. PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sesuai SK Menkes no 128 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas, disebutkan bahwa salah satu dari tiga fungsi puskesmas adalah sebagai Pusat Pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan.

Tabel 4.10.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Petugas Khusus dan
Petugas yang dilatih Pemberdayaan Masyarakat,
Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas | Petugas Khusus | Petugas yang dilatih |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 66.7 | 50.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 76.9 | 25.6 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 43.2 | 28.4 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 53.7 | 31.7 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 50.0 | 13.5 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 59.2 | 20.4 |
| Tingkat Puskesmas | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 84.1 | 47.7 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 52.4 | 20.5 |
| DKI Jakarta | | 336 | 56.5 | 24.1 |

Tabel 4.10.1. menunjukkan di Provinsi DKI Jakarta , persentase Puskesmas yang mempunyai petugas khusus dan petugas yang dilatih pada tahun 2009 dan 2010. Persentase Puskesmas yang mempunyai petugas khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah 56,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (76,9%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), dan Jakarta Utara (59,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Timur (43,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai petugas khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah 84,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 52,4%.

Persentase Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang petugasnya mengikuti pelatihan terkait fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan bidang Kesehatan hanya 24,1 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%) dikuti oleh Jakarta Pusat (31,7%) dan Jakarta Timur (28,4%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Barat (13,5%). Tabel 4.10.2. menunjukkan tentang ketersediaan pedoman, Standard Operational Procedure (SOP)/Protap dan Peraturan tertulis yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota atau Puskesmas berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat. Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang petugasnya mengikuti pelatihan terkait fungsi Puskesmas

sebagai pusat pemberdayaan bidang Kesehatan adalah 47,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 20,5%.

Tabel 4.10.2.
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Pedoman, SOP dan Peraturan
tentang Pemberdayaan Masyarakat, di Provinsi DKI Jakarta
Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pedoman | SOP/Protap | Peraturan Tertulis |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 33.3 | 16.7 | 33.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 47.4 | 33.3 | 39.7 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 36.4 | 19.3 | 20.5 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 43.9 | 22.0 | 19.5 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 27.0 | 25.7 | 24.3 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 26.5 | 20.4 | 18.4 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 68.2 | 34.1 | 45.5 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 31.5 | 22.9 | 22.6 |
| DKI Jakarta | | 336 | 36.3 | 24.4 | 25.6 |

Dari 336 Puskesmas di DKI Jakarta, persentase Puskesmas yang memiliki pedoman pemberdayaan masyarakat hanya 36,3persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (47,4%), diikuti oleh Jakarta Pusat (43,9%) dan Jakarta Timur (36,4%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (26,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memiliki pedoman pemberdayaan masyarakat adalah 68,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 31,5%.

Sementara persentase Puskesmas yang mempunyai SOP/Protap pemberdayaan masyarakat hanya 24,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (33,3%) diikuti oleh Jakarta barat (25,7%) dan Jakarta Utara (20,4). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai SOP/Protap pemberdayaan masyarakat adalah 34,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 22,9%.

Di provinsi DKI Jakarta , persentase Puskesmas yang mempunyai peraturan tertulis pemberdayaan masyarakat hanya 25,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (39,7%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%) dan Jakarta Barat (24,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (25,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai peraturan tertulis pemberdayaan masyarakat adalah 45,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 22,6%.

Tabel 4.10.3. menunjukkan ketersediaan alokasi dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai alokasi dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan hanya 15,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%) diikuti oleh Jakarta Selatan (24,4%) dan Kota Jakarta Utara (20,4%).

Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Barat 8,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai alokasi dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah 47,7%, sementara di Puskesmas Kelurahan 11,0%.

Tabel 4.10.3.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alokasi Dana Khusus
Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas | Alokasi Dana Khusus |
|---------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 50.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 24.4 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 9.1 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 17.1 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 8.1 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 20.4 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 47.7 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 11.0 |
| DKI Jakarta | | 336 | 15.8 |

Tabel 4.10.4.a dan 4.10.4.b. menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan puskesmas yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pertemuan Tingkat Desa, Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), Pelatihan Kader Kesehatan Baru, Pertemuan Kader Kesehatan, Pelatihan Kader Lama, Pelatihan Bagi Tokoh Masyarakat, dan Pelatihan Bagi LSM/Ormas.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang terbanyak melaksanakan Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah berturut turut Pertemuan Kader (70,2%), kemudian Pelatihan Kader Lama (57,1), Musyawarah Masyarakat Desa (56,3%), Pertemuan Tingkat Desa (56,3%), Pelatihan Kader Kesehatan Baru (48,8%), Survei mawas Diri (45,8%), Pelatihan Bagi Toma (35,4%) dan Pelatihan Bagi Ormas (35,4).

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan kegiatan Pertemuan Tingkat Desa adalah 56,3%. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (82,1%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), dan Jakarta Timur (53,4%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Barat (37,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan kegiatan Pertemuan Tingkat Desa adalah 81,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 52,4%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan kegiatan Survei Mawas Diri adalah 45,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (69,2%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%) dan Jakarta utar (44,9%),

Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta barat (28,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan kegiatan Survei Mawas Diri adalah 81,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 40,4%.

Tabel 4.10.4.a.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pertemuan Tingkat Desa | Survei Mawas Diri | Musyawaharah Masyarakat Desa | Pelatihan Kader Kesehatan Baru |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 50.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 82.1 | 69.2 | 82.1 | 61.5 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 53.4 | 40.9 | 46.6 | 40.9 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 51.2 | 41.5 | 56.1 | 43.9 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 37.8 | 28.4 | 37.8 | 47.3 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 51.0 | 44.9 | 59.2 | 49.0 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 63.6 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 52.4 | 40.4 | 52.4 | 46.6 |
| DKI Jakarta | | 336 | 56.3 | 45.8 | 56.3 | 48.8 |

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa adalah 56,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (82,1%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%) dan Jakarta Pusat (56,1%), Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta barat (37,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa adalah 81,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 52,4%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan baru adalah 48,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (61,5%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%) dan Jakarta Utara (49,0%), Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Timur (40,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan baru adalah 63,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 46,6%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan kegiatan Pertemuan Kader Kesehatan adalah 70,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (89,7%), diikuti oleh Jakarta Pusat (73,2%), dan Jakarta Barat (64,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (61,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan kegiatan Pertemuan Kader Kesehatan adalah 93,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 66,8%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan kegiatan Pelatihan kader lama adalah 57,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (78,2%), diikuti oleh Jakarta Utara (55,1%), dan Jakarta Pusat (51,2%). Sedangkan

Persentase terendah ada di Jakarta Barat (47,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan kegiatan Pelatihan kader lama adalah 72,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 54,8%.

Tabel 4.10.4.b.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Pertemuan Kader Kesehatan | Pelatihan Kader Lama | Pelatihan Bagi Toma | Pelatihan Bagi LSM/Ormas |
|---------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 89.7 | 78.2 | 51.3 | 51.3 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 62.5 | 51.1 | 33.0 | 33.0 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 73.2 | 51.2 | 24.4 | 24.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 64.9 | 47.3 | 24.3 | 24.3 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 61.2 | 55.1 | 38.8 | 38.8 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 93.2 | 72.7 | 52.3 | 22.7 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 66.8 | 54.8 | 32.9 | 14.4 |
| DKI Jakarta | | 336 | 70.2 | 57.1 | 35.4 | 35.4 |

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan kegiatan pelatihan bagi Tokoh Masyarakat (Toma) adalah 35,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (51,3%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%) dan Jakarta Utara (38,8%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Barat (24,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan kegiatan pelatihan Toma adalah 52,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 32,9%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan kegiatan Pelatihan bagi LSM/Ormas adalah 35,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (51,3%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%) dan Jakarta Utara (38,8%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Barat (24,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan kegiatan Pelatihan bagi LSM/Ormas adalah 22,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 14,4%.

Tabel 4.10.5. menunjukkan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dilakukan petugas puskesmas berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Pembinaan dan pemantauan yang dilakukan dapat berupa Pemberian Umpan Balik Laporan kegiatan, melakukan Supervisi Kegiatan dan mengadakan Pertemuan Pembinaan Persentase Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Pembinaan dan pemantauan UKBM berturut turut adalah: melakukan pertemuan pembinaan sebesar 64,9 persen, diikuti melaksanakan supervisi sebesar 57,1 persen, dan memberikan umpan balik laporan kegiatan sebesar 54,8 persen.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang memberikan Umpan Balik Laporan kegiatan sebesar 54,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (71,8%). Diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), dan Jakarta Pusat (56,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (46,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang memberikan Umpan Balik Laporan kegiatan adalah 79,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 51,0%.

Tabel 4.10.5.
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan UKBM di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Umpan Balik | Supervisi | Pertemuan Pembinaan |
|--------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 71.8 | 78.2 | 85.9 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 47.7 | 44.3 | 54.5 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 56.1 | 58.5 | 65.9 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 48.6 | 47.3 | 55.4 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 46.9 | 59.2 | 63.3 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 79.5 | 90.9 | 93.2 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 51.0 | 52.1 | 58.9 |
| DKI Jakarta | | 336 | 54.8 | 57.1 | 64.9 |

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang melakukan Supervisi adalah 57,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (78,2%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%) dan Jakarta Utara (59,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Timur (44,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan Supervisi adalah 90,9% , sementara di Puskesmas Kelurahan 52,1%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang melakukan Pertemuan Pembinaan adalah 64,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Selatan (85,9%), diikuti Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%) dan Jakarta Pusat (65,9%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Barat (55,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang melakukan Pertemuan Pembinaan adalah 93,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 58,9%.

Tabel 4.10.6. menunjukkan kondisi input dan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Input dikategorikan baik bila tersedia sumber daya tenaga, pedoman dan dana khusus. Sedangkan proses dikategorikan baik bila ada kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, pelatihan kader kesehatan baru dan lama.

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas dengan kondisi input pemberdayaan masyarakat yang baik hanya 8,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%) diikuti oleh Jakarta Selatan (11,5%) dan Kota Jakarta Pusat (9,8%).

Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Barat (1,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan dengan kondisi input pemberdayaan masyarakat yang baik adalah 25,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 5,5%.

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas dengan proses yang baik dalam pemberdayaan masyarakat hanya 38,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada Kota Jakarta Selatan (59,0%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%) dan Jakarta Timur (35,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Barat (24,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan dengan proses yang baik dalam pemberdayaan masyarakat adalah 63,6% , sementara di Puskesmas Kelurahan 34,6%.

Tabel 4.10.6.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Input dan Proses
Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Input | Proses |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 33.3 | 50.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 11.5 | 59.0 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 8.0 | 35.2 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 9.8 | 24.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 1.4 | 24.3 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 8.2 | 42.9 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 25.0 | 63.6 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 5.5 | 34.6 |
| DKI Jakarta | | 336 | 8.0 | 38.4 |

Tabel 4.10.7.a. dan 4.10.7.b. menunjukkan keberadaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Jenis UKBM yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pos Pelayanan terpadu (Posyandu), Pos Pelayanan terpadu bagi lanjut usia (Posyandu Lansia), Pos Obat desa (POD)/Warung Obat Desa (WOD), Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan pesantren (Poskestren), Dana Sehat, Kelompok Peduli Lansia, Kelompok Peduli HIV-AIDS dan Kelompok Peduli TB Paru.

Di provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas dengan keberadaan UKBM yang terbanyak berturut turut adalah Posyandu (92,6), kemudian Posyandu Lansia (67,9%), Dana Sehat(27,7%), Peduli Lansia (38,7%), Peduli TB Paru (30,78%), Poskestren (3,31%), POD/WOD (2,1%), Peduli HIV-AIDS (17,6%) dan SBH (8,6%).

Persentase Puskesmas yang ada Posyandu di provinsi DKI Jakarta adalah 92,6 persen,. Persentase Puskesmas tertinggi ada Jakarta Selatan (96,2%) dikuti oleh Kota Jakarta Pusat (95,1%), dan Jakarta Timur(92,0%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Barat (90,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang ada Posyandu adalah 95,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 92,1%.

Laporan Provinsi DKI Jakarta Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Di provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas yang ada Posyandu Lansia adalah 67,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Selatan (80,8%) diikuti oleh Jakarta Timur (77,3%) dan Kota Jakarta Pusat (68,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (38,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang ada Posyandu Lansia adalah 77,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 66,4%.

Tabel 4.10.7.a.
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Posyandu | Posyandu Lansia | POD/WOD | SBH | Poskestren |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0,0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 96.2 | 80.8 | 1.3 | 11.5 | 6.4 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 92.0 | 77.3 | 1.1 | 8.0 | 2.3 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 95.1 | 68.3 | 2.4 | 4.9 | 2.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 90.5 | 62.2 | 4.1 | 6.8 | 2.7 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 91.8 | 38.8 | 2.0 | 8.2 | 2.0 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 95.5 | 77.3 | 95.5 | 27.3 | 15.9 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 92.1 | 66.4 | 2.4 | 5.8 | 1.4 |
| DKI Jakarta | | 336 | 92.6 | 67.9 | 2.1 | 8.6 | 3.3 |

Di provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas yang ada POD/WOD adalah 2,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Barat (4,1%) diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (2,4%) dan Jakarta Utara (2,0%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%) dan Jakarta Timur (1,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang ada POD/WOD adalah 95,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 2,4%.

Di provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas yang ada SBH adalah 8,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%) diikuti oleh Jakarta Selatan (11,5%) dan Kota Jakarta Utara (8,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Pusat (4,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang ada SBH adalah 27,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 5,8%.

Di provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas yang ada Poskestren adalah 3,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Selatan (6,4%) dan diikuti oleh Kota Jakarta Barat (2,7%), dan Jakarta Pusat (2,4%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%) dan Jakarta Utara (2,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang ada Poskestren adalah 15,9% , sementara di Puskesmas Kelurahan 1,4%.

Tabel 4.10.7.b. menunjukkan di provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas yang ada Dana Sehat 27,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%) diikuti oleh Jakarta Selatan (32,1%) dan Kota Jakarta Pusat (29,3%). Sedangkan

persentase terendah ada di Jakarta barat (24,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang ada Dana Sehat adalah 59,1%, sementara di Puskesmas Kelurahan 22,9%.

Di provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas yang ada Kelompok Peduli Lansia adalah 38,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%) diikuti oleh Jakarta Barat (45,9%) diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (41,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (28,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang ada Kelompok Peduli Lansia adalah 61,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 35,3%.

Tabel 4.10.7.b.
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Dana Sehat | Peduli Lansia | Peduli HIV-AIDS | Peduli TB Paru |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 16.7 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 32.1 | 41.0 | 19.2 | 24.4 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 28.4 | 34.1 | 13.6 | 33.0 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 29.3 | 41.5 | 14.6 | 24.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 23.0 | 45.9 | 20.3 | 39.2 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 24.5 | 28.6 | 22.4 | 30.6 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 59.1 | 61.4 | 68.2 | 63.6 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 22.9 | 35.3 | 9.9 | 25.7 |
| DKI Jakarta | | 336 | 27.7 | 38.7 | 17.6 | 30.7 |

Di provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas yang ada Kelompok Peduli HIV-AIDS adalah 17,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Utara (22,4%), diikuti oleh Jakarta Barat (20,3%) dan Jakarta Selatan (19,2%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%) dan Jakarta Timur (13,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang ada Kelompok Peduli HIV-AIDS adalah 68,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 9,9%.

Di provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas yang ada Kelompok Peduli TB Paru adalah 30,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Barat (39,2%) diikuti oleh Jakarta Timur (33,0%) dan Jakarta Utara (30,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang ada Kelompok Peduli TB Paru adalah 63,6%, sementara di Puskesmas Kelurahan 25,7%.

4.11. ALAT KESEHATAN (ALKES) DAN OBAT

Ketersediaan alat kesehatan dianalisis menurut: jumlah Jenis alat yang baik dan digunakan yaitu jenis alat yang ditunjukkan dan diakui alat tersebut baik dan digunakan untuk pelayanan. Jumlah Jenis/item alat dikelompokkan atas 5 yaitu : Tersedia 80-100 persen, 60-79 persen, 40-59 persen, 20-39 persen, dan 0- 19 persen dari sejumlah jenis alat

4.11.1. ALKES POLIKLINIK UMUM

Pada Rifaskes 2011 data jenis alat Poliklinik umum yang dikumpulkan sebanyak 56 jenis.

Tabel 4.11.1.1.
Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Ketersediaan jenis Alat Kesehatan Poliklinik Umum di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Ketersediaan Jenis Alat Kesehatan Poliklinik Umum | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | 80-100% | 60-79% | 40-59% | 20-39% | < 20% |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 3.8 | 38.5 | 34.6 | 14.1 | 9.0 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 5.7 | 29.5 | 45.5 | 12.5 | 6.8 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 14.6 | 36.6 | 36.6 | 9.8 | 2.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 10.8 | 44.6 | 29.7 | 9.5 | 5.4 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 6.1 | 32.7 | 44.9 | 16.3 | 0.0 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 20.5 | 40.9 | 31.8 | 2.3 | 4.5 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 6.2 | 36.3 | 38.4 | 13.7 | 5.5 |
| DKI Jakarta | | 336 | 8.0 | 36.9 | 37.5 | 12.2 | 5.4 |

Tabel 4.11.1.1. menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat poliklinik umum. Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas yang mempunyai 80-100 persen jenis alat poliklinik umum hanya 8,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%) diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (14,6%) dan Jakarta Barat (10,8%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kota Jakarta Selatan(3,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 80-100 persen jenis alat poliklinik umum adalah 20,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 6,2%.

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik umum adalah 36,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), diikuti oleh kota Jakarta Barat (44,6%) dan di Jakarta Selatan (34,6%). Sedangkan persentase terendah ada di Jakarta Timur (29,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik umum adalah 40,9%, sementara di Puskesmas Kelurahan 36,3%.

Persentase Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik umum adalah 37,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kota Jakarta Timur (45,5%) diikuti oleh Jakarta Utara (44,9%) dan Jakarta Pusat (36,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik umum adalah 31,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 38,4%.

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik umum adalah 12,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Utara (16,3%) diikuti oleh Jakarta Selatan (14,1%) dan Jakarta Timur (12,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik umum adalah 2,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 13,7%.

Persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik umum di Provinsi DKI Jakarta adalah 5,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Selatan (9,0%) diikuti oleh Jakarta Timur (6,8%) dan Jakarta Barat (5,4%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara (masing masing 0,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik umum adalah 4,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 5,5%.

4.11.2. ALKES POLIKLINIK KIA

Pada Rifaskes 2011 data jenis alat Poliklinik KIA yang dikumpulkan sebanyak 59 jenis. Tabel 4.11.2.1. menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat poliklinik KIA. Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas yang mempunyai 80-100 persen jenis alat poliklinik KIA hanya 6,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%) diikuti oleh Jakarta Pusat (14,6%) dan Jakarta Barat (8,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Timur (2,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 80-100 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 15,9% , sementara di Puskesmas Kelurahan 5,1%.

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 37,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (66,7%), diikuti oleh Kota Jakarta Pusat (46,3%) dan Jakarta Barat (40,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Timur (30,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 45,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 36,3%.

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 38,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Timur (44,3%) diikuti oleh Jakarta Utara (42,9%) dan Jakarta Pusat (36,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu(0,0%) dan Jakarta Selatan (34,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 18,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 41,4%.

Tabel 4.11.2.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Alat Kesehatan Poliklinik KIA
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Ketersediaan Jenis Alat Kesehatan Poliklinik KIA | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | 80-100% | 60-79% | 40-59% | 20-39% | < 20% |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 5.1 | 34.6 | 34.6 | 19.2 | 6.4 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 2.3 | 30.7 | 44.3 | 21.6 | 1.1 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 14.6 | 46.3 | 36.6 | 2.4 | 0.0 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 8.1 | 40.5 | 36.5 | 9.5 | 5.4 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 4.1 | 38.8 | 42.9 | 14.3 | 0.0 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 15.9 | 45.5 | 18.2 | 18.2 | 2.3 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 5.1 | 36.3 | 41.4 | 5.1 | 36.3 |
| DKI Jakarta | | 336 | 6.5 | 37.5 | 38.4 | 14.6 | 3.0 |

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 14,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Timur (21,6%) diikuti oleh Jakarta Selatan (19,2%) dan Jakarta Utara (14,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu(0,0%) dan Jakarta Pusat (2,4%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 18,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 5,1%.

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 3,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Selatan (6,4%) diikuti oleh Jakarta Barat (5,4%) .Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara (masing masing 0,0%), dan Jakarta Timur(1,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 2,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 36,3%.

4.11.3. ALKES PONED

Ditanyakan khusus pada Puskesmas Perawatan PONED. Pada Rifaskes 2011 data Jenis Alat PONED yang dikumpulkan sebanyak 26 jenis.

Tabel 4.11.3.1, menunjukkan persentase Puskesmas Perawatan PONED menurut ketersediaan jenis alat kesehatan PONED. Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas perawatan PONED yang mempunyai 80% atau lebih jenis alat kesehatan PONED adalah 14,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Selatan (33,3%) diikuti oleh Jakarta Pusat (25,0%), dan Jakarta Timur (14,3%) .Sedangkan 3 Kabupaten/Kota lainnya 0,0 persen. Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan perawatan PONED yang mempunyai 80% atau lebih jenis alat kesehatan PONED adalah 18,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan tidak ada (0,0%).

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas Perawatan Poned yang mempunyai 60-79 persen jenis alat kesehatan Poned 42,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Utara (100%) diikuti oleh Jakarta Barat (75,0%) dan Jakarta Selatan (66,7%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%), dan di Jakarta Pusat (25,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan Perawatan Poned yang mempunyai 60-79 persen jenis alat kesehatan Poned adalah 50,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 20,0%.

Tabel 4.11.3.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Alat Poned
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk Perawatan Poned | Ketersediaan jenis Alat Poned | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 80-100% | 60-79% | 40-59% | 20-39% | < 20% |
| 1 | Kepulauan Seribu | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 3 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 7 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 14.3 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 4 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 16 | 18.8 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 6.3 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 5 | 0,0 | 20.0 | 0,0 | 40.0 | 40.0 |
| DKI Jakarta | | 21 | 14.3 | 42.9 | 19.0 | 9.5 | 14.3 |

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas perawatan Poned yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan Poned adalah 19,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Pusat (50,0%) diikuti oleh Jakarta Barat (25,0%) dan Jakarta Timur(14,3%) .Sedangkan di 3 Kabupaten/Kota lainnya adalah 0,0 persen. Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan dengan perawatan Poned yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan Poned adalah 25,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 0,0%.

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas perawatan Poned yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan Poned adalah 9,5 persen, dan semuanya hanya terdapat di Kota Jakarta Timur (28,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan dengan perawatan Poned yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan Poned adalah 0,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 40,0%.

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas Perawatan Poned yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat kesehatan Poned adalah 14,3 persen, dan semuanya hanya terdapat di Kota Jakarta Timur (14,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan dengan Perawatan Poned yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat kesehatan Poned adalah 6,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 40,0%.

4.11.4. ALKES IMUNISASI

Tabel 4.11.4.1, menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat imunisasi. Jenis alat kesehatan imunisasi yang dimaksud pada laporan ini adalah Cold Box, Vaccine Carrier dan Kulkas yang dimiliki puskesmas tersebut untuk pelayanan imunisasi.

Tabel 4.11.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alkes Imunisasi di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas | Ketersediaan Alkes Imunisasi (Kulkas, Cold Box, Vaccine Carrier) |
|---------------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 50.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 48.7 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 35.2 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 65.9 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 44.6 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 42.9 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 75.0 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 41.1 |
| DKI Jakarta | | 336 | 45.5 |

Tabel 4.11.4.1., menunjukkan persentase Puskesmas yang mempunyai tiga jenis alat imunisasi (cold box, kulkas dan vaccine carrier) yang berfungsi. Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas yang mempunyai ketiga jenis alat imunisasi berfungsi hanya 45,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Pusat (65,9%) diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%), dan Jakarta Selatan (48,7%) .Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Timur (35,2%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai ketiga jenis alat imunisasi berfungsi adalah 75,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 41,1%.

4.11.5. OBAT UMUM

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat umum yang dikumpulkan sebanyak 44 jenis. Tabel 4.11.5.1. menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan Jenis obat umum. Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas yang mempunyai 80-100 persen ketersediaan Jenis Obat Umum adalah 16,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%) diikuti oleh kota Jakarta Barat (21,6%), dan Jakarta pusat (17,1%). .Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Selatan (9,0%), dan Jakarta Utara (14,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 80-100 persen ketersediaan Jenis Obat Umum adalah 72,7% , sementara di Puskesmas Kelurahan 7,5%.

Tabel 4.11.5.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Obat Umum
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Ketersediaan Jenis Obat Umum | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | | 80-100% | 60-79% | 40-59% | 20-39% | < 20% |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 9.0 | 44.9 | 39.7 | 5.1 | 1.3 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 17.0 | 55.7 | 23.9 | 1.1 | 2.3 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 17.1 | 48.8 | 29.3 | 2.4 | 2.4 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 21.6 | 47.3 | 29.7 | 1.4 | 0.0 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 14.3 | 77.6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 72.7 | 25.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 7.5 | 57.9 | 30.8 | 2.4 | 1.4 |
| DKI Jakarta | | 336 | 16.1 | 53.6 | 27.1 | 2.1 | 1.2 |

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis Obat Umum adalah 53,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Jakarta Utara (77,6%) diikuti oleh Jakarta Timur(55,7%), dan Kabupaten Kepulauan Seribu (50,0%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Selatan (44,9%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 60-79 persen Jenis Obat Umum adalah 25,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 57,9%.

Persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis Obat Umum di Provinsi DKI Jakarta adalah 27,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Selatan (39,7%) diikuti oleh Jakarta Barat (29,7%) dan Jakarta Pusat (29,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara (8,2%) dan Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 40-59 persen Jenis Obat Umum adalah 2,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 30,8%.

Persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis Obat Umum di Provinsi DKI Jakarta adalah 2,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Selatan (5,1%) diikuti oleh Jakarta Pusat (2,4%) dan Jakarta Barat (1,4%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu (masing masing 0,0%) dan Jakarta Timur (1,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 20-39 persen Jenis Obat Umum adalah 0,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 2,4%.

Persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen Jenis Obat Umum di Provinsi DKI Jakarta adalah 1,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Pusat (2,4%) diikuti oleh Jakarta Timur (2,3%) dan Jakarta Selatan (1,3%). Sedangkan Di 3 Kabupaten/Kota lainnya 0.0 persen. Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai kurang dari 20 persen Jenis Obat Umum adalah 0,0% , sementara di Puskesmas Kelurahan 1,4%.

4.11.6. OBAT PONED

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat Poned yang dikumpulkan sebanyak 17 jenis. Tabel 4.11.6.1. menunjukkan persentase Puskesmas Perawatan Poned menurut ketersediaan Jenis obat Poned. Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas Perawatan Poned yang mempunyai 80-100 persen Jenis obat Poned hanya 14,3 persen, dan hanya ada di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kota Jakarta Utara (100%) dan Kota Jakarta Pusat (50,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Perawatan Poned pada Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 80-100 persen Jenis obat Poned adalah 18,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 0,0%.

Tabel 4.11.6.1.
Persentase Puskesmas Perawatan Poned menurut Ketersediaan Jenis Obat Poned di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk Perawatan Poned | Ketersediaan Jenis Obat Poned | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | | 80-100% | 60-79% | 40-59% | 20-39% | < 20% |
| 1 | Kepulauan Seribu | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 42.9 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 4 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <u>Tingkat Puskesmas</u> | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 16 | 18.8 | 6.3 | 6.3 | 43.8 | 25.0 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 |
| DKI Jakarta | | 21 | 14.3 | 4.8 | 4.8 | 42.9 | 33.3 |

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas Perawatan Poned yang mempunyai 60-79 persen Jenis obat Poned hanya 4,8 persen, dan hanya ada di Kota Jakarta Pusat (25,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Perawatan Poned pada Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 60-79persen Jenis obat Poned adalah 6,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 0,0%.

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas perawatan Poned yang mempunyai 40-59 persen Jenis obat Poned hanya 4,8 persen, dan hanya ada di Kota Jakarta Barat (25,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Perawatan Poned pada Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 40-59 persen Jenis obat Poned adalah 6,3% , sementara di Puskesmas Kelurahan 0,0%.

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas Perawatan Poned yang mempunyai 20-39 persen Jenis obat Poned adalah 42,9 persen, dan hanya ada di 3 Kabupaten/Kota yaitu di kota Jakarta Selatan (100%) diikuti oleh Jakarta Timur (57,1%) dan Jakarta barat (50,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Perawatan Poned pada Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 20-39persen Jenis obat Poned adalah 43,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 40,0%.

Di Provinsi DKI Jakarta, persentase Puskesmas Perawatan Poned yang mempunyai persediaan jenis obat Poned kurang dari 20 persen adalah 33,3 persen, dan berada di 4 Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten kepulauan Seribu (100%), diikuti oleh Jakarta Timur (42,9%), Jakarta Pusat dan Jakarta Barat (masing masing 25,0%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Perawatan Poned pada Puskesmas Kecamatan yang mempunyai kurang dari 20 persen Jenis obat Poned adalah 25,0%, sementara di Puskesmas Kelurahan 60,0%.

4.11.7. OBAT/ALAT KELUARGA BERENCANA (KB)

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat/Alat KB yang dikumpulkan sebanyak 11 jenis. Tabel 4.11.7.1, menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan Jenis Obat/Alat KB. Di provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih Jenis Obat/Alat KB adalah 17,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Utara (32,7%) diikuti oleh Jakarta Pusat (22,0%) dan Jakarta Barat (17,6%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (0,0%), dan Jakarta Selatan (10,3%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 80 persen atau lebih Jenis Obat/Alat KB adalah 31,8% , sementara di Puskesmas Kelurahan 15,8%.

Tabel 4.11.7.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Obat/Alat KB
di Provinsi DKI Jakarta, Rifaskes 2011

| No | Kabupaten/Kota | Jml Pusk | Ketersediaan Jenis Obat/Alat KB | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 80-100% | 60-79% | 40-59% | 20-39% | < 20% |
| 1 | Kepulauan Seribu | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 50.0 | 33.3 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 78 | 10.3 | 14.1 | 39.7 | 30.8 | 5.1 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 88 | 15.9 | 0.0 | 29.5 | 38.6 | 15.9 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 41 | 22.0 | 14.6 | 36.6 | 17.1 | 9.8 |
| 5 | Kota Jakarta Barat | 74 | 17.6 | 8.1 | 35.1 | 25.7 | 13.5 |
| 6 | Kota Jakarta Utara | 49 | 32.7 | 4.1 | 28.6 | 24.5 | 10.2 |
| Tingkat Puskesmas | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Kecamatan | 44 | 31.8 | 9.1 | 29.5 | 18.2 | 11.4 |
| 2 | Puskesmas Kelurahan | 292 | 15.8 | 7.2 | 34.2 | 31.2 | 11.6 |
| DKI Jakarta | | 336 | 17.9 | 7.4 | 33.6 | 29.5 | 11.6 |

Di provinsi DKI Jakarta , persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 7,4persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Pusat (14,6%) diikuti oleh Jakarta Selatan (14,1%), dan Jakarta Barat (8,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Jakarta Timur (masing masing 0,0%), dan Jakarta Utara (4,1%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 60-79 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 9,1% , sementara di Puskesmas Kelurahan 7,2%.

Di provinsi DKI Jakarta persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 33,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di kota Jakarta Selatan (39,7%) diikuti oleh Jakarta Pusat (36,6%) dan Jakarta Barat (35,1%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (16,7%), dan Jakarta Utara (28,6%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 40-59 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 29,5% , sementara di Puskesmas Kelurahan 34,2%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang mempunyai 20-39 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 29,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu(50,0%),diikuti oleh kota Jakarta Timur (38,6%) dan Jakarta Selatan (30,8%) .Sedangkan Persentase terendah ada Jakarta Pusat (17,1%) dan Jakarta Utara (24,5%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 20-39 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 18,2% , sementara di Puskesmas Kelurahan 31,2%.

Persentase Puskesmas di provinsi DKI Jakarta yang mempunyai 0-19 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 11,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu (33,3%), diikuti oleh kota Jakarta Timur (15,9%), dan Jakarta Barat (13,5%). Sedangkan Persentase terendah ada di Jakarta Selatan (5,1%), dan Jakarta Pusat (9,8%). Bila dibedakan menurut tingkat Puskesmas, persentase Puskesmas Kecamatan yang mempunyai 0-19 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 11,4% , sementara di Puskesmas Kelurahan 11,6%.

BAB V

KESIMPULAN

Rifaskes Puskesmas 2011 telah menghasilkan gambaran input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang sangat kaya, rinci dan cukup valid untuk membuat gambaran atau potret fasilitas kesehatan di Puskesmas mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Administratif maupun individual Puskesmas.

Pada prinsipnya ditemukan bahwa komponen-komponen input (terutama SDM, sarana dan prasarana) dan proses (terutama kegiatan, pembinaan, supervisi dan monitoring) dari pelayanan kesehatan di Puskesmas masih belum seperti yang diharapkan. Pada unsur input upaya kesehatan Puskesmas ditemukan bahwa baik kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta obat dan alat kesehatan yang saat ini ada di Puskesmas masih dibawah standar yang telah ditentukan. Ditemukan juga terjadi kesenjangan *supply* dan *demand* dari unsur input upaya kesehatan Puskesmas. Disamping itu digambarkan pula adanya disparitas unsur input upaya kesehatan Puskesmas antar antar Kabupaten/Kota Administratif maupun individual Puskesmas. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa penyediaan sarana, prasarana, dan SDM yang sesuai dengan ketiga fungsi Puskesmas (pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan pembangunan berwawasan kesehatan) masih belum diperhatikan dengan semestinya.

Di Provinsi DKI Jakarta, dari 336 Puskesmas ,44 diantaranya adalah Puskesmas Kecamatan (Puskesmas Pembina) dan 292 adalah Puskesmas Kelurahan. Fasilitas kesehatan di Puskesmas Kecamatan lebih baik dari fasilitas kesehatan di Puskesmas Kelurahan .

Di Provinsi DKI Jakarta, dari 336 Puskesmas, sebanyak 1,2% Puskesmas tidak memiliki tenaga dokter, 5,7% tidak memiliki dokter gigi, 1,5% tidak memiliki perawat, dan 0,6% tidak memiliki tenaga bidan, 26,8% Puskesmas 75,0% tidak memiliki tenaga gizi, 80,4% tidak memiliki sanitarian, dan 85,7% tidak memiliki tenaga promkes. SDM di Puskesmas Kecamatan lebih baik dari Puskesmas Kelurahan, Semua Puskesmas Kecamatan mempunyai dokter dengan rata-rata 10 orang per puskesmas, sedangkan di Puskesmas Kelurahan hanya 98,8 persen dengan rata-rata 1,1 orang per puskesmas. Sementara Persentase Puskesmas Kecamatan mempunyai tenaga Promkes adalah 70,5% dengan rata-rata 1,4 orang per puskesmas, sedangkan di Puskesmas Kelurahan hanya 5,8% dengan rata-rata 0,1 orang per puskesmas.

Dari sudut sarana prasarana, ditemukan bahwa 17% bangunan Puskesmas berada dalam kondisi rusak sedang dan berat dan 5% Puskesmas memiliki jenis bangunan semi permanen/tidak permanen, sarana air bersih hanya dimiliki oleh 85,7% Puskesmas dan 0,5% Puskesmas tidak mempunyai listrik 24 jam.

Sekitar 55% Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta memiliki kelengkapan alkes poliklinik umum kurang dari 60% jumlah standar alkes poliklinik umum (56 alat). Sebanyak 42,8% Puskesmas Perawatan PONE D memiliki kelengkapan alatt PONE D kurang dari 60%. Hanya 14,3% Puskesmas Perawatan PONE D yang memiliki kelengkapan obat PONE D $\geq 80\%$ lengkap.

Pada unsur proses upaya kesehatan Puskesmas, terjadi kesenjangan kelengkapan dan kualitas kegiatan, pelaksana program, pembinaan, monitoring dan supervisi program Puskesmas dibanding dengan standar yang sudah ditentukan dan disepakati. Ditemukan juga disparitas proses upaya kesehatan Puskesmas tersebut diatas antar Kabupaten/Kota Administratif maupun individual Puskesmas.

Dilihat dari input dan proses yang menunjang tiga fungsi Puskesmas, maka input dan proses yang mendukung keberhasilan fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan masih jauh dari harapan. Hanya 56,5% Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki petugas didalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat (84,1% Puskesmas Kecamatan dan 52,4% Puskesmas Kelurahan). Disamping itu pelatihan yang dibutuhkan untuk fungsi tersebut kepada tenaga pelaksananya kurang sekali dilakukan, hanya 24,1% petugas yang dilatih untuk kegiatan fungsi pemberdayaan masyarakat (47,7% Puskesmas Kecamatan dan 20,5% Puskesmas Kelurahan).

Khusus untuk pencapaian MDG's, maka input dan proses program wajib kesehatan ibu dan anak, terutama program PONE D, masih jauh dibandingkan standar minimal yang harus dipenuhi. Hanya 50,0 persen Puskesmas Kecamatan yang merupakan Puskesmas PONE D, (36,4 persen di Puskesmas Perawatan dan 13,6 persen di Puskesmas non perawatan), dan 4,8 persen Puskesmas Kelurahan (1,7% di Puskesmas perawatan dan 3,1% di Puskesmas non perawatan).

Dalam manajemen pelaksanaan Rifaskes Puskesmas 2011, telah pula dilakukan validasi proses dan substansi Rifaskes Puskesmas 2011 (bersama-sama dengan RSU Pemerintahan dan Laboratorium Klinik Mandiri), oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, UNAIR dan UNHAS. Hasil validasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% langkah-langkah proses Rifaskes Puskesmas 2011 dilaksanakan sesuai proposal, pedoman, instrumen Rifaskes Piuskesmas 2011 dan Rifaskes 2011 secara umum. Demikian pula variabel yang dihasilkan oleh Rifaskes 2011, 80% sesuai dengan hasil validasi yang dilakukan oleh ketiga Universitas tersebut diatas.

BAB VI

SARAN-SARAN

1. Perlu dilakukan analisis lanjut terhadap data yang dihasilkan oleh Rifaskes Puskesmas 2011, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota Administratif
2. Dari hasil Rifaskes Puskesmas 2011, jelas sudah diketahui semua permasalahan dan kekurangan unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas di seluruh Indonesia, termasuk juga di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian intervensi dan perbaikan pada unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas telah tergambarkan secara jelas dan gamblang tanpa harus membuat intervensi baru.
3. Perlu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hasil Rifaskes 2011 untuk masukan perencanaan kesehatan tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu sebaiknya ada perencanaan yang terpadu didalam penggunaan dana yang sudah tersedia, baik Dana Dekonsentrasi, DAK, DAU, APBD Provinsi, dan BLN.
4. Untuk perencanaan Provinsi perlu memprioritaskan masalah-masalah input dan proses yang ditemukan dari hasil data Rifaskes 2011 sehingga spesifikasi daerah bisa nampak dan efisiensi penggunaan dana bisa terjadi. Prioritas input dan proses ini akan lebih baik lagi apabila dimulai dari tingkat Kabupaten/Kota.
5. Secara horisontal di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, perencanaan program-program Puskesmas tidak mungkin sempurna apabila tidak dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan terintegrasi antar Ditjen, Bidang dan unsur-unsur terkait yang kewenangannya secara berbeda-beda ada pada mereka, namun berhubungan erat sekali dengan program kesehatan prioritas.
6. Secara vertikal perlu kejelasan dan komitmen yang sungguh-sungguh terhadap kewenangan dan fungsi masing-masing level didalam pelaksanaan program-program kesehatan prioritas dengan integritas yang tinggi.
7. Khusus untuk pencapaian MDG's, perlu diprioritaskan, ditekankan, dan diperkuat program PONED di seluruh Indonesia, terutama daerah DTPK.
8. Pemenuhan dan pengembangan input dan proses upaya Puskesmas yang menunjang ke tiga fungsi utama Puskesmas yaitu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan perlu mendapatkan prioritas tinggi.
9. Kesenjangan geografi, perdesaan/perkotaan dari input dan proses upaya kesehatan Puskesmas harus segera dipikirkan pemecahannya dengan meningkatkan integritas dan kejelasan pembagian peran antara Kementerian Kesehatan, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

10. Untuk kepentingan persiapan BPJS, maka sudah jelas bahwa dari hasil Rifaskes Puskesmas 2011, perlu segera memperbaiki atau memenuhi kekurangan unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas dengan segera pada tahun 2013 seoptimal mungkin. Tanpa hal ini dilaksanakan, maka akan diragukan keberhasilan pelaksanaan BPJS yang akan dimulai pada tahun 2014 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pengisian Kuesioner Puskesmas Riset Fasilitas Kesehatan, 2011

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia (Riskesdas), 2007

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia 2010*, 2010

Blum, H.L. *Planning for Health*, 2nd Edition. Human Sciences Press, 1981

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional, 2009

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, 2008

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, 2008

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, 2007

Donabedian, Avedis. *Explorations in Quality Assessment and Monitoring. Vol I. The Definition of Quality and Approaches to its Assessment, 1980; Vol.II. The Criteria and Standards of Quality. 1982; Vol. III The Methods and Findings of Quality Assessment and Monitoring: An Illustrated Analysis. Ann Arbor: Health Administration Press, 1985.*

Jakab, M., Preker, A., Harding, A. and Hawkins, L. *The Introduction of Market Forces in The Public Hospital Sector. From New Public Sector Management to Organizational Reform. Health, Nutrition and Population (HNP) Discussion Paper, the World Bank, 2002*

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/160/2010 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010-2014, 2010

Republik Indonesia. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, 2010

Republik Indonesia. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, 2010

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2007

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, 2010

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2011

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009

LAMPIRAN

**SUSUNAN TIM
RIFASKES 2011
PROVINSI DKI JAKARTA**

LAMPIRAN

KUESIONER RIFASKES PUSKESMAS 2011